Said Saleh Salihi

Evaluasi Transaksi Murabahah Berdasarkan PSAK Syariah 102 pada PT. Bank Muamalat
Cabang Pembantu Baubau

Alfa, fan Muklis

Rafiuddin

Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Karyawan Pada PT. Makes Prima Motor
Kota Baubau

Nur Hayati

Sulhan Manaf

Strategi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Serta Efektivitas Penerimaannya di
Pemerintah Kota Baubau 2014- - 2016

Atmani

R. Supalal Estihadi

Analisis Pencatatan Akuntansi Iuran dan Pensiun PT. Pos Indonesia (Persero) Kota Baubau

Bima Sakti Herfinta

Analisis Pengendalian Internal Atas Siklus Pendapatan Jasa (Studi Kasus Pada Hotel
Calista Beach Baubau)

Litha Numitha

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas, Rawat Inap dan
Jalan Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Kota Baubau

Ansar

Analisis Profitabilitas Pada PT. Radar Buton Baubau

Hardin

Pengaruh Fundamental Makro Ekonomi dan Risiko Sistematis Terhadap Kinerja Keuangan
Perusahaan manufaktur Di Bursa Efek Indonesia

Rasit

Pengaruh Risiko Kredit Terhadap Kinerja Keuangan Bank Pembangunan Daerah Di
Indonesia

Jumlan Yatomanto

Pengaruh Penerapan *Efilling* dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Pada KPP Pratama Baubau

Wa Ode Suwarni

Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin No. 124 Baubau

JURNAL ILMIAH EKONOMIKA DAN BISNIS

Pelindung

Dr. Sulhan Manaf., M.Si
Dekan Fakultas Ekonomi

Penanggung Jawab

Wa Ode Nur Ainun., S.E., M.Si

Pemimpin Redaksi

Said Saleh Salihi, SE., M.S.A., Ak., CA

REVIWER

DR. Ria Mardiana Y., S.E., M.Si
DR. Ana Mardiana., S.E., M.Si

Sekretaris

Rasit, SE., M.M

Penerbit

Fakultas Ekonomi
Universitas Dayanu Ikhsanuddin

Alamat Redaksi :

JL. Sultan Dayanu Ikhsanuddin
No.124 Baubau

Daftar Isi

	Halaman
Pengelola Redaksi	ii
Daftar Isi.....	iii
Kata Pengantar	iv
 Evaluasi Transaksi Murabahah Berdasrkan PSAK Syariah 102 pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau Oleh : Said Saleh Salihi	 1
 Analisis Sisitem Informasi Akuntansi Penggajian Karyawan Pada PT. Makesa Prima Motor Kota Baubau Oleh : Alfan Mulis dan Rafiuddin	 12
 Strategi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Serta Efektivitas Penerimaan nya di Pemerintah Kota Baubau 2014- - 2016 Oleh : Nurhayati dan Sulhan Manaf	 22
 Analisis Pencatatan Akuntansi Iuran dan Pensiun PT. Pos Indonesia (Persero) Kota Baubau. Oleh : Atmani dan R. Supalal	 30
 Analisis Pengendalian Internal Atas Siklus Pendapatan Jasa (Studi Kasus Pada Hotel Calista Beach Baubau) Oleh : Bima Sakti Herfinta	 39
 Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas, Rawat Inap dan Jalan Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Baubau Oleh : Litha Nurmitha	 48
 Analisis Profitabilitas Pada PT. Radar Buton Baubau Oleh : Ansar	 61
 Pengaruh Fundamental Makro Ekonomi dan Risiko Sisitematis Terhadap Kinerja Keungan Perusahaan manufaktur Di Bursa Efek indonesia Oleh : Hardin	 70
 Pengaruh Risiko Kredit Terhadap Kinerja Keuangan Bank Pembangunan Daerah Di Indonesia Oleh : Rasit	 78
 Pengaruh Penerapan <i>Efilling</i> dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Baubau Oleh : Jumlan Yatomanto	 83
 Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Oleh : Wa Ode Suwarni	 91

Kata Pengantar

Asslamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

JurnalEkonomika dan Bisnis (JIEB) sat ini menerbitkan Vulum 3, Nomor 1 Mei 2018 Penerbitan ini menampilkan 10 penulis dengan subtansi umum. Para penulis dari masing-masing dosen dan mahasiswa Fakultas ekonomi Unidayan, harapan kami, dengan adanya jurnal ilmiah tersebut, dapat memotivasi baik dosen dan mahasiswa di Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau mapun di luar lingkup Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau, dapat memanfaatkan media publikasi karya ilmiah tersebut.

Baubau , Mei 2018

Dekan

DR. Sulhan Manaf, M.Si
NIP. 19621231 198803 1 024

EVALUASI TRANSAKSI MURABAHAH BERDASARKAN PSAK SYARIAH 102 PADA PT. BANK MUAMALAT CABANG PEMBANTU BAUBAU

Said Saleh Salihi

(Dosen Fakultas Ekonomi Unidayan Baubau)

A B S T R A C K

This Research Aims To know the application of murabahah akad accounting at PT. Bank Muamalat Tbk. Branch Baubau Assistant and To know the practice of the application of murabahah agreement with PSAK no. 102 at PT Bank Muamalat Tbk Branch Baubau. This Research Approach using Qualitative Decriptive, Research Result PT. Bank Muamalat Tbk Branch Baubau has applied PSAK 102 for murabaha transactions. The application of SFAS 102 is divided into components where each component has been applied by PT. Bank Muamalat Tbk Branch Baubau, Accounting Treatment conducted on Financing PT. Bank Muamalat Branch Baubau referring to SAK 102 issued IAI. PT. Bank Muamalat Branch Baubau Branch has been in accordance with the PSAK in this accounting treatment, this is because the bank always update the information terklait changes and the development of the theory of the PSAK 102 which gide

Keywords: Keywords: Murabaha, PSAK 102

Evaluasi Transaksi Murabahah Berdasarkan PSAK Syariah 102 Pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau

PENDAHULUAN

Bank Muamalat Baubau merupakan lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum. Pada prinsip operasinya, Bank Muamalat selanjutnya disebut dengan (BMT) melandaskan pada prinsip-prinsip Syariah. Ada tiga prinsip yang dapat dilaksanakan oleh BMT, yakni dengan sistem bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), sistem jual beli (*bai' bitsaman ajil* dan *murabahah*), sistem non-profit (*qardul hasan*), sistem sewa (*ijarah*), dan juga sistem *fee* (jasa).

Sistem yang paling banyak digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah adalah sistem jual beli dengan menggunakan produk *murabahah*. Salah satu BMT yang memiliki produk *murabahah* adalah Bank Muamalat

Baubau. Bank Muamalat Baubau merupakan Bank Muamalat yang berada di kota Baubau.

Produk pembiayaan pada Bank Muamalat Baubau yang paling dominan adalah dengan sistem jual beli yaitu dengan produk *murabahah*. Hal ini dapat dibuktikan dengan data pembiayaan yang terdapat di Bank Muamalat Baubau, pembiayaan pada tahun 2013 mencapai 772 pembiayaan, tahun 2014 mencapai 919 pembiayaan, dan pada tahun 2015 mencapai 1.012 pembiayaan. Pembiayaan *murabahah* pada tahun 2013 mencapai 766 akad, tahun 2014 mencapai 909 akad, dan pada tahun 2015 mencapai 1.004 akad. Pembiayaan *ijarah* pada tahun 2013 hanya 6 akad tahun 2014 hanya 10 akad, dan

pada tahun 2015 hanya ada 8 pembiayaan. Pada tahun 2014 terdapat satu pembiayaan *mudharabah*.

Laporan keuangan yang berbasis PSAK Syariah sangat diperlukan untuk mempertanggungjawabkan hasil operasional BMT kepada para *stakeholder*. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah suatu buku petunjuk dari prosedur akuntansi yang berisi peraturan tentang perlakuan, pencatatan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Standar Akuntansi Keuangan Syariah merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi yang digunakan oleh badan usaha yang memiliki transaksi Syariah atau berbasis Syariah. Standar ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Standar ini terdiri dari kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan keuangan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi Syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, dan *ijarah*. Pada tahun 2003, PSAK tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang bernomor 59 mulai diberlakukan. PSAK 59 direvisi dan disahkan pada tahun 2007 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, dan mulai diperlakukan pada tahun buku 2008. PSAK Syariah yang

sudah diterbitkan adalah PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah*, PSAK 103 tentang Akuntansi *Salam*, PSAK 104 tentang Akuntansi *Istishna*, PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*, PSAK 106 tentang Akuntansi *Musyarakah*, PSAK 107 tentang Akuntansi *Ijarah*, PSAK 108 tentang Akuntansi Asuransi Syariah, dan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shadaqah.⁷ Akuntansi Syariah memiliki prinsip-prinsip yang melekat, yaitu prinsip pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran.

Murabahah menurut PSAK 102 adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan yang ditambah keuntungan atau margin yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102). Dari definisi *murabahah* menurut PSAK tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak Bank Muamalat harus menyediakan barang sebagai objek jual beli dan menjual objek tersebut dengan menyebutkan harga perolehan barang ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jika Bank Muamalat tidak memiliki aset *murabahah* untuk dijual, maka Bank Muamalat harus membuat akad tambahan, yaitu berupa akad *wakalah*, dan mewakilkan pembelian barang tersebut kepada nasabah atau pihak lain

METODELOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi objek dari penelitian adalah Pada Bank Muamalat cabang Baubau, Jl. Yosudarso, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau.

B. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, Wawancara, Observasi, Teknik dokumentasi, yaitu teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data

yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada ditempat penelitian ataupun yang berada diluar tempat penelitian tersebut.

C. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Bank Muamalat cabang Baubau, Jl. Yosudarso, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau. sampel dalam penelitian ini adalah karyawan/pegawai yang bekerja di bidang keuangan pada Bank Muamalat cabang

Baubau, Jl. Yosudarso, Kelurahan Wale-Kecamatan Wolio, Kota Baubau.

D. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari lokasi baik data primer maupun data sekunder, akan disusun dan disajikan serta dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif berupa pemaparan yang kemudian dianalisis dan dinarasikan sesuai dengan mekanisme penulisan skripsi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Pelaksanaan Transaksi Murabahah PT. Bank Muamalat Indoensia, Tbk Cabang Pembantu Baubau

Langkah-langkah yang ditempuh oleh calon nasabah untuk memperoleh persetujuan Transaksi *murabahah* adalah sebagai berikut:

- a. *Financing* melakukan *interfiuw* dengan calon nasabah untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan nasabah dan untuk memperoleh gambaran umum mengenai kemampuan keuangan calon nasabah dan mengisi formulir permohonan pembiayaan.
- b. Calon nasabah mengajukan proposal *murabahah* yang dibuat langsung oleh calon nasabah disertakan dengan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai syarat permohonan pembiayaan kepada bagian *financing*.
- c. Proposal yang disampaikan calon nasabah diperiksa/dinilai oleh *financing*. Dalam penilaian layak tidaknya suatu pembiayaan disalurkan maka dilakukan penilaian layak tidaknya suatu pembiayaan disalurkan maka dilakukan penilaian pembiayaan. Penilaian kelayakan dilakukan dengan metode analisa 5 C yang meliputi (karakter), capacity (kapasitas/kemampuan), capital (modal), condition, (kondisi), controral (jaminan).

- d. Untuk permohonan pembiayaan yang disetujui, *financing* memberikan formulir fasilitas pembiayaan *murabahah* kepada nasabah, kemudian dokumen asli jaminan dan diserahkan kepada administrasi pembiayaan untuk dilakukan pengecekan atas kebenaran dokumen jaminan tersebut, kemudian bagian administrasi pembiayaan akan mengeluarkan suat tanda terima jaminan rangkap dua yang akan ditanda tangani oleh pemimpin cabang dan *financing* serta nasabah. Nasabah kemudian diminta untuk membuat secara tertulis permohonan pencairan fasilitas pembiayaan disertai dengan syarat-syarat yang dipenuhi sesuai yang tercantum dalam SP3/akad pembiayaan.
- e. Kemudian tahap penutupan, dalam melakukan penutupan pembiayaan *murabahah* nasabah haruslah mengembalikan pembiayaan yang disepakati, kemudian *financing* melakukan pemeriksaan melalui data yang ada pada computer untuk melihat kebenarannya, apakah nasabah telah benar-benar mengembalikan pembiayaan, jika benar telah mengembalikan seluruh pembiayaan, maka diberitahukan kepada bagian administrasi pembiayaan untuk membuat tanda terima pengeluaran jaminan administrasi pembiayaan rangkap dua sebagai bukti atas pelunasan untuk dilakukan pelepasan jaminan. *Financing* menerima dokumen jaminan dan menyerahkan kepada nasabah dan nasabah menandatangani tanda terima dokumen dengan rangkap dua, rangkap pertama diserahkan kepada bagian administrasi pembiayaan dan rangkap kedua ke nasabah.

2. Pengakuan dan Pengukuran

Hal ini dapat ditunjukkan dengan hasil wawancara antara peneliti dengan karyawan Kurniawan Riski Saputra tanggal 20 Oktober 2017 bank muamalat cabang pembantu baubau. Sebagai berikut :

“Pembiayaan *murabahah* ini memberikan dalam bentuk uang bukan dalam bentuk barang misalnya kan pemebilan semen atau apa, jadi mestinya ya selama ini memang ini seharusnya mekanismenya itu di ikutsertakan sebelumnya. Jadi pada prakteknya yang sebenarnya konsep yang disampaikan itu adalah ketika misalnya bangunan, bangunan ini 30% itu atau hampir selesai itu ada semacam aaa pertanggungjawaban katakanlah seperti itu. Berapa anggaran yang habis. Hanya selama ini yang ril, jujur ya saya hanya menerima uang dengan melihat bangunan yang saya bangun dan tentu yang dilihat itu dari sisi fisik kemudian dari sisi layak IMB itu segala macam yang diminta. Jadi hanya mereka meminta secara fisik apa nama pengguna anggaran yang saya terima”

Hal ini juga didukung dengan pernyataan karyawan Accounting 20 Oktober 2017 Ria,, melalui media social *handpone* via sms :

“Ketika melakukan pembiayaan *murabahah* di Bank muamalat cabang pembantu baubau akadnya itu akad *murabahah* atau waklah ? jawabannya adalah Keduanya”

Pada saat pencairan pembiayaan *murabahah*, pihak PT Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau menjurnalnya sebagai berikut :

Piutang Nasabah	Rp. xxx
<i>Murabahah</i>	Rp. Xxx
Nasabah	Rp. xxx
Margin yang ditanggihkan	Rp. Xxx

Terkait dengan diskon *murabahah*, pihak PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau pun tidak melakukan pencatatan terkait dengan diskon :

“ jadi begini, misalnya dia jula Rp 100.000, _ dia kasih diskon 20%. 10% jadi Rp

10.000. Rp 90.000, itu seharusnya orang bayar hanya Rp 90.000,

Selanjutnya Selanjutnya dalam hal pengakuan keuntungan *murabahah* pihak PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau belum mengakui adanya keuntungan *murabahah*. hal ini bisa terekam dalam hasil wawancara Kurniawan Riski Saputra tanggal 20 Oktober 2017 sebagai berikut :

“pengakuan keuantungan *murabahah* biasanya ada keuntungan *murabahah* yang disebut margin yang tadninya di posisi kredit, dia didebet”

Akuntansi untuk pembeli akhir di PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau dalam hal ini terkait dengan hutang yang timbul dari transaksi *murabahah* tangguh, diakui oleh bank sebagai margin yang ditanggihkan. Hal ini dapat dilihat pada hasil wawancara Kurniawan Riski Saputra tanggal 20 Oktober 2017 berikut ini :

“hutang yang timbul dari Tranaksi *murabahah* tangguh diakui pada saat pencairan jurnalnya itu Cuma satu, pada saat pencairan”.

3. Penyajian

Hal ini dapat dilihat pada hasil wawancara Kurniawan Riski Saputra tanggal 20 Oktober 2017 berikut ini berikut:

”penyajian Piutang *murabahah*, Apakah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang, penyajian Penyisihan kerugian piutang ada. Tapi itu disisipkan di biaya, misalnya biaya 1 % dari plafon dari pencairan jadi penyisihan kerugian piutang itu 1 %. Jadi pada saat laporan keuangan itu dibentuk perusahaan yang sebenarnya diambil dari biaya administrasi diawal”

4. Pengungkapan

Berdasarkan hasil wawancara, maka dalam hal pengungkapan ini PT. Bank Muamalat Cabang pembantu Baubau ini mengungkapkan biaya-biaya yang terkait dengan proses pengajuan *murabahah* yakni biaya administrasi 1 % dari plafon dan biaya meterai, pajak. Namun biaya administrasi, biaya meterai dan pajak tersebut bukan bagian dari pendapatan pihak bank, melainkan ada pihak lain yang berwenang yang mengurus itu

PEMBAHASAN

1. Penagkuan dan Pengukuran

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada bagian dengan karyawan dan Administration (sampai bulan September) di PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau, pada saat perolehan, aset *murabahah* tidak diakui sebagai persediaan. Dalam hal penjurnalan PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau hanya menjurnal sekali yakni pada saat pencairan dengan jurnal:

Piutang Nasabah	Rp. xxx
<i>Murabahah</i>	Rp.
xxx	
Nasabah	Rp. xxx
ditangguhkan	Rp.
Xxx	

Hal ini membuktikan bahwa penerapan PSAK 102 untuk *murabahah* di PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau Sudah Menerapkan sepenuhnya PSAK 102 ini maka jurnal yang dikenal ada banyak dan bukan jurnal pada saat pencairan. Seperti pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan maka jurnalnya akan menjadi :

Aset <i>Murabahah</i>	Rp. xxx
-----------------------	---------

Kas

Rp. xxx

Selanjutnya terkait dengan *murabahah* pesanan mengikat, pihak PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau menganggapnya itu sebuah produk lain selain *murabahah* yakni ijarah. Padahal *murabahah* berbeda dengan ijarah. Ijarah adalah sewa, dan *murabahah* adalah jual beli.

2. Penyajian

Hal penyajian piutang *murabahah* seharusnya disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Namun PT. Bank Muamalat Cabang pembantu Baubau tidak mengenal yang namanya penyisihan kerugian piutang tapi hal itu disisipkan pada akun biaya. Selanjutnya untuk margin *murabahah* sudah sesuai dengan PSAK 102. Dimana dalam paragraf 38 PSAK 102, menyatakan bahwa margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*. Namun untuk beban *murabahah* ini PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau Sudah Menerapkannya menerapkannya.

3. Pengungkapan

Berdasarkan hasil wawancara, maka dalam hal pengungkapan ini PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau ini sudah sesuai dengan PSAK 102. Hal ini dibuktikan dengan wawancara peneliti dengan *Loan Administration*, Dimana pihak bank mengungkapkan biaya-biaya yang terkait dengan proses pengajuan *murabahah* yakni biaya administrasi 1 % dari plafon dan biaya meterai, pajak. Namun biaya administrasi, biaya meterai dan pajak tersebut bukan bagian dari pendapatan pihak bank, melainkan ada pihak lain yang berwenang yang mengurus itu.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai bahan masukan dan pertimbangan yang bermanfaat bagi PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Pembantu Baubau terkait dengan transaksi pembiayaan *Murabahah* sebagai berikut :

1. PT. Bank Muamalat Tbk. Cabang Pembantu Baubau dalam penerepan Pembiayaan *murabahah* yang mengajukan pembiayaan langsung melalui perusahaan, sehingga nasabah mengetahui dengan jelas sumber dana yang didapat untuk membiayai pembiayaan yang diajukan dan membuka nasabah atas penerapan produk syariah yang beragam
2. Memberi jangka waktu penangguhan atau peringanan kepada nasabah dengan persyaratan tertentu seperti bangrut atau masalah keuangan yang lalu dianalisa oleh pihak PT Bank Muamalat Tbk, cabang pembantu Baubau .
3. Diharapkan PT Bank Muamalat Tbk, cabang pembantu Baubau agar menyajikan laporan keuangan secara khusus terkait *murabahah*.

Daftar Pustaka

- Ali Murtadho, *et. al*, *Menuju Lembaga Keuangan yang Islami dan Dinamis*, Semarang: Rafi Saana Perkasa, 2012, h. 62
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja-wali Pers, 2011, h. 321
- Dwi Hasmita dan Hotma Ja'far, *Analisa Penerapan Dan Perlakuan Akuntansi Murabahah Untuk Pembiayaan Konsumtif Studi Kasus Pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan*, Jurnal Ekonomi, Vol. 15, No. 2. 2012, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara .
- Dian Anggraini Kartika Sari, *Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang Murabahah Pt Bri Syariah Cabang Sidoarjo*, Jurnal Universitas Negeri Surabaya. <http://ejournal.unesa.ac.id/article/8917/57/article.pdf> di akses pada tanggal 7 Maret 2016.
- Etta Mamang Sangadji, dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010, h. 171
- Hasil pra riset wawancara dengan bagian pembiayaan pada hari Kamis tanggal 26 November 2015
- Ita Yuliana Setia Ningsih, *Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 pada BMT Al-Fath*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Muamalah Konsentrasi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, h. 85
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, h. 162
- Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta: Akademia Pertama, 2012, h. 141
- Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta: Akademia Pertama, 2012, h. 2
- Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, h. 103
- Novan Bastian Dwi Ardha dan Aulia Fuad Rahman, *Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang kota Malang*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya

- <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1058> di akses pada tanggal 20 Oktober 2015.
- Novan Bastian Dwi Ardha dan Aulia Fuad Rahman, *Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang kota Malang*, Jurnal Ilmiah
- Sofyan Safri Harahap, *et al*, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti, 2010, h. 42
- Sri Luayyi, *Evaluasi Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Psak 102 Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ar Rahmah Kabupaten Kediri*, Jurnal Cendekia Akuntansi, Vol. 3 No. 1 2015
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, h. 21
- Wiroso, *Produk Perbankan Syariah Dilengkapi UU Perbankan Syariah dan Kodifikasi Produk Bank Indonesia*, Cet. Pertama, Jakarta: LPFE Usakti, 2009, h. 512
- Yusuf Soewardji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Media Wacana Media, 2012, h.51-42
- Yusuf Soewardji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Media Wacana Media, 2012, h. 160
- Zulia Hanum, *Analisis Penerapan Transaksi Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Gebu Prima Medan*, Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan, Vol. 14 No. 01 1014

ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN KARYAWAN PADA PT. MAKESA PRIMA MOTOR KOTA BAUBAU

Al,fan Muklis

(Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unidayan Baubau)

Rafiuddin

(Dosen Fakultas Ekonomi Unidaya Buabau)

A B S T R A C K

PT. Makesa Prima Motor Kota Baubau is a private company engaged in services and trade. The research objective is to know the employee payroll accounting information system that has been implemented by PT. Makesa Prima Motor City of Baubau. The method used is descriptive method. Data analysis starts related functions are administration and general, time recording, payroll making, accounting and finance. Documents used are supporting documents on salary changes, attendance records, attendance cards, payroll, salary slips, salary statements, proof of cash out and receipts (proof of transfer). The accounting records used are daily cash statements, general journals, ledgers, ledgers.

Research shows the payroll accounting system applied is not yet fully effective because it is not fully in accordance with the theory. The payment of salaries made by the company through bank transfer. And to carry out company activities, it is necessary to have a strict separation of duties.

Keywords: Employee Payroll Accounting Information System

Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Karyawan Pada PT. Makesa Prima Motor Kota Baubau

PENDAHULUA

Salah satu informasi yang paling krusial bagi perusahaan adalah informasi akuntansi. Terlebih bagi perusahaan yang memiliki kompleksitas yang tinggi. Informasi akuntansi terkait dengan aspek finansial. Hal ini terkait posisi keuangan, kinerja, maupun perubahan posisi keuangan yang tentunya menjadi suatu pertimbangan bagi pemakai laporan keuangan atau pihak berkepentingan lainnya. Informasi akuntansi dibutuhkan tergantung jenis keputusan yang dibutuhkan, baik bagi pihak internal maupun eksternal. Kualitas informasi akuntansi sangat berpengaruh terhadap keputusan dan kebijakan yang akan diterapkan. Ketika

misalnya informasi akuntansi tidak akurat, akan memungkinkan terganggunya aktivitas perusahaan bahkan mengancam eksistensi perusahaan. Oleh karena itu, penerapan sistem informasi akuntansi menjadi suatu hal yang penting untuk diterapkan dalam aktivitas perusahaan.

Sistem informai akuntansi adalah sistem yang berfungsi dalam menghasilkan dan menyediakan informasi akuntansi yang akurat bagi perusahaan. Peranan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap penyajian informasi guna dapat memudahkan perusahaan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dikatakan sistem informasi

akuntansi dalam perusahaan penting, sebab sistem informasi akuntansi dalam perusahaan bertujuan melaporkan informasi akuntansi kepada perusahaan.

Penggajian merupakan bagian yang harus diperhatikan, karena karyawan sangat sensitif terhadap kesalahan yang akan merugikan perusahaan maupun karyawan. Penerapan sistem informasi akuntansi penggajian perlu untuk dipahami, oleh karena itu perlu diketahui bahwa sistem informasi akuntansi penggajian itu sendiri merupakan salah satu komponen yang ada dalam perusahaan yang berfungsi untuk mencapai tujuan.

PT. Makes Prima Motor Kota Baubau merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa. PT. Makes Prima Motor Kota Baubau merupakan distribusi dan tempat penjualan resmi motor merk Honda. Selain dari itu PT. Makes Prima Motor juga memiliki bengkel yang pelayanannya khusus motor merk Honda.

Namun dalam pelaksanaan kegiatannya, manajemen PT. Makes Prima Motor Baubau sering mengalami keterlambatan pembayaran gaji kepada para karyawan ini disebabkan karena tidak adanya pemisahan antara bagian pencatatan waktu dan bagian pembuatan daftar gaji sehingga akan mengakibatkan penumpukkan tanggung jawab di satu bagian dan proses pencairan gaji untuk karyawan yang mengalami keterlambatan. Maka dari itu diperlukan pemisahan tugas. Agar memudahkan perusahaan dalam mengecek atas pekerjaan seorang karyawan yang diberi tanggung jawab dalam hubungannya terhadap sistem akuntansi penggajian.

Di dalam perusahaan sebaiknya mempunyai sistem penggajian yang baik. Pemberian gaji terhadap karyawan seharusnya mendapat perhatian utama dari manager, karena dengan gaji yang cukup dan memadai akan membawa pengaruh positif terhadap semangat kerja karyawan. Karena apabila perusahaan tersebut tidak memiliki suatu sistem penggajian yang baik akan menyebabkan terjadinya penyelewengan atau

penyimpangan di dalam melaksanakan tanggung jawab masing-masing.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem informasi akuntansi penggajian karyawan yang telah diterapkan pada PT. Makes Prima Motor Kota Baubau.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, di antaranya :

- 1) Bagi perusahaan, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat atau sebagai bahan pertimbangan bagi pihak PT. Makes Prima Motor Kota Baubau dalam kaitannya dengan sistem informasi akuntansi penggajian karyawan.
- 2) Bagi penulis, diharapkan dapat menambah pengetahuan yang lebih luas dan dapat memberikan gambaran untuk penelitian selanjutnya mengenai sistem akuntansi penggajian karyawan.
- 3) Bagi pihak lain, penulis berharap dengan adanya penulisan ini dapat menjadi bahan materi dan sumber informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

TINJAUAN TEORI

1. Sistem

Setiap sistem terdiri dari struktur dan proses. Struktur sistem merupakan unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut, sedangkan proses sistem menjelaskan cara kerja setiap unsur sistem tersebut dalam mencapai tujuan sistem. Sistem merupakan program yang sangat diperlukan dalam suatu unit usaha agar tujuan dapat dicapai dengan melakukan kegiatan bersama-sama oleh berbagai unsur. Jogiyanto (2005:5) Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau sub sistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Anthony dan Govindarajan (2005:7) mengemukakan sistem merupakan suatu cara tertentu dan bersifat repetitif untuk melakukan suatu atau kelompok aktivitas.

Bodnar dan Hopwood (2006:3) mengatakan bahwa sistem merupakan sekumpulan sumber daya yang saling terkait untuk mencapai tujuan. Sutarman (2009:5), Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi dalam suatu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama.

2. Sistem Informasi

Budi Sutedjo (2006:36), sistem informasi adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain untuk membentuk suatu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informasi tersebut.

Mulyadi (2008:11), sistem informasi adalah salah satu sistem informasi yang digunakan manajemen untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Jogianto (2005:11), sistem informasi adalah suatu sistem didalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategis dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

3. Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi sebagai kumpulan kegiatan-kegiatan dari organisasi yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi keuangan dan informasi yang didapatkan dari transaksi data untuk tujuan pelaporan internal maupun eksternal perusahaan. Azhar Susanto (2008:27), sistem informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan (integrasi) dari sub sistem/komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan.

Mulyadi (2008:18), mengatakan sistem informasi akuntansi adalah untuk menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan

usaha, memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada sebelumnya, memperbaiki pengendalian akuntansi dan juga pengecekan internal serta membantu memelihara catatan akuntansi. Jogiyanto (2005:227) mengatakan sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi yang merubah data transaksi bisnis menjadi informasi keuangan yang berguna bagi pemiliknya. James A. Hall (2011:7), sistem informasi akuntansi adalah suatu subsistem yang memproses transaksi keuangan dan non-keuangan yang berpengaruh secara langsung terhadap pemrosesan transaksi keuangan.

4. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Dalam memenuhi kebutuhan informasi baik untuk kebutuhan pihak eksternal maupun pihak internal, sistem informasi harus didesain sedemikian rupa sehingga memenuhi tujuannya yang dapat memberikan pedoman kepada manajemen dalam melakukan tugasnya sehingga dapat menghasilkan informasi-informasi yang berguna, terutama dalam menunjang perencanaan dan pengendalian.

5. Unsur - Unsur Sistem Informasi Akuntansi

Mulyadi (2008:3) mengungkapkan unsur - unsur sistem akuntansi sebagai berikut :

- 1) Formulir. Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir sering pula disebut dengan media untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam organisasi ke dalam catatan. Dengan formulir ini, data yang bersangkutan dengan transaksi direkam pertama kalinya sebagai dasar pencatatan dalam catatan. Jurnal. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, meringkas data keuangan dan data lainnya. Seperti telah disebutkan di atas, sumber informasi pencatatan dalam jurnal
- 2) ini adalah formulir. Dalam jurnal ini data keuangan untuk pertama kalinya diklasifikasikan menurut penggolongan yang sesuai dengan informasi yang akan

disajikan dalam laporan keuangan. Dalam jurnal ini pula terdapat kegiatan peringkasan data, yang hasil peringkasan berupa (jumlah rupiah transaksi tertentu) kemudian di posting ke rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Contoh jurnal adalah jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas dan jurnal umum.

- 3) Buku besar. Buku besar terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Rekening-rekening dalam buku besar ini disediakan sesuai dengan unsur-unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan.

6. Kompensasi

Kompensasi bagi perusahaan berarti penghargaan atau ganjaran pada para pekerja yang telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan tujuannya, melalui kegiatan yang disebut bekerja. Mangkuprawira (2004 : 196), kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai penukar dari kontribusi jasa mereka pada perusahaan.

Yani (2012:139) Kompensasi adalah bentuk pembayaran dalam bentuk manfaat dan insentif untuk memotivasi karyawan agar produktivitas kerja semakin meningkat. Sedarmayanti (2009:23), kompensasi adalah segala sesuatu yang di terima oleh karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Wibowo (2007:461) kompensasi adalah kontra prestasi terhadap penggunaan tenaga atau jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja.

7. Sistem Akuntansi Penggajian

Mardi (2011:107), sistem informasi akuntansi penggajian adalah salah satu aplikasi pada sistem informasi akuntansi yang terus mengalami proses dalam bentuk bertahap karena daftar gaji dibayarkan atau dibuat secara periodik (tiap minggu atau bulanan) demikian juga pembayaran gaji seba-

gian besar pegawai dibayarkan secara bersamaan. Mulyadi (2008:373) sistem akuntansi penggajian adalah sistem penggajian bagi karyawan yang di bayarkan tetap setiap bulannya.

8. Fungsi dalam Sistem Akuntansi

Penggajian

Dalam sistem akuntansi gaji perusahaan terdapat beberapa fungsi yang terkait dalam pencatatan dan pemberian gaji karyawan. Fungsi tersebut saling bekerja sama dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya untuk tujuan tertentu (Mulyadi, 2008:382) adalah sebagai berikut :

- 1) Fungsi kepegawaian. Bagian ini bertanggungjawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji, mutasi karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, memberhentikan karyawan dan memonitoring status-status dalam penggajian.
- 2) Fungsi pencatat waktu. Bagian ini bertanggungjawab untuk menyelenggarakan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan atau instansi, sistem pengendalian intern yang baik mensyaratkan fungsi pencatatan waktu hadir karyawan tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi atau oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah.
- 3) Fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Bagian ini bertanggungjawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji. Daftar gaji diserahkan oleh pembuat daftar gaji kepada fungsi akuntansi guna pembuatan bukti kas keluar yang dipakai sebagai dasar untuk pembayaran gaji kepada karyawan.
- 4) Fungsi akuntansi. Bagian akuntansi bertanggungjawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam

hubungannya dengan pembayaran gaji karyawan.

9. Dokumen dalam Sistem Akuntansi

Penggajian

Dokumen atau formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam organisasi ke dalam catatan. Dokumen sangat penting dalam akuntansi sebab untuk mencatat dan menghitung gaji karyawan menggunakan bukti-bukti yang terdapat pada dokumen.

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian (Mulyadi, 2008:374) sebagai berikut :

- 1) Dokumen pendukung perubahan gaji. Dokumen-dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti misalnya surat keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, perubahan tarif upah, penurunan pangkat, pemberhentian sementara dari pekerjaan (skorsing), pemindahan dan lain sebagainya.
- 2) Kartu jam hadir. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Catatan jam hadir karyawan ini dapat berupa daftar biasa, dapat pula berbentuk kartu hadir yang diisi dengan mesin pencatat waktu.
- 3) Kartu jam kerja. Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi oleh tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tertentu. Dokumen ini diisi oleh mandor pabrik dan diserahkan ke fungsi pembuat daftar gaji untuk kemudian dibandingkan dengan kartu jam hadir, sebelum digunakan untuk distribusi biaya upah langsung kepada setiap jenis produk atau pesanan.
- 4) Daftar gaji. Dokumen ini berisi jumlah gaji bruto setiap karyawan, dikurangi potongan-potongan berupa PPh Pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan lain sebagainya.

- 5) Rekap daftar gaji. Dokumen ini merupakan ringkasan gaji per-departemen, yang dibuat berdasarkan daftar gaji.

10. Catatan Akuntansi dalam Sistem Akuntansi Penggajian

Akuntansi mempunyai fungsi dan peranan bersifat keuangan yang sangat penting dalam kegiatan perusahaan dan kepada pihak-pihak tertentu yang memerlukannya.

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian (Mulyadi, 2008:382) sebagai berikut :

- 1) Jurnal umum. Dalam pencatatan gaji dan upah ini jurnal umum digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen dalam perusahaan.
- 2) Kartu harga pokok produk. Catatan ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu.
- 3) Kartu biaya. Catatan ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja nonproduksi setiap departemen dalam perusahaan.

11. Prosedur dalam Sistem Akuntansi Penggajian

Prosedur yang membentuk sistem penggajian (Mulyadi, 2008:385) sebagai berikut :

- 1) Prosedur pencatatan waktu hadir. Pencatatan waktu hadir digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Catatan jam hadir karyawan ini dapat berupa daftar hadir biasa dapat pula dibentuk kartu hadir yang diisi dengan mesin pencatatan waktu.
- 2) Prosedur pembuatan daftar gaji. Dalam hal ini data yang dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji dan upah adalah surat-surat keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, pemberhentian karyawan, penurunan pangkat, daftar gaji dan upah bulan sebelumnya dan daftar hadir. Apakah gaji

dan upah karyawan melebihi penghasilan tidak kena pajak, maka gaji dan upah tersebut dan dipotong dengan PPh Pasal 21.

- 3) Prosedur distribusi biaya gaji. Dalam prosedur ini, distribusi biaya gaji serta biaya tenaga kerja didistribusikan kepada departemen yang menikmati manfaat tenaga kerja.

12. Bagan Alir Sistem Akuntansi Penggajian

- 1) Prosedur pencatatan waktu hadir. Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. Pencatatan waktu hadir dapat menggunakan daftar hadir biasa yang karyawan harus menandatangani setiap hadir dan pulang dari perusahaan. Pencatatan kartu jam hadir ini diselenggarakan untuk menentukan gaji karyawan.
- 2) Prosedur pencatatan waktu kerja. Dalam perusahaan biasanya karyawan bekerja 8 jam dalam satu hari kerja, jumlah jam hadir tersebut dirinci menjadi waktu kerja dalam tiap hari. Dengan demikian waktu kerja ini dipakai sebagai dasar pembebanan biaya tenaga kerja.
- 3) Prosedur pembuatan daftar gaji karyawan. Dalam prosedur ini, fungsi pembuat daftar gaji membuat daftar gaji karyawan. Data yang dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji adalah surat-surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat dan lain-lain.
- 4) Prosedur distribusi biaya gaji dan upah. Dalam prosedur biaya daftar gaji biaya tenaga kerja didistribusikan kepada departemen yang menikmati manfaat tenaga kerja. Distribusi biaya tenaga kerja ini dimaksudkan untuk pengendalian biaya dan perhitungan gaji karyawan.

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada perusahaan PT. Makes Prima Motor Kota

Baubau yang beralamat di Jalan Bataraguru No. 64 Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Telp. (0402) 2822870 Kota Baubau.

2. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan manager dan karyawan pada PT. Makes Prima Motor yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 2) Kuesioner adalah metode yang memberikan beberapa pertanyaan kepada karyawan PT. Makes Prima Motor Baubau yang berkaitan dengan objek penelitian.
- 3) Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data perusahaan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknis Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Adapun analisis deskriptif dalam penelitian ini yaitu untuk melihat melihat sistem informasi akuntansi penggajian karyawan yang disertai kuesioner.

- 1) Pertanyaan kuesioner menggunakan skala guttman yang dirancang untuk mendapatkan jawaban tegas yaitu “ya” atau “tidak”, dengan jawaban “ya” mempunyai nilai (1) yang berarti baik dan jawaban “tidak” mempunyai bobot nilai nol (0) yang berarti terdapat kelemahan terkait sistem akuntansi penggajian.
- 2) Memberikan interpretasi atau pemilihan akhir mengenai sistem informasi akuntansi penggajian karyawan menggunakan rumus perhitungan menurut Sudjana (2001:129).

$$\frac{\text{Jumlah jawaban ya}}{\text{Jawaban kuesioner}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan di atas baik tidaknya sistem informasi akuntansi penggajian didasarkan pada kategori presentase berikut ini :

$$76\% - 100\% = \text{baik}$$

56% - 75% = cukup baik
 40% - 55% = kurang baik
 Dibawah 40% = tidak baik

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Sistem akuntansi penggajian

Hasil penelitian menjelaskan mengenai sistem akuntansi penggajian pada PT. Makesa Prima Motor Kota Baubau yang mengacu pada tiga bagian yaitu bagian pencatat waktu, bagian gaji, dan bagian keuangan. Secara keseluruhan hasil presentase dari ke tiga bagian tersebut dapat di gambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6.6. Rekapitulasi Sistem Penggajian

No	Indikator	Presentase (%)
1	Bagian pencatat waktu	100
2	Bagian gaji	100
3	Bagian keuangan	66,6
	Jumlah	266,6
	Rata-rata	88,8

Sumber : Data primer diolah, 2016

Pada hakekatnya, sistem penggajian yang terdapat pada PT. Makesa Prima Motor Baubau sudah menunjukkan baik. Dikarenakan menurut (Sudjana, 2001:129) kategori baik yang diberikan pada perusahaan sudah menunjukkan nilai presentasi 88,8%, dimana hasil rekapitulasi sudah diatas rata – rata. Hal ini dapat dilihat melalui penjelasan pada bagian pencatat waktu, bagian gaji dan bagian keuangan :

a) Bagian pencatat waktu

Pada tabel hasil rekapitulasi sistem penggajian dalam bagian pencatat waktu yang digunakan pada PT. Makesa Prima Motor Kota Baubau menunjukkan hasil 100% yang dinilai sudah baik. Kategori baik diberikan

pada bagian pencatat waktu karena adanya pencatatan jam hadir dan penggunaan kartu jam hadir untuk karyawan. Dalam hal ini misalnya seorang karyawan yang bekerja selama 8 jam dalam sehari akan dicatat jam hadirnya dalam kartu jam hadir, pencatatan jam hadir dalam kartu jam hadir di sesuaikan berdasarkan berapa jam karyawan bekerja dalam sehari dari masuk, istirahat, hingga masuk kembali dan pulang.

b) Bagian gaji

Hasil penelitian pada tabel hasil rekapitulasi mengenai bagian gaji yang diterapkan perusahaan adalah baik yang menunjukkan hasil presentase 100%. Karena adanya pembuatan daftar gaji atau rekap daftar gaji untuk masing – masing karyawan yang secara lebih rinci yang berdasarkan pencatat waktu seperti daftar hadir dan kartu jam hadir. Setelah membuat daftar gaji atau rekap daftar gaji secara keseluruhan adanya penggunaan slip gaji untuk semua karyawan yang berisi gaji pokok, tunjangan seperti tunjangan jabatan dan lembur dan potongan seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dan apabila ada karyawan yang tidak hadir akan mendapatkan potongan juga. Dalam pembayaran gaji adanya bukti atau nota yang telah disetujui oleh direktur. Dan pada pembayaran gaji ada pembuatan surat pernyataan gaji atas gaji yang telah diterima. Daftar gaji yang telah dibuat akan disetorkan kepada bagian keuangan untuk ditindaklanjuti.

c) Bagian keuangan

Hasil penelitian pada tabel rekapitulasi mengenai bagian keuangan berada dibawah kategori baik yang berarti dinilai cukup baik dengan presentase 66,6%. Dilihat dari dokumen yang digunakan perusahaan bahwa amplop gaji tidak digunakan, karena dalam proses pembayaran gaji melalui Bank Panin yang langsung ditransfer ke rekening masing – masing karyawan yang dikerjakan oleh bagian bendahara. Adanya pembayaran melalui Bank Panin dikarenakan nota yang telah ditandatangani oleh direktur selaku pemegang kekuasaan di perusahaan. Untuk karyawan tidak dituntut untuk menandatangani atas

kartu penghasilan karyawan atau gaji, dikarenakan pembayaran gaji langsung ke Bank Panin. Kartu penghasilan karyawan atau slip gaji hanya melihat potongan atau tunjangan yang didapat atas masing-masing karyawan. Dan untuk pembayaran gaji tersebut dalam catatan akuntansinya menggunakan jurnal umum dan kartu biaya (buku besar) yang ditugaskan bagian akuntansi.

Dari ke tiga indikator tersebut dapat dideskripsikan bahwa responden memberikan persepsi secara baik dalam menjawab pertanyaan pada masing – masing indikator untuk melihat sistem penggajian pada PT. Makesa Prima Motor Kota Baubau.

2) Fungsi yang terkait

Fungsi - fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian pada PT. Makesa Prima Motor Kota Baubau adalah

- a) Fungsi administrasi dan umum. Fungsi ini bertanggung jawab untuk penerimaan karyawan dan mencari karyawan yang dilakukan melalui seleksi dan penempatan karyawan baru serta melengkapi kewajiban dan hak-hak wajib pajak.
- b) Fungsi pencatatan waktu dan fungsi pembuat daftar gaji. Fungsi pencatat waktu hadir ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pencatatan waktu hadir bagi semua karyawan serta jam izin karyawan, keterlambatan karyawan. Dan fungsi pembuat daftar gaji bertanggung jawab menghitung penghasilan bagi semua karyawan perusahaan yang berisi gaji pokok, tunjangan dan potongan yang akan diberikan kepada karyawan. Kedua fungsi ini termasuk dalam tanggung jawab bagian administrasi dan umum, yang seharusnya fungsi pencatat waktu dan fungsi pembuat daftar gaji harus terpisah dalam perusahaan. Namun dalam PT. Makesa Prima Motor Baubau fungsi tersebut tidak dipisahkan.
- c) Fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi bertugas untuk mencatat transaksi pembayaran gaji karyawan dan hal - hal

yang berhubungan dengan pengeluaran dan penerimaan, dan fungsi akuntansi juga melakukan pencatatan jurnal umum untuk dimasukkan ke dalam biaya gaji.

- d) Fungsi keuangan. Fungsi keuangan bertugas mengatur pengeluaran untuk pembayaran gaji karyawan dalam pembuktian kas keluar dan menyiapkan cek untuk mencairkan pembayaran gaji untuk ditransfer ke rekening - rekening karyawan melalui Bank Panin yang telah ditandatangani direktur perusahaan.

Jika dilihat (Mulyadi, 2008:382), maka fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian pada PT. Makesa Prima Motor Kota Baubau sama dengan teori, yang memiliki fungsi administrasi dan umum, fungsi pencatat waktu, fungsi pembuat daftar gaji, fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. Namun dalam fungsi pencatat waktu dan fungsi pembuat daftar gaji terjadi rangkap jabatan yang dilakukan oleh satu orang tidak adanya pemisahan fungsi yang dibawah oleh bagian administrasi dan umum.

3) Dokumen yang digunakan

Dokumen yang digunakan dalam PT. Makesa Prima Motor Kota Baubau antara lain dokumen pendukung perubahan gaji, daftar hadir (absensi), kartu jam hadir, daftar gaji atau rekap daftar gaji, slip gaji atau kartu penghasilan karyawan, surat pernyataan gaji, surat tanda terima dan bukti kas keluar (nota). Sedangkan dokumen dalam teori antara lain dokumen pendukung perubahan gaji, kartu jam hadir, kartu jam kerja, daftar gaji, rekap daftar gaji, amplop gaji, dan bukti kas keluar.

Adapun dokumen yang tidak di gunakan pada PT. Makesa Prima Motor Kota Baubau adalah kartu jam kerja karena telah diganti dengan jam hadir karyawan yang digunakan sebagai pengontrolan karyawan yang bekerja tiap harinya. Untuk amplop gaji perusahaan tidak menggunakan lagi, karena perusahaan membayar gaji karyawan langsung melalui bank Panin yang di transfer ke rekening mas-

ing – masing karyawan. Dan daftar hadir (absensi) dan kartu jam hadir yang digunakan perusahaan masih secara manual, dalam perusahaan daftar gaji dan rekap daftar gaji fungsinya sama yaitu untuk melihat semua rincian gaji karyawan yang berisi gaji pokok, tunjangan dan potongan.

4) Bagan Alir Sistem Penggajian

Dalam penerapan sistem penggajian yang dilaksanakan pada PT. Makes Prima Motor Kota Baubau adalah pada bagian pencatatan waktu dilakukan absensi untuk seluruh karyawan dan mencatat jam hadir karyawan untuk mengetahui masuk dan tidaknya karyawan. Untuk pembuatan daftar gaji pada setiap karyawan dilakukan berdasarkan absen dan jam hadir karyawan atas potongan yang akan diberikan bagi yang tidak hadir maupun yang kurang jam kerjanya. Setelah pembuatan daftar gaji dibuatkanlah slip gaji. Dari slip gaji diberikan juga surat pernyataan atas gaji yang telah diberikan yang dibuat oleh bagian gaji.

Daftar gaji yang telah dibuat diserahkan kepada bendahara untuk dibuatkan nota atas pembayaran gaji. Nota keluar yang dibuat disetorkan kepada direktur selaku pemegang kekuasaan perusahaan untuk ditandatangani. Setelah mendapatkan tandatangan atas nota keluar tersebut, bendahara menyetor nota keluar di Bank Panin untuk ditransferkan kepada masing-masing rekening karyawan. Dan bukti atas transfer disetorkan pada bagian akuntansi untuk mencatatnya selaku biaya yang telah dikeluarkan.

SARAN

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1) Diharapkan agar penerapan sistem akuntansi penggajian karyawan pada PT. Makes Prima Motor Kota Baubau dilaksanakan dengan lebih baik lagi, sehingga dapat mencegah terjadinya pemalsuan atau kesalahan atas sistem penggajian.

2) Diharapkan agar adanya pemisahan tugas antara bagian pencatatan waktu dan bagian pembuat daftar gaji untuk dapat memudahkan dalam melakukan pekerjaannya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir. 2003. *Pengenalan Sistem Informasi*. Andi. Yogyakarta.
- Abdurrahmat Fathoni. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Rineka Cipta. Bandung.
- Al Bahra Bin Ladjamudin. 2005. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Anthony, Robert N., Vijay Govindarajan. 2005. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Edisi *Sebelas*. Salemba Empat. Jakarta.
- Azhar Susanto. 2008. *Sistem Informasi Akuntansi*. Gramedia. Jakarta.
- Bodnar, George H, dan William S.Hopwood. 2006. *Sistem Informasi Akuntansi*. Buku I. Salemba Empat. Jakarta.
- Budi Sutedjo, Dharma Oetomo. 2006. *Perencanaan dan Pembangunan Sistem Informasi*. Andi. Yogyakarta.
- Fitri Malayanti. 2014. *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Karyawan pada PT. Gemilang Indah Sentosa*. Universitas Sumatra Utara. Medan.
- Hall, James, A. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Empat. Salemba Empat. Jakarta.
- Herman Sofyandi. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Iis Nurlis Setyowati. 2005. *Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Karyawan pada PT. Sinabro Java Garment Bawen Kab. Semarang*. Universitas Negeri Semarang. Semarang.

- Jogiyanto. 2005. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Andi, Yogyakarta.
- Kamilla Anggi Megawantie. 2007. *Sistem Informasi Akuntansi Penggajian pada PT. Asahi Dendo Indonesia*. Universitas Gunadarma. Depok.
- Malayu, S. P. Hasibuan. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Kesembilan. Bumi Aksara. Jakarta.
- Mangkuprawira. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik*. Edisi Ketiga. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Mardi. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Mutiara Panggabean. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Kedua. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Romney, Marshall B., dan Paul John Steinbart. 2006. *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi Kesembilan. Salemba Empat. Jakarta.
- Sanyoto Gondodiyoto. 2007. *Audit Sistem Informasi*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Edisi Ketiga. Mandar Maju. Bandung.
- Sudjana. 2001. *Metode Statistika*. Edisi Revisi. Tarsitu. Bandung.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Sutarman. 2009. *Pengantar Teknologi Informasi*. Bumi Aksara. Yogyakarta.
- Teddy, I. B., Prianthara. 2013. *Akuntansi Untuk Manager*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Yani. H. M. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Mitrawacana Media. Jakarta.

STRATEGI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SERTA EFEKTIVITAS PENERIMAANNYA DI PEMERINTAH KOTA BAUBAU TAHUN 2014-2016

Nur Hayati

(Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unidayan Baubau)

Sulhan Manaf

(Dosen Fakultas Ekonomi Unidayan Baubau)

A B S T R A C K

In optimizing revenue from Land and Building Tax (PBB), certain Baubau City governments have a strategy through intensification and extensification efforts so that the effectiveness of PBB revenue can be realized so that it can increase regional income. This study aims to determine and analyze the strategy of receiving Land and Building Tax (PBB) and the effectiveness of its acceptance in the Baubau City government in 2014-2016. The results of this study are expected to be used as input and information for the Baubau City Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAPD). Research Results that the implementation of strategies to increase UN revenues in the city of Baubau carried out an intensification and extensification strategy. The intensification strategy was implemented through guidance and training in order to improve the skills of the management officers, discipline of the management officers, counseling the community to increase awareness of paying as taxpayers and suppress administrative costs while extensification was done through adding potential and creating coordination and support. The average amount of Land Building Tax receipts in the City of Baubau from 2014 to 2016 reached Rp. 2,648,158,106 with a percentage level of 64.93%, based on the criteria of the level of effectiveness as a whole the UN revenue in the City of Baubau is classified as ineffective. The ineffectiveness of the acceptance of the UN is influenced by the following factors, namely limited resources, mandatory UN difficult to find, lack of public awareness and level of public knowledge.

Keywords: Strategy and effectiveness of Land and Building Tax (PBB) revenue

Strategi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Serta Efektivitas Penerimaannya Di Pemerintah Kota Baubau Tahun 2014-2016

PENDAHULUAN

Sebagai sumber informasi, akuntansi melahirkan cabang ilmu yang disebut dengan akuntansi pajak. Akuntansi pajak timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian da-

lam bidang perpajakan. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan pemerintah.

Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2010:7) menjelaskan bahwa akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, maka akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, oleh karena itu Undang-Undang perpajakan memiliki prioritas untuk dipatuhi agar tidak menimbulkan kerugian materi bagi wajib pajak.

Pelaksanaan Undang-Undang perpajakan di Indonesia dicetuskan pada tahun 1983 atau 38 tahun setelah Indonesia merdeka. Pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan (Siahaan, 2012: 9), sedangkan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2013:12).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bentuk reformasi pada level pemerintah daerah. Perkembangan terbaru tentang pajak daerah yaitu pelimpahan kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang pemungutannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.

Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai pajak daerah merupakan strategi pemerintah pusat untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dan memberikan peluang baru kepada daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Wilayah pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) Pemerintah Kota Baubau terdiri atas 8 (delapan) kecamatan yaitu kecamatan Wolio, Sorawolio, Betoambari, Bungi, Kokalukuna, Murhum, Batu Poaro dan Lea-Lea. Berdasarkan data laporan ketetapan dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) sejak PBB dikelola oleh pemerintah Kota Baubau menunjukkan bahwa pada tahun 2014 ketetapan objek pajak mencapai 41.527 dengan nilai sebesar Rp. 3.038.763.881, namun realisasi yang dicapai hanya sebesar 22.676 objek pajak dengan nilai Rp. 1.957.670.123. Sementara itu pada tahun 2015 ketetapan objek pajak yang harus dicapai meningkat sebesar 1,403% menjadi 42.110, dengan nilai sebesar Rp. 4.502.506.794, sedangkan yang terealisasi adalah 24.140 objek pajak dengan nilai sebesar Rp. 2.954.300.637. Pada tahun 2016 ketetapan objek pajak bumi dan bangunan (PBB) Kota Baubau terus meningkat sebesar 2,559% dari tahun sebelumnya menjadi 43.188 objek pajak, dengan nilai sebesar Rp. 4.682.443.642, namun realisasi yang dapat dicapai adalah sejumlah 23.575 objek pajak, dengan nilai sebesar Rp. 3.032.503.557. Dari kondisi fluktuasi nilai PBB tersebut diatas, pemerintah daerah perlu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi yang merupakan bagian dari strategi dalam mengoptimalkan dan mengefektifkan sumber penerimaan daerah.

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis strategi penerimaan Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB) serta efektifitas penerimaannya di pemerintah Kota Baubau Tahun 2014-2016.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Akuntansi Pajak

Pajak dengan ilmu akuntansi mempunyai hubungan yang saling membangun yang membentuk suatu spesialisasi yang dikenal dengan akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menurut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah.

Menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2010:7) bahwa akuntansi pajak akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, maka akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku.

2. Pajak

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan daerah, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas daerah. Saat ini pemerintah sedang mensosialisasikan kepada masyarakat untuk bisa ikut berpartisipasi dalam membayar pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara menyempurnakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan penerapan sanksi yang memberatkan jika wajib pajak tidak bisa membayar terutang kepada kas daerah secara tepat waktu.

Mardiasmo (2004:1) menjelaskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

3. Pajak Daerah

Erly Suandy (2005:36), menyatakan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Marihot Pahalal Siahaan (2010:7) pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan uang-uang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Undang-undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, menyatakan pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

4. Pajak Bumi Dan Bangunan

Dalam Negara republik indonesia yang kehidupan rakyat dan perekonomiannya sebagian besar bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya mempunyai fungsi penting dalam membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan undang- undang dasar 1945. Oleh karena itu bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, karena mendapat sesuatu hak dari kekuasaan Negara, wajar menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui pembayaran pajak.

Selama ini PBB merupakan pajak pusat, namun hampir seluruh penerimaannya diserahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khusus PBB sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah. Sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih merupakan pajak pusat. Dengan dijadikannya PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah (PAD).

Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan

Soemitro (2006:295) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tidak bergerak, oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak, maka disebut juga pajak objektif.

5. Konsep Strategi

Strategi merupakan tindakan yang sering kali dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan di mulai dari apa yang terjadi atau sering dilakukan berdasarkan apa yang di harapkan di masa yang akan datang. Menurut Handari Nawan (2000:147) dalam bahwa strategi dalam manajemen sebuah organisasi dapat diartikan sebagai kiat, cara, dan taktik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yang terarah pada tujuan strategi organisasi.

Jatmiko (2003:4) strategi dideskripsikan sebagai suatu cara dimana organisasi akan mencapai tujuan-tujuannya, sesuai dengan peluangpeluang dan ancaman-ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta sumber daya dan kemampuan internal organisasi.

Siagian (2004:7) strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.

Berdasarkan beberapa konsep tentang strategi, maka dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu cara atau usaha yang direncanakan secara sistematis dan disesuaikan dengan lingkungan organisasi untuk mencapai tujuan yang di inginkan.

6. Konsep Efektivitas

Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah organisasi. Keberhasilan organisasi pada umumnya diukur dengan konsep efektivitas, pada dasarnya pengertian efektivitas senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisein, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisien lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.

Menurut Sadono Sukirno (2006:108) efektif merupakan ukuran prestasi manajemen

dalam kegiatan-kegiatan yang diperlukan agar sasaran organisasi tercapai. Menurut Stephen P. Robbins (2010:8) efektivitas adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tepat, atau menyelesaikan aktivitas-aktivitas yang secara langsung mendorong tercapainya sasaran-sasaran organisasi.

Berdasarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran prestasi manajemen dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dengan tepat dan benar untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Menurut Mahmudi (2010:144) untuk menghitung tingkat efektivitas pajak daerah menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

METODE PENELITIAN

1. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini bertempat di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang beralamat di Jl. Dayanu Ikhsanuddin No.59 Tel. (0402) 2825719 Kecamatan Betoambari Kota Baubau. Objek dalam penelitian ini adalah data target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Baubau selama tahun 2014-2016.

2. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang telah didokumentasikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pendapatan Daerah (BPKAPD) Kota Baubau. Dalam penelitian ini berupa data laporan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Baubau.

- 2) Observasi atau pengamatan yaitu melakukan pengamatan terhadap aktivitas pada bidang pendapatan dan penetapan pajak bumi dan bangunan (PBB) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Baubau.
- 3) Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sistematis dengan atau tanpa bantuan suatu daftar pertanyaan. Wawancara dilakukan secara lisan kepada Kepala Bidang dan staf pada bidang Pendataan dan Penetapan pajak bumi dan bangunan (PBB) dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan konfirmasi secara langsung tentang efektifitas pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Baubau.
- 4) Studi Pustaka merupakan pengumpulan data yang bersifat teoritis yang bersumber dari literatur-literatur yang berkaitan dengan efektifitas pajak bumi dan bangunan (PBB).

3. Teknik Analisis Data

Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini, maka metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu metode untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum. Pada penelitian ini, analisis deskriptif yang dimaksudkan adalah memberikan gambaran dan penjelasan mengenai tingkat efektifitas pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Baubau

Mengukur tingkat efektifitas pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan (realisasi) suatu pajak dengan target pajak yang bersangkutan. Mahmudi (2010:144) menjelaskan bahwa untuk menghitung tingkat efektivitas pemungutan pajak dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian terhadap tingkat efektivitas pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

Tabel Kriteria penilaian terhadap tingkat efektivitas

No	Tingkat Efektivitas	Rasio (%)
1	Sangat Efektif	> 100
2	Efektif	100
3	Cukup Efektif	90 - 99
4	Kurang Efektif	75 - 89
5	Tidak Efektif	< 75

Sumber : Mahmudi (2010:144)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Bangunan di Kota Baubau

Strategi merupakan komitmen terhadap semua kegiatan yang direncanakan yang ada dalam lingkup suatu organisasi yang dilaksanakan secara optimal dengan cara memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki oleh organisasi.

Berdasarkan jawaban wawancara, maka strategi intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Baubau adalah sebagai berikut:

- 1) Strategi intensifikasi, merupakan suatu cara untuk meningkatkan penerimaan PBB yang mencakup aspek kelembagaan dan aspek personalianya, yang pelaksanaannya melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

- a) Mengadakan bimbingan dan pelatihan dalam rangka peningkatan keterampilan para petugas pengelola. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keahlian tenaga pengelola PBB yaitu dengan mengikuti diklat, seminar dan pelatihan kerja sehingga aparatur pengelola PBB dapat menambah wawasannya dan dapat menciptakan lingkungan kerja yang optimal khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya sehingga penopang peningkatan penerimaan PBB.

- b) Meningkatkan disiplin para petugas pengelola

Disiplin petugas pengelola berkaitan dengan fungsi dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, dalam hal ini adalah penataan administrasi yang nantinya akan berpengaruh terhadap kelancaran proses pelayanan dan pengawasan. Penataan administrasi yang dimaksud adalah penataan data objek dan wajib PBB. Ada dan tertibnya data administrasi objek dan Wajib PBB akan mempermudah pelaksanaan pemungutan/penagihan. Setiap pengelola PBB harus mendokumentasikan data-data yang ada, sehingga apabila suatu saat diperlukan akan mudah ditemukan. Penempatan letak data objek dan Wajib PBB yang disusun berdasarkan zonasinya/wilayah akan memudahkan pengelola untuk melakukan pekerjaan. Dalam melakukan pengawasan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Baubau melakukan tindakan tanpa pengetahuan wajib PBB, kegiatan tersebut berupa verifikasi lapangan yang dilakukan apabila data objek pajak yang dilaporkan diduga tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

- c) Sosialisai kepada masyarakat

Dalam rangka meningkatkan penerimaan PBB, pihak BPKAD Kota Baubau melakukan sosialisasi tentang PBB kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan

melalui pemasangan reklame, melalui media massa cetak dan elektronik yaitu dengan melakukan publikasi di Koran

- d) Mengadakan penekanan biaya administrasi
Biaya administrasi berhubungan dengan tarif PBB itu sendiri, tarif PBB yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Baubau yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Baubau No 7 tentang PBB telah melalui pertimbangan bahwa tarif yang ditetapkan pastinya tidak akan memberatkan masyarakat Kota Baubau, sedangkan administrasi lain yang menyertai pengajuan pengurusan PBB digratiskan atau tidak dikenakan biaya.
- 2) Strategi ekstensifikasi
Strategi ekstensifikasi merupakan usaha untuk menggali sumber- sumber penerimaan PBB yang baru, pelaksanaannya melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penambahan potensi
Upaya penambahan potensi penerimaan PBB dilakukan dengan pembaharuan data wajib dan objek PBB, hal tersebut merupakan prioritas pihak BPKAD Kota Baubau sebagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan PBB, Pembaharuan data yang dilakukan adalah dengan terjun langsung ke lapangan atau yang biasa disebut dengan survey lapangan. Survey lapangan dilakukan untuk menemukan wajib pajak baru dan untuk mengetahui kondisi wajib atau objek PBB di lapangan. Dengan survey lapangan akan ditemukan objek pajak yang belum dikenakan pajak dan adanya perubahan objek pajak atau adanya objek PBB tak bertuan.
 - b) Koordinasi dan kerjasama dengan dinas terkait
Pihak BPKAD Kota Baubau dalam meningkatkan penerimaan PBB juga menjalin/melakukan kerjasama dengan instansi terkait yang dapat membantu dalam meningkatkan penerimaan PBB. Kerjasama

yang dilakukan BPKAD Kota Baubau adalah dengan pihak bank dan kantor pos dan giro yang menyediakan pelayanan pembayaran PBB, kantor kecamatan dan kelurahan yang membantu dalam pendataan dan peninjauan wajib PBB baru

Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB oleh pemerintah Kota Baubau bukan tanpa kendala atau hambatan-hambatan yang mengakibatkan tidak tercapainya target penerimaan PBB atau tidak efektifnya penerimaan PBB, faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut sebagai berikut :

1) Sumber daya yang terbatas

Pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Baubau sebagai pengelola PBB, pada awal peralihannya sangat sulitnya mendapatkan sumber daya manusia yang mempunyai tingkat pengetahuan dan kemampuan di bidang teknologi informasi dan perpajakan, karena pada dasarnya pengalihan PBB tidak melibatkan sumber daya manusia (SDM) dari Kantor Pelayanan Pajak yang sangat berpengalaman di bidang pengelolaan PBB.

2) Wajib PBB sulit ditemui

Wajib PBB sebagai pemilik objek pajak bertempat tinggal diluar kota, sedangkan tidak ada nomor yang bisa dihubungi oleh ketua RT dan terkadang ketua RT sudah tidak mengetahui siapa pemilik atas objek tersebut.

3) Kurangnya kesadaran masyarakat.

Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB, wajib pajak lebih memilih menunda dari pembayaran PBB dengan alasan tidak ada waktu untuk membayar atau tidak dapat SPPT dari petugas.

4) Tingkat pengetahuan masyarakat.

Tingkat pengetahuan wajib pajak yaitu pengetahuan wajib pajak mengenai PBB serta hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, kapan harus membayar, dimana harus membayar.

Faktor-faktor tersebut di atas sangat terasa pada masyarakat Kota Baubau, akibatnya realisasi penerimaan PBB dari tahun 2014-2016 selalu tidak mencapai tingkat efektivitas.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa strategi dalam merealisasikan target PBB yang dilakukan oleh pemerintah Kota Baubau melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yaitu :

- 1) Intensifikasi dilaksanakan melalui :
 - a) Mengadakan bimbingan dan pelatihan dalam rangka peningkatan keterampilan para petugas pengelola pendapatan
 - b) Meningkatkan disiplin para petugas pengelola pendapatan
 - c) Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran membayar sebagai wajib pajak
 - d) Mengadakan penekanan biaya administrasi setiap jenis pungutan
- 2) Ekstensifikasi dilaksanakan melalui :
 - a) Penambahan potensi
 - b) Menciptakan koordinasi dan dukungan

Secara keseluruhan realisasi penerimaan PBB di kota Baubau dari tahun 2014 sampai 2016 berada pada kategori tidak efektif dengan tingkat presentase rata-rata penerimaan sebesar 64,93%. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

- 1) Sumber daya yang terbatas
- 2) Wajib PBB sulit ditemui
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat
- 4) Tingkat pengetahuan masyarakat

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ryska Febriyanti (2016) bahwa strategi-strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lumajang meliputi di berlakukannya pemberian reward, pemberian biaya operasional, melakukan pemutakhiran data, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, melakukan kerja sama dengan kejaksaan negeri, dan diberlakukannya bagi hasil pajak

daerah. Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PBB pemerintah Kabupaten Lumajang dari tahun 2014-2015 sebesar 76,71% dengan nilai interpretasi cukup efektif, faktor yang menjadi penghambat tata kelola PBB di Kabupaten Lumajang meliputi persyaratan yang diajukan untuk mengajukan mutasi atau data baru, kurang sadarnya masyarakat pada pajak, dan kurang sumber daya manusia.

Dengan demikian hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ryska Febriyanti (2016) dapat dikatakan searah mengingat indikator yang digunakan dalam pembahasan hampir sama walaupun hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas yang berbeda.

SARAN

- 1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Baubau harus dapat menggalakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan serta lebih aktif dalam melakukan monitoring kepada masyarakat agar tercipta kesadaran dan pemahaman masyarakat sebagai wajib PBB dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan Kota Baubau melalui pembayaran PBB.
- 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Baubau harus menambah jumlah tenaga pengelola PBB agar pendataan PBB dapat menyeluruh dan pengelolaan PBB dapat dioptimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Andi Hermansyah. 2015. *Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Dispenda Kota Makassar Tahun 2014*. Skripsi. Ilmu Administrasi SI FISPOL Universitas Hasanuddin.
- Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Selemba Empat. Jakarta

- Anggito Abimanyu. 2005. *Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih*. Bapekpi Depkeu. Jakarta
- Cristian Tulak Rambulangi. 2012. *Efektifitas pemungutan pajak bumi dan bangunan dikecamatan sopai kabupaten toraja utara*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Sam Ratulangi Manado. Sulawesi Utara
- Dwi Rammad Jatmiko. 2003. *Manajemen Stratejik*. Malang Pres. Universitas Muhammadiyah. Malang
- Erli Suandy, 2005, *Hukum Pajak*, Jakarta : penerbit Salemba Empat
- Fidel 2010. *Cara Mudah & Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan : Mulai Dari Konsep Dasar Sampai Aplikasi*. Murai Kencana. Jakarta
- Fakultas Ekonomi. 2017. *Tentang Pedoman Penulisan Skripsi*. Unidayan Baubau
- Herry Purwono, 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Pajak*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kesit Bambang Prakosa 2003. *Pajak Dan Retribusi Daerah*, UII Perss, Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi. Yogyakarta.
- . 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- . 2004. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta
- Marihot Pahallal Siahaan 2010. *Hukum Pajak Elementer* Raja grafindo persada
- . 2012. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Rochmat Soemitro. 2006. *Perpajakan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- . 2012. *Perpajakan, Retribusi, Teori dan Teknis Pemungutan*. Graha Ilmu. Bandung
- Ryska Febriyanti. 2016. *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Lumajang*. Skripsi. Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
- Sadono Sukirno dkk. 2006. *Pengantar Bisnis*. Edisi Pertama Cetakan Ke-2. Kencana. Jakarta.
- Sondang P. Siagian. 2004. *Menajemen sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta
- Supramo, Theresiaworo Damayanti, 2010. *Perpajakan Indonesia*. Andi. Yogyakarta
- Stephen P. Robbins, Mary Coulter. 2010. *Manajemen. Edisi Kesepuluh Jilid I*. Penerbit Erlangga. PT. Gelora Aksara Pratama. Jakarta
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta: Bandung.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tanggal 11 Juli 2001 Tentang *Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak*
- Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1985 **Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan**.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1994 **Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan**.
- Waluyo dan Wirawan B Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia. Edisi Revisi*. Salemba Empat. Jakarta

**ANALISIS PENCATATAN AKUNTANSI IURAN DANA PENSIUN PT. POS INDONESIA
(PERSERO) KOTA BAUBAU**

Atmani

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unidayan Baubau

R. Supalal Estihadi

(Dosen Fakultas Ekonomi Unidayan Baubau)

A B S T R A C K

This study aims to determine the accounting procedures for recording pension fund contributions applied at PT. Pos Indonesia is in accordance with the accounting recording procedures according to Hery (2013) applied by the company as well as comparing the accounting procedures and treatment of pension funds implemented by PT. Indonesian post. This study uses a descriptive qualitative analysis method in which company data about pension funds and other data that support research is collected then the data is analyzed by describing and comparing the application of pension fund accounting as regulated in Hery's theory (2013). The object of this research is PT. Pos Indonesia (Persero) Baubau Branch. The results of this study indicate that the accounting recording process is in accordance with the theory of Hery (2013) and hanaya companies help collect and deposit pension contributions into pesniun fund accounts.

Keyword : *Kompetensi Sumberdaya Manusia*

**Analisis Pencatatan Akuntansi Iuran Dana Pensiun PT. POS Indonesia (Persero)
Kota Baubau**

PENDAHULUAN

Manusia mengalami perkembangan berkaitan dengan kemampuan dan kesanggupannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari sejak lahir sampai pada saat kematiannya, manusia melewati rangkaian masa dan kurun waktu, dimana kemampuan untuk menjadi manusia yang produktif tidak selamanya dapat berlangsung terus menerus. Secara alamiah, sampai pada saat tertentu seseorang berada dalam keadaan belum produktif dan hanya dapat memenuhi kebutuhannya dengan bantuan orang lain. Demikian pula setelah melewati masa usia tertentu, dimana manusia akan berada dalam keadaan tidak produktif atau sudah meninggalkan masa produktifnya. Dalam hal tertentu, keterbatasan produktivitas seseorang juga timbul dalam hal yang bersangkutan mengalami halangan atau menderita cacat.

Pada usia tua kemampuan seseorang untuk berproduksi mulai menurun sehingga mengakibatkan pula menurunnya penghasilan. Sakit atau kecelakaan yang dapat mengakibatkan cacat akan mempengaruhi kemampuan dalam mencari penghasilan. Kematian seseorang yang bertugas mencari penghasilan bagi keluarganya akan berakibat terhentinya sumber penghasilan bagi keluarganya yang ditinggalkan. Dengan demikian, kelangsungan atas penghasilan merupakan sumber utama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi seseorang dan kekayaannya.

Dana pensiun diselenggarakan dalam upaya memberikan kesejahteraan pada karyawan oleh karenanya baik instansi pemerintah maupun swasta mengadakan program pensiun bagi para pegawainya, dan diharapkan dengan adanya program pensiun

akan memberikan motivasi yang tinggi bagi karyawan sehingga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan dan untuk meningkatkan produktifitas usahanya tercapai, sehingga akan menguntungkan baik bagi perusahaan maupun karyawan itu sendiri ketika karyawan sudah pensiun, mereka akan menerima haknya sebagai peserta pensiun dalam bentuk pembayaran secara berkala selama masa hidupnya dan apabila peserta program pensiun tersebut meninggal maka sang ahli waris berhak menerima kelanjutan pembayaran pensiun tersebut.

Melihat arti penting Dana Pensiun Pemerintah memberikan status badan hukum kepada Dana Pensiun pada tanggal 20 April 1992 dengan mengeluarkan UU Nomor 11 Tahun 1992 yang menjelaskan bahwa Dana Pensiun merupakan suatu lembaga keuangan yang memainkan peranan penting dalam masyarakat. Berdasarkan UU tersebut, yang termasuk dalam pengertian Lembaga Dana Pensiun adalah yang diselenggarakan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), yang pada umumnya dikelola oleh BUMN dan swasta, tidak termasuk Dana Pensiun PNS (Taspen), Dana Pensiun TNI (Asuransi Sosial TNI), dan Jaminan Hari Tua yang diselenggarakan oleh Jamsostek (sekarang BPJS Ketenagakerjaan). Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pencatatan akuntansi iuran dana pensiun yang dilakukan PT.Pos Indonesia Cabang Baubau". Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat pada beberapa pihak:

TINJAUAN PUSTAKA

1. Akuntansi

A *Statement Of Basic Accounting Theory*(ASOBAT) menyatakan bahwa akuntansi diartikan sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh

para pemakainya. Komite istilah *American Institute Of Certified Public Accounting* (AICPA) mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya (Sofyan, 2011:5).

Lebih lanjut *Accounting Principle Board* (APB) *Statement* No. 4 mendefinisikan akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih diantara beberapa alternatif.

Menurut Suwardjono (2010:10) akuntansi adalah sebagai seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Taswan (2015:5) turut mengemukakan bahwa secara umum akuntansi dapat didefinisikan sebagai seni, ilmu, system informasi yang didalamnya menyangkut pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran dengan cara sepatutnya dan dalam satuan uang atas transaksi dan kejadian yang setidak-tidaknya sebagian mempunyai sifat keuangan serta adanya penginterpretasian hasil pencatatan dan disajikan dalam laporan keuangan. Adapun menurut Rudianto (2009:14) akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasi, meringkas dan melaporkan aktifitas/transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan.

2. Konsep Dasar Dana Pensiun

Dana Pensiun berperan sangat penting dalam pembangunan baik dari segi ekonomi maupun kesejahteraan sosial. Beberapa sumber memberikan pengertian dana pensiun atau *pension fund* sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun :
“*Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program pensiun yang menjanjikan manfaat pensiun. Sebagai suatu badan hukum, dana pensiun bertanggung jawab menghimpun dan mengelola dana milik peserta program pensiun.*”
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 16/POJK.05/2016 :
“*Dana Pensiun adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan Program Pensiun, yaitu suatu program yang menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya secara berkala dan dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu.*”
- 3) Dahlan (2005:704) mendefinisikan Dana Pensiun yaitu:
“*Lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun, yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan, terutama yang telah pensiun.*”

Dari definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. Penyelenggaraan program pensiun tersebut dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau dengan menyerahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program

pensiun, misalnya bank-bank umum atau perusahaan asuransi jiwa.

3. Program Pensiun

Undang-Undang No. 11 1992 (1) Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi pesertanya. Program pensiun mempersiapkan pemberi kerja menyediakan manfaat (pembayaran) kepada pekerja setelah mereka berhenti memberikan jasa, dimana dana tersebut dihimpun selama karyawan bekerja dan pada masa karyawan pensiun, dana dan pendapatan dari investasi perusahaan akan dikembalikan kepada karyawan. Adapun Kieso *at all* (2002:147) mendefinisikan program pensiun(*pension plan*)sebagai sebuah perjanjian yang menetapkan bahwa pemberi kerja atau majikan memberikan tunjangan (pembayaran) kepada para karyawan setelah mereka pensiun atas jasa-jasa yang mereka berikan ketika masih bekerja.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa program pensiun ditekankan pada pembayaran manfaat pensiun pada karyawan yang telah pensiun sebagai pendapatan setelah masa kerja.

4. Akuntansi Dana Pensiun

Akuntansi terus berkembang mengikuti perkembangan dunia bisnis yang semakin kompleks belakangan ini. Semakin luasnya jaringan bisnis juga menambah kompleksitas informasi yang harus disajikan akuntansi secara benar, tepat, singkat, tetapi juga jelas dan menyeluruh. Hal ini menuntut para akuntan untuk mempunyai keahlian spesifik dalam menangani jenis informasi tertentu, karena hampir tidak mungkin menguasai seluruh aspek yang menjadi lingkup akuntansi secara mendalam. Menurut Elvina, 2012:24) akuntansi dana pensiun dimaksudkan untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat dipergunakan untuk memperkirakan kemam-

puan Dana Pensiun pada masa sekarang maupun di masa yang akan datang dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar manfaat pensiun kepada peserta pada waktu mereka pensiun.

Dana Pensiun sebagai suatu institusi keuangan yang memiliki kekayaan cukup besar dibandingkan institusi lainnya selain perbankan, sebenarnya memiliki potensi data yang memiliki nilai tambah yang tinggi bila dikelola dengan baik dan benar. Potensi dimaksud mungkin belum berupa keuntungan dalam penjualan data, tetapi potensi yang sangat berguna dalam melakukan evaluasi pengelolaan dana pensiun dan mengarahkan pengelolaan dana pensiun dalam membuat suatu perencanaan di masa yang akan datang. Berdasarkan Elvina (2012:24) masalah yang penting dalam akuntansi pensiun adalah menentukan berapa jumlah kewajiban pensiun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan. Sebagian besar akuntan sepakat bahwa kewajiban pensiun perusahaan adalah merupakan kompensasi kepada pegawai yang ditangguhkan (ditunda) dalam jangka waktu yang ditentukan dalam program pensiun. Namun demikian, berkembang beberapa cara alternatif untuk mengukur kewajiban itu.

5. Laporan Keuangan Dana Pensiun

Sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Laporan Keuangan Dana Pensiun terdiri atas :

1. Laporan Keuangan.
2. Laporan Portofolio Investasi.

Laporan Keuangan Dana Pensiun selain berisi jenis-jenis laporan keuangan standar ditambah dengan laporan aktiva bersih dan laporan perubahan aktiva. Laporan Keuangan Dana Pensiun memuat informasi :

- a. Sumber Daya yang dimiliki dan pengelolaannya

Dana sebagai sumber daya lembaga dana pensiun, selain berasal dari iuran peserta/karyawan atau pemberi kerja, juga berasal dari hasil investasi dana pada masa sebelumnya yang diperoleh berupa, bunga deviden, hasil sewa, diskonto, bunga obligasi dan lain sebagainya. Hasil investasi dana didalam laporan keuangan dana pensiun dilaporkan pada kelompok aktiva investasi dalam rekening deposito berjangka, sertifikat deposito, saham obligasi, surat-surat berharga lainnya, SBPU, penyertaan saham, surat pengakuan hutang, tanah dan bangunan. Sedangkan aktiva lancar yang tidak menghasilkan dilaporkan pada aktiva lancar diluar investasi dalam rekening kas dan bank, SBI, piutang iuran peserta / pemberi kerja, piutang iuran tambahan, beban dibayar dimuka piutang hasil investasi.

Semua dana yang diperoleh dana pensiun merupakan sumber daya dan dikelola sesuai dengan arahan pimpinan pemberi kerja, pendiri atau pengawas dan ketentuan serta peraturan yang berlaku dalam UU Dana Pensiun. Pada laporan keuangan aktiva bersih, aktiva dimulai sebagai berikut: Uang tunai, rekening giro dan deposito, dimulai disajikan dengan nilai nominal, sertifikat deposito, SBI, SBPU, surat pengakuan hutang lebih dari satu tahun, disajikan dengan nilai tunai. Surat-surat berharga dengan nilai pasar, penyertaan langsung pada saham, tanah dan bangunan dilaporkan dengan nilai appraisal, piutang dengan nilai netto sedangkan aktiva operasional dilaporkan dengan nilai buku. Bilamana suatu aktiva, misalnya gedung digunakan sebagian untuk investasi dan sebagian untuk operasional, maka penggolongan aktiva apakah sebagai investasi atau aktiva operasional ditentukan mana yang lebih signifikan.

b. Akumulasi Manfaat Pensiun

Manfaat pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Dengan demikian manfaat

pensiun bagi pengelola dana pensiun merupakan kewajiban/hutang dan dikelompokkan sebagai kewajiban jangka pendek, dimasukkan dalam rekening utang pensiun.

Apakah karyawan yang berhenti bekerja diberi pensiun, maka biaya pensiun, sebagai utang pensiun yang akan dibayarkan selama hidupnya karyawan tersebut merupakan beban dana pensiun. Jumlah pensiun yang akan dibayar ditaksir berdasarkan jumlah karyawan, umur dan jangka waktu pembayaran pensiun. Pada akhir periode jumlah akumulasi (taksiran) utang pensiun didebit ke rekening gaji/upah dan kredit ke rekening utang pensiun.

c. Perubahan atas Sumber Daya dan Manfaat Pensiun

Informasi perubahan sumber daya dan manfaat pensiun disajikan dalam perubahan aktiva bersih, laporan ini berisi tentang perubahan aktiva bersih yang tersedia untuk manfaat pensiun, serta menguraikan penyebab perubahan tersebut yang diperinci atas pertambahan dan atau pengurangan yang terjadi selama satu periode akuntansi. Penambahan merupakan pendapatan investasi berupa antara lain bunga, deviden, sewa, laba pelaporan investasi iuran normal, iuran tambahan dan pendapatan lain-lain. Pengurangan merupakan beban investasi berupa beban-beban operasional, manfaat pensiun, beban lain-lain pajak penghasilan pengalihan dana ke dana pensiun lain.

d. Faktor Penting lainnya bagi Pemakai Laporan Keuangan

Dalam laporan keuangan dana pensiun pemakai laporan perlu mendapat penjelasan mengenai kegiatan selama suatu periode pelaporan dan dampak dari setiap perubahan peraturan dana pensiun dengan demikian pemakai laporan keuangan dapat menentukan kebijakan atas informasi yang telah diperolehnya. Faktor lain yang diperlukan pemakai adalah laporan tentang transaksi dan kinerja investasi selama periode pelaporan dan posisi keuangan dana pensiun pada akhir

periode pelaporan, informasi penting lainnya yang diperlukan oleh pemakai laporan adalah penjelasan mengenai kebijakan/arah investasi, serta perhitungan kewajiban aktuarial berdasarkan laporan aktuaris terakhir.

6. Pencatatan Pemotongan Iuran Dana Pensiun

Pencatatan iuran dana pensiun menurut Hery (2013:308) jumlah gaji bruto (kotor) adalah besarnya gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan, sebelum dikurangi potongan-potongan. Jumlah gaji bruto setelah dikurangi dengan potongan-potongan, dinamakan gaji bersih. Potongan-potongan yang mengurangi jumlah gaji yang diterima oleh karyawan biasanya terdiri atas potongan untuk pajak penghasilan dan jaminan sosial tenaga kerja (jam sostek).

Akun beban gaji didebet dalam jurnal sebesar gaji bruto (gaji pokok ditambah dengan seluruh tunjangan yang ada dan sebelum dikurangi potongan-potongan). Dalam jurnal di atas asumsi bahwa jumlah gaji bersih yang dibayarkan lagi (kas) adalah besarnya gaji bruto setelah dikurangi dengan potongan-potongan untuk pajak penghasilan, jam sostek, iuran pensiun dan angsuran pensiun.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Eiriska Gistsari selaku pegawai PT. Pos Indonesia Cabang Baubau bagian keuangan khususnya gaji iuran pensiun terdiri dari iuran normal yang merupakan tanggungan karyawan perusahaan ditetapkan sebesar 5% x Penghasilan Dasar Pensiun dan iuran normal yang menjadi tanggungan pemberi kerja ditetapkan sebesar 13,50% x Penghasilan Dasar Pensiun. Dengan adanya potongan terhadap gaji dasar karyawan, maka perusahaan akan mencatat jurnal sebagai berikut:

1) Kasus 1: Tn. Masril Mbaeko (Lampiran)

Jurnal Pencatatan Pemotongan iuran Dana

Pensiun

<i>Beban Gaji</i>	<i>Rp3.203.000</i>
<i>Beban IPK</i>	<i>Rp432.405</i>
<i>Utang Iuran Pensiun</i>	<i>Rp160.150</i>
<i>Utang IPK</i>	<i>Rp432.405</i>
<i>Sumbangsih</i>	<i>Rp3.500</i>
<i>Iuran Dana Kematian</i>	<i>Rp2.000</i>
<i>Kas</i>	<i>Rp3.042.850</i>

Jurnal Penyetoran ke Rekening

<i>Utang iuran pensiun</i>	<i>Rp160.150</i>
<i>Utang IPK</i>	<i>Rp432.405</i>
<i>Kas</i>	<i>Rp592.555</i>

Sumber : Data Internal PT. Pos Indonesia Cab Baubau (diolah)

2) Kasus 2 : Tn La Ode Saktika A. Luthfi (Lampiran)

Jurnal Pencatatan Pemotongan iuran Dana

Pensiun

Jurnal Penyetoran ke Rekening

<i>Utang iuran pensiun</i>	<i>Rp288.750</i>
<i>Utang IPK</i>	<i>Rp779.625</i>

3) Kasus 3 Tn Husen (Lampiran)

<i>Kas</i>	<i>Rp1.078.735</i>
------------	--------------------

Jurnal Pencatatan Pemotongan iuran Dana

Pensiun

<i>Beban Gaji</i>	<i>Rp7.806.000</i>
-------------------	--------------------

<i>Beban IPK</i>	<i>Rp1.053.810</i>
------------------	--------------------

<i>Utang Iuran Pensiun</i>	<i>Rp390.300</i>
----------------------------	------------------

<i>Utang IPK</i>	<i>Rp1.053.810</i>
------------------	--------------------

<i>Sumbangsih</i>	<i>Rp3.500</i>
-------------------	----------------

<i>Iuran Dana Kematian</i>	<i>Rp2.000</i>
----------------------------	----------------

<i>Kas</i>	<i>Rp7.415.700</i>
------------	--------------------

Jurnal Penyetoran ke Rekening

<i>Utang iuran pensiun</i>	<i>Rp390.300</i>
----------------------------	------------------

<i>Utang IPK</i>	<i>Rp1.053.810</i>
------------------	--------------------

<i>Kas</i>	<i>Rp1.444.110</i>
------------	--------------------

Sumber : Data Internal PT. Pos Indonesia Cab Baubau (diolah)

Berdasarkan kasus 3 karena iuran pensiun peserta langsung dipotong pada gaji karyawan, maka disebelah debet beban gaji akan dicatat Rp7.806.000,- dan disebelah kredit kas akan dicatat sebesar Rp7.415.700,-. Pada bagian kredit juga terdapat Utang Iuran Pensiun sebesar Rp390.300, (Rp7.806.000 x iuran pensiun 5%), sumbangsih Rp 3.500,- dan iuran dana kematian Rp 2.000,- akan dicatat di sebelah kredit sebagai potongan langsung gaji karyawan. Akun iuran

<i>Beban Gaji</i>	<i>Rp5.775.000</i>
-------------------	--------------------

<i>Beban IPK</i>	<i>Rp779.625</i>
------------------	------------------

<i>Utang Iuran Pensiun</i>	<i>Rp288.750</i>
----------------------------	------------------

<i>Utang IPK</i>	<i>Rp779.625</i>
------------------	------------------

<i>Sumbangsih</i>	<i>Rp3.500</i>
-------------------	----------------

<i>Iuran Dana Kematian</i>	<i>Rp2.000</i>
----------------------------	----------------

<i>Kas</i>	<i>Rp5.486.250</i>
------------	--------------------

ran pensiun dianggap tidak mempengaruhi kas karena merupakan kewajiban dari setiap karyawan untuk membayar iuran pensiun tersebut. Dalam hal ini perusahaan hanya membantu untuk menyetorkan iuran pensiun ke

Dapenpos dari hasil potongan iuran pensiun karyawan. Perusahaan juga menjalankan kewajiban sebagai pemberi kerja dengan membayar iuran pensiun selaku beban perusahaan yang akan dibayarkan oleh perusahaan sendiri. Besarnya iuran yang dibayarkan adalah 13,50% sehingga perusahaan mencatat jurnal beban iuran pemberi kerja (IPK) disebelah debet sebesar Rp1.053.810,- dan mencatat sebelah kredit hutang IPK Rp1.053.810,- diperoleh dari hasil hitungan besarnya IPK 13,50% x gaji karyawan sebesar Rp7.806.000,-. Pada saat disetorkan ke rekening dana pensiun (Dapenpos), perusahaan akan menghapus kewajiban mereka terhadap iuran pensiun karena tanggung jawab dari perusahaan hanya menghimpun dan menyetorkan iuran dana pensiun ke rekening Dapenpos. Selanjutnya pihak Dapenpos-lah yang bertanggung jawab untuk mengelola iuran dana pensiun dan menyalurkan kepada para peserta dana pensiun pada saat peserta memasuki masa pensiunnya.

Tabel Perbandingan Pencatatan Pemo-tongan Iuran Pensiun Menurut Teori dengan Perlakuan di PT. Pos Indonesia Cabang Baubau

Berdasarkan Teori Hery 2013	Perlakuan PT. Pos Indonesia Cabang Baubau
Akun beban gaji didebet dalam jurnal sebesar gaji bruto (gaji pokok ditambah dengan seluruh tunjangan yang ada dan sebelum dikurangi potongan-potongan)	Perusahaan mendebet beban gaji sebesar gaji bruto belum dikurangi dengan potongan-potongan dan mendebet iuran pemberi kerja.

Jumlah gaji bersih yang dibayarkan lagi (kas) adalah besarnya gaji bruto setelah dikurangi dengan potongan-potongan untuk pajak penghasilan, jamsostek, iuran pensiun, dan ang-sur-an pensiun.	Perusahaan mengkredit kas setelah gaji bruto dipotong dengan potongan iuran pensiun dan mengkredit iuran pensiun sebagai pengurang beban gaji serta mengkredit iuran pemberi kerja
--	--

Berdasarkan teori Hery (2013) dengan perusahaan PT. Pos Indonesia Cabang Baubau maka dapat disimpulkan bahwa prosedur pencatatan akuntansi iuran dana pensiun telah sesuai dengan teori Hery (2013), dimana pada PT. Pos Indonesia Cabang Baubau pada akun beban gaji didebet dalam jurnal sebesar gaji bruto sebelum dikurangi dengan potongan-potongan, setelah itu PT. Pos Indonesia mengkredit kas setelah gaji bruto dipotong dengan potong iuran pensiun. Hal ini sejalan dengan teori Hery (2013).

Saran-Saran

Dari hasil penelitian penulis di perusahaan, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah perusahaan sebaiknya tetap mempertahankan sistem pencatatan iuran pensiun yang benar sesuai dengan teori pencatatan jurnal potongan iuran pensiun agar kondisi keuangan perusahaan bisa tetap terkontrol khususnya mengenai pencatatan akuntansi iuran pensiun.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika FP Nussy. 2014. *Analisis Penerapan PSAK No.18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun Pada PT.Taspen Cabang Manado*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.

- Bukit, Elvina, Octavia. 2012. *Analisis Penerapan PSAK No.18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun Pada Dana Pensiun PT. Pertamina*. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanudddin Makassar.
- Dahlan Siamat. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter dan Perbankan Edisi Kelima*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Danang Sunyoto.2013.*Metodologi Penelitian Akuntansi*. PT. Refika Aditama. Bandung
- Hery. 2013. *Akuntansi Dasar 1 dan 2*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Hosea. 2004. *Penerapan Akuntansi Dana Pensiun Pada Dana Pensiun Taspen*. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Standar Akuntansi Keuangan Per Efektif 1 Januari 2015*. Graha Akuntan. Jakarta
- Jevita,Mercy Rengkung, Lintje Kalangi, Heince R.N Wokas.2015. *Evaluasi Pencatatan Dan Pelaporan Dana Pensiun Pada Dana Pensiun Pemberi Kerja Pada PT. PLN Wilayah Sulut-tenggo*E-Jurnal Akuntansi vol.5 no 03 tahun, 2015. Universitas Sam Ratu-langi Manado.
- Kasmir. 2012. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. RajaGrafindo Pers. Jakarta.
- Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No: KEP-2345/LK/2013.
- Kieso, Weygandt dan Warfied, 2002. *Akuntansi Intermediate, Penerjemah: Wibowo dan hermawan Edisi 10*. Penerbit Erlangga. Jakara
- Nur Indrianto dan Bambang Supomo. 2002. *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta
- Rudianto. 2009.*Pengantar Akuntansi*. PT. Gelora Aksara Pratama. Jakarta
- Sofyan Syafri Harahap.2011. *Teori Akuntansi*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. ALFABETA,CV. Bandung
- Suwardjono. 2010. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan keuangan*. BPFE. Yogyakarta.
- Taswan.2 015. *Akuntansi Perbankan, Edisi III*.UPP STIM YKPN.Yogyakarta.
- Wahab Zulaini 2001. *Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- www.dapenpos.co.id _____ , Diakses Tanggal 22 Agustus 2017, Pukul 07.00.
- www.ojk.co.id _____ , Diakses Tanggal 22 Agustus 2017, Pukul 09.00.

**ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS SIKLUS PENDAPATAN JASA
(Studi Kasus Pada Hotel Calista Beach Baubau)**

Bima Sakti Herfinta

(Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unidayan Baubau)

Rafiuddin

(Dosen Fakultas Ekonomi Unidayan Baubau)

A B S T R A C K

Hotel Calista Beach Baubau is one of the companies engaged in services. Where consumer satisfaction is a measure of the level of service quality. Hotel Calista Beach Baubau is a hotel that is most popular with tourists and the public. Considering the hotel was built in a strategic place and has other advantages compared to other hotels in the city of Baubau. This study aims to determine and analyze internal control over the service revenue cycle at the Hotel Calista Beach Baubau. The results of this study are expected to provide an overview of the company about the importance of internal control in the revenue cycle so that company goals can be achieved properly. To get the desired data the writer uses interview and observation methods and is equipped with secondary data. Data were analyzed descriptively with a questionnaire. Based on the analysis conducted by the author on internal control over the service revenue cycle of the Calista Beach Baubau Hotel, the authors found that the Calista Beach Baubau Hotel implemented it quite well, this is seen from all the activities and procedures for receiving revenue that have been carried out by the parties concerned.

Keywords: Internal control analysis, service revenue cycle..

Analisis Pengendalian Internal atas Siklus Pendapatan Jasa (Studi Kasus Pada Hotel Calista Beach Baubau)

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu bidang yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah Kota Baubau. Hal ini dikarenakan meningkatnya sektor pariwisata yang mendorong tumbuhnya kegiatan-kegiatan industri baik yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan pariwisata, yang mana nantinya pariwisata diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup serta pendapatan masyarakat secara umum.

Salah satu industri yang tumbuh seiring dengan perkembangan pariwisata di Kota Baubau adalah didirikannya hotel dengan

berbagai fasilitas didalamnya. Seperti yang terdapat pada Hotel Calista Beach yang memberikan layanan fasilitas yang lebih di badingkang hotel lainya yang ada di Kota Baubau. Adapun fasilitas yang terdapat di Hotel Calista Beach yang mendorong keinginan atau minat tamu berkunjung yaitu di sediaknya fasilitas antar-jemput tamu dari bandara atau pelabuhan ke hotel di sediakan secara gratis, kemudian di sediakannya *Breakfast* (sarapan), *welcome drink* bagi setiap tamu yang berkunjung, serta memberikan diskon atau potongan harga untuk

tamu yang sudah sering berkunjung (menginap), serta fasilitas lainnya yang membuat tamu nyaman saat berkunjung.

Ada beberapa kegiatan operasional yang ada dalam Hotel Calista Beach seperti *Manager, Accounting, Front Office* (resepsionis), *Food and Beverage* (restoran), *House Keeping, Security*, dan *Engginering*. Semua bagian tersebut sangat berperan penting dan saling berkaitan sehingga kegiatan operasional dalam perusahaan berjalan dengan baik.

Sistem informasi akuntansi dapat dibagi ke dalam beberapa siklus yakni siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus produksi dan siklus keuangan. Sama halnya pada Hotel Calista Beach Baubau juga mengoperasikan ketiga siklus tersebut. Dimana pada siklus tersebut sangat berperan penting dalam pengendalian internal perusahaan.

Pengendalian internal berkaitan erat dengan siklus aktivitas bisnis. Melalui pelaksanaan pengendalian internal yang baik, eksposur pada setiap siklus aktivitas bisnis dapat diminimalkan. Salah satu siklus aktivitas bisnis adalah siklus pendapatan, yaitu kejadian yang terkait dengan pendistribusian barang dan jasa kepada pelanggan dan penagihan atas pembayaran yang berkaitan dengan pendistribusian barang dan jasa tersebut. Kebanyakan perusahaan menggantungkan diri pada pendapatan untuk tetap bertahan hidup sehingga siklus yang membentuk pendapatan sangat penting untuk diperhatikan.

Selain itu masih ada beberapa masalah yang berkaitan dengan pengendalian internal pada Hotel Calista Beach Baubau antara lain penunjang operasional kerja belum terpenuhi semua sehingga masih terdapat beberapa kekurangan antara lain lahan parkir yang belum memadai sehingga membuat tamu kurang nyaman untuk memarkirkan kendaraannya dan belum tersedianya fasilitas *lift* sehingga menjadi salah satu masalah yang sering dikeluhkan konsumen yang *cek-in* apabila mendapatkan kamar yang berada di

lantai tinggi, serta masih ada beberapa penunjang lainnya yang belum mampu dipenuhi oleh pihak *managament* yang menjadi titik permasalahan yang ada pada Hotel Calista Beach. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengendalian internal atas siklus pendapatan jasa pada Hotel Calista Beach Baubau.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengendalian Internal

Pengendalian internal dilingkungan kerja perhotelan harus dilaksanakan seefektif mungkin, hal ini dilakukan untuk mencegah dan menghindari terjadinya kesalahan, kecurangan dan penyelewengan. Di perusahaan kecil, pengendalian masih dapat dilakukan langsung oleh pemilik perusahaan. Namun semakin besar perusahaan, yang dimana ruang gerak dan tugas-tugas yang dilakukan semakin kompleks pula sehingga menyebabkan pimpinan perusahaan tidak mungkin lagi melakukan pengendalian secara langsung, untuk itu dibutuhkan suatu pengendalian internal yang dapat memberikan keyakinan kepada pimpinan bahwa tujuan perusahaan telah tercapai.

Krismiaji (2010:195), pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dipercaya.

Azhar Susanto (2008:103), pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai.

Pengendalian internal dapat dibedakan dalam berbagai segi pandang. Menurut Sanyoto (2007:250) antara lain :

- 1) *Preventif control*, adalah pengendalian internal yang dirancang dengan maksud untuk mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan dan penyalahgunaan. Contoh jenis pengendalian ini ialah desain

formulir yang baik, item-nya lengkap, mudah diisi, serta user training atau pelatihan kepada orang-orang yang berkaitan dengan input sistem, sehingga mereka tidak melakukan kesalahan.

- 2) *Detection control*, adalah pengendalian yang *didesain* dengan tujuan agar apabila data direkam/dikonversi dari media sumber untuk ditransfer ke sistem komputer dapat dideteksi bila terjadi kesalahan (maksudnya tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan).
- 3) *Corrective control*, adalah *pengendalian* yang sifatnya jika terdapat data yang sebenarnya error tetapi tidak terdeteksi oleh detection control, atau data yang error yang terdeteksi oleh program validasi, harus ada prosedur yang jelas tentang bagaimana melakukan pembetulan terhadap data yang salah dengan maksud untuk mengurangi kemungkinan kerugian kalau kesalahan / penyalahgunaan tersebut sudah benar-benar terjadi.

Menurut Alvin dkk (2001:290) terdapat empat konsep dasar yang mendasari telaah atas struktur pengendalian internal dan penetapan resiko pengendalian, diantaranya :

- 1) Tanggung jawab manajemen. Manajemen dan bukan auditor yang harus menyusun dan memonitor struktur pengendalian internnya. Konsep ini sesuai dengan ketentuan yang menyatakan bahwa manajemen dan bukan auditor yang bertanggungjawab dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
- 2) Kepastian yang wajar. Suatu perusahaan harus mengusahakan struktur pengendalian intern yang memberikan kepastian yang wajar tetapi bukan mutlak, bahwa laporan keuangan telah disajikan dengan wajar. Struktur pengendalian internal disusun setelah mempertimbangkan baik biaya maupun

manfaat pengendalian tersebut. Sering kali, manajemen enggan untuk menerapkan sistem yang ideal karena mungkin biayanya terlalu tinggi.

- 3) Keterbatasan yang melekat. Struktur pengendalian internal tidak dapat dianggap sepenuhnya efektif, meskipun telah di rancang dan di susun dengan sebaik-baiknya. Bahkan, meskipun sistem yang ideal telah dirancang, keberhasilannya tetap tergantung pada kompetensi dan kehandalan oleh pelaksanaannya. Sebagai contoh, misalkan prosedur perhitungan persediaan telah disusun dengan seksama dan dibutuhkan dua orang karyawan yang harus menghitung secara terpisah. Apabila kedua karyawan yang bertugas tidak memahami petunjuk-petunjuk yang mereka terima atau keduanya bekerja ceroboh, penghitungan persediaan itu pun cenderung tidak benar, manajemen mungkin mengabaikan prosedurnya dan memerintahkan karyawannya untuk menaikkan jumlah perhitungan barang-barang yang telah dibuat, untuk menaikkan laba yang dilaporkan. Sama halnya bila karyawan yang bersangkutan, mungkin dengan sengaja menaikkan jumlah penghitungannya untuk menutupi pencurian barang-barang tersebut oleh salah seorang atau keduanya. Inilah yang disebut persekongkolan.
- 4) Metode pengolahan data. Konsep pengendalian intern berlaku sama dengan sistem manual maupun komputerisasi (EDP). Terdapat perbedaan besar antara sistem manual yang sederhana bagi seluruh perusahaan kecil dan sistem EDP yang sangat rumit untuk perusahaan industry bertaraf internasional. Meskipun demikian, tujuan pengendalian intern adalah sama.

2. Siklus Pendapatan dalam Jasa Perhotelan

1. Siklus Pendapatan

Salah satu praktik penerapan sistem informasi akuntansi di dalam sebuah organisasi adalah siklus pendapatan (*revenue cycle*). Secara garis besar, siklus ini dimulai dari proses penjualan sampai penerimaan kas dari pelanggan (*customer*). Siklus ini dapat membantu manajemen dalam memberikan informasi mengenai tingkat penjualan, batas kredit dari pelanggan, piutang usaha yang belum lunas, membuat analisis kemungkinan piutang usaha yang tak tertagih (*allowance for doubtful account*), hingga kas yang telah terkumpul dari hasil penjualan atau piutang usaha yang sudah dibayar oleh pelanggan.

Romney dan Steinbart (2009) mendefinisikan siklus pendapatan sebagai suatu rangkaian aktivitas bisnis dan informasi proses operasi yang berkaitan, yang berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan serta penerimaan kas dari penjualan yang telah dilakukan sebelumnya. Romney dan Steinbart (2009) juga menjelaskan bahwa ada empat aktivitas bisnis dasar yang dilakukan di dalam siklus pendapatan. Keempat aktivitas bisnis tersebut adalah pencatatan pesanan penjualan (*sales order entry*), pengiriman (*shipping*), penagihan (*billing*) dan penerimaan kas (*cash collection*).

2. Proses dalam Siklus Pendapatan Jasa Perhotelan

Jamaludin (2011) Sistem manajemen hotel atau yang sering disebut *Hotel Management System* (HMS) adalah sebuah program komputer (*hotel software*) bertujuan membantu manajemen hotel dalam kegiatan hotel baik kegiatan sehari-hari maupun laporan-laporan yang diperlukan hotel. Kegiatan itu adalah menerima tamu (*check in*), mendaftarkan tamu (*guest folio*), pembayaran tamu (*guest payment*). Dengan adanya sistem ini diharapkan para tamu mendapatkan pelayanan yang lebih baik (*good of service*).

Karena semakin bagus manajemen suatu hotel dan kemudahan pelanggan untuk mencari informasi tentang hotel tersebut menambah point plus tersendiri. Hasil lain yang dicapai dengan pemakaian sistem manajemen adalah efisiensi dalam operasional sehari-hari hotel. Aliran data yang dihasilkan sistem ini dapat dibagi tiga kategori:

- 1) Level paling atas untuk kebutuhan top manager. Kebutuhan akan data/informasi bersifat jangka panjang, sangat tidak pasti, environmental, perencanaan dan kebijaksanaan dan laporan yang berbentuk ringkas.
- 2) Level menengah untuk middle manager. Kebutuhan akan data/informasi bersifat jangka menengah, relatif lebih pasti, organizational, pelaksanaan kebijaksanaan dan perencanaan taktis, laporan relatif terperinci.
- 3) Level bawah untuk lower manager. Kebutuhan akan data/informasi bersifat jangka pendek, sedikit pasti, departmental, pelaksanaan aktifitas harian dan pemeliharaan, laporan yang terperinci.

Ruang lingkup sebuah sistem manajemen hotel sangatlah luas, tergantung kelengkapan fitur yang disediakan oleh program tersebut. Kelengkapan itu sendiri sangat tergantung pada type/jenis hotel dan struktur organisasi perhotelan. Sistem manajemen hotel harus dapat menangani pekerjaan :

- 1) Pada divisi kamar (*room division*), terutama bagian kantor depan (*front office*) dan bagian tata graha (*housekeeping*).
- 2) Pada divisi accounting (*accounting division*) untuk semua bagian *accounting*.
- 3) Pada divisi restoran dan bar (*bar and restaurant division*).
- 4) Pada divisi marketing (*marketing division*)

- 5) Pada divisi teknisi dan peralatan (*engginering division*)

Tetapi tidak semua sistem manajemen hotel yang ada sekarang mendukung ke 5 pekerjaan di atas, ada beberapa sistem yang hanya mendukung sebagian pekerjaan ataupun ada beberapa sistem yang dapat mencakup lebih dari kelima pekerjaan pokok di atas.

3. Tujuan dan Manfaat Siklus Pendapatan pada Hotel

Tujuan dan manfaat diselenggarakannya siklus pendapatan adalah menukar produk atau jasa menjadi kas. Tujuan ini dapat dirinci menjadi :

- 1) Memudahkan petugas *front office* hotel dalam menangani semua informasi kamar, tamu dan pengunjung hotel, serta membuat laporan rutin yang diperlukan. Penghematan waktu dan tenaga dapat mendorong pelayanan tamu dan pengunjung menjadi lebih maksimal.
- 2) Memudahkan Pengelola/Manajer Hotel dalam mengevaluasi kemajuan penerimaan/pendapatan hotel sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat dan cepat untuk terus meningkatkan pendapatan tersebut dalam bentuk promosi atau pelayanan lainnya.
- 3) Dapat melayani tamu, pengunjung dan pengguna jasa hotel lainnya secara cepat dan memuaskan sehingga menimbulkan image yang baik terhadap hotel Anda sehingga mereka akan kembali lagi ataupun menginformasikan kepada orang lain tentang kepuasan pelayanan yang diterimanya.

METODE PENELITIAN

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pihak Hotel Calista Beach Baubau khususnya dengan bagian yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu bagian *Manager, Accounting, Resepsionis*, dan *Supervisor Restoran*.

- 4) Observasi

Penelitian ini mengadakan pengamatan secara langsung pada tempat penelitian dan mencatat gejala atau fenomena yang diteliti, yang terkait dengan siklus pendapatan.

- 5) Dokumentasi

Dalam penelitian ini mengumpulkan data-data berupa catatan, buku, formulir-formulir yang digunakan hotel serta laporan penjualan kamar dan laporan penjualan restoran.

2. Studi Literatur

Data diperoleh dengan cara mempelajari dan mengaitkan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Langkah ini dipakai sebagai landasan teoritis serta pedoman dalam menganalisa masalah.

3. Kuesioner

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden. Angket diisi oleh responden sesuai dengan yang “dia” kehendaki/ketahui/rasakan.

2. Teknik Alat Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu serangkaian kegiatan penelitian dengan cara mengumpulkan data melalui penelitian dokumen perusahaan yang berhubungan dengan penelitian seperti struktur organisasi, melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian serta mengumpulkan informasi-informasi yang diperlukan melalui buku, literature dan artikel lain yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian mengklarifikasi data-data tersebut berdasarkan kata, fase atau kalimat

lalu diolah untuk menentukan hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penelitian ini. Selanjutnya mempresentasikannya berdasarkan pengamatan peneliti lapangan dan landasan teori yang ada sehingga dapat menghasilkan gambaran umum dari objek yang diteliti (Sugiyono, 2008:105). Adapun analisis deskriptif dalam penelitian ini yaitu untuk melihat pengendalian internal atas siklus pendapatan jasa (studi kasus pada Hotel Calista Beach Baubau) yang disertai kuesioner tersebut :

- 1) Pertanyaan kuesioner tersebut menggunakan skala guttman yang dirancang untuk mendapatkan jawaban tegas yaitu “ya” atau “tidak”, dengan jawaban “ya” mempunyai nilai (1) yang berarti baik dan jawaban “tidak” mempunyai bobot nilai nol (0) yang berarti terdapat kelemahan terkait pengendalian internal siklus pendapatan jasa.
- 2) Memberikan interpretasi atau pemilihan akhir mengenai Penerapan Pengendalian Internal menggunakan rumus perhitungan menurut Sudjana (2001:129).

Jumlah jawaban ya

$$\frac{\text{Jumlah jawaban ya}}{\text{Jumlah jawaban responden}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan di atas baik tidaknya pengendalian internal didasarkan pada kategori presentase berikut ini :

81 % - 100% = baik
 61 % - 80% = cukup baik
 41 % - 60% = kurang baik
 Dibawah 40% = tidak baik

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian menjelaskan mengenai sistem pengendalian internal terhadap siklus pendapatan jasa pada Hotel Calista Beach Baubau, yang mengacu pada empat unsur pengendalian internal yaitu

struktur organisasi, sistem wewenang dan prosedur pencatatan, praktek yang sehat dan karyawan yang mutunya sesuai tanggungjawabnya. Secara keseluruhan hasil presentase dari ke empat unsur pengendalian intern dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6.9. Rekapitulasi tingkat presentase jawaban responden

No.	Indikator	Rata-rata (%)
1	Struktur organisasi	57,8
2	Sistem wewenang dan prosedur pencatatan	80
3	Praktek yang sehat	64,2
4	Karyawan yang mutunya sesuai tanggungjawabnya	100
	Jumlah	302
	Rata-Rata	75,5

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Pada hakekatnya, sistem pengendalian internal yang terdapat pada Hotel Calista Beach Baubau sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat melalui penjelasan unsur pengendalian internal pada Hotel Calista Beach Baubau.

1. Struktur Organisasi

Unsur ini adalah kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok hotel khususnya pada *Front Office* dan *Restaurant*. Struktur organisasi adalah hal dasar bagi unsur pengendalian internal. Oleh karena itu, manajemen harus mengetahui pentingnya pengendalian internal.

Pada dasarnya dalam perhotelan khususnya bagian *Front office* dan *Restaurant*, pemegang peranan tertinggi adalah penanggung jawab dalam hal ini yaitu Manager, namun tidak dipungkiri dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, penanggung jawab membutuhkan karyawan yang ditempatkan

di masing-masing bidang yang sesuai dengan fungsinya masing-masing seperti fungsi penerimaan, fungsi pendapatan, fungsi penjualan, dan fungsi akuntansi, pelimpahan tugas oleh masing-masing karyawan, melakukan kerja sama dengan fungsi lain. Agar aktivitas bagian perhotelan berjalan dengan baik, maka seluruh karyawan hotel harus saling bekerja sama serta tidak adanya rangkap jabatan. Misalnya dalam pelaksanaan tugas masing-masing bagiansudah di bagi berdasarkan keahlian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa presentase tingkat kecenderungan skor jawaban indikator struktur organisasi adalah cukup baik. Hal ini di sebabkan karena item pernyataan yang di siapkan untuk mengukur indikator ini memberikan kecenderungan bahwa struktur organisasi pada Hotel Calista Beach Baubau bagian *Front Office* dan *Restaurant* terlihat cukup baik artinya kategori cukup baik dapat diberikan pada keadaan struktur organisasi yang tercermin, namun masih belum memiliki pemisahan fungsi operasional antara bagian.

2. Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan

Unsur ini telah menjadi sistem dalam organisasi yang mengatur mengenai pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi pendapatan pada bagian *Front Office* dan *Restaurant*, dalam hal ini penggunaan pendapatan yang diterima harus diawasi agar tidak terjadi kecurangan atau kekeliruan.

Prosedur pencatatan juga sangat penting dalam unsur ini, sebab prosedur pencatatan yang baik akan menghasilkan informasi yang dapat dipercaya mengenai kekayaan, hutang, pendapatan dan biaya pada Hotel Calista Beach Baubau.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat presentase kecenderungan skor jawaban indikator sistem wewenang dan prosedur pencatatan adalah cukup baik. Hal ini di sebabkan karena karyawan hotel bagian

Front Office dan *Restaurant* setiap transaksi penerimaan dan pendapatan selalu mengikuti prosedur dan kebijakan yang telah di tetapkan.

3. Praktek Yang Sehat

Unsur ini mencakup aktivitas-aktivitas yang dikaitkan dengan konsep pengendalian internal. Aktivitas-aktivitas ini meliputi penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang, penanggung jawab selalu melakukan pemeriksaan mendadak, selalu di adakan perputaran jabatan, keharusan mengambil cuti bagi karyawan yang berhak serta selalu mengadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatan yang dilakukan staf pemeriksa intern. Dalam hal ini dalam aktivitas pelaksanaan di Instalasi Farmasi untuk pemeriksaan mendadak dari penanggung jawab tidak tegas dilakukan kepada karyawannya. Hal ini dilakukan guna memperkecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan pendapatan pada Hotel Calista Beach bagian *Front Office* dan bagian *Restaurant* akan menunda-nunda pekerjaan pada karyawan tersebut dalam melaksanakan tugasnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat presentase kecenderungan skor jawaban indikator praktek yang sehat adalah cukup baik. Namun, ada sedikit kekurangan untuk pemeriksaan mendadak kurang dilakukan untuk memeriksa pekerjaan karyawannya. Hal ini disebabkan karena pada bagian *Front Office* tidak sepenuhnya menjalankan praktek yang sehat yang menjadi salah satu unsur pengendalian internal.

4. Karyawan Yang Mutunya Sesuai Tanggungjawabnya

Unsur ini merupakan bagian penting dalam manajemen. Manajemen dapat berfungsi dengan baik jika karyawannya memiliki kecakapan serta mengetahui tanggungjawabnya masing-masing. Hasil penelitian ini menun-

jukkan bahwa tingkat presentase kecenderungan skor jawaban indikator karyawan yang mutunya sesuai tanggungjawabnya adalah baik. Hal ini disebabkan karena Hotel Calista Beach Baubau dalam merekrut karyawan selalu melalui prosedur yang benar, karyawannya ditempatkan sesuai dengan keahliannya, serta memberikan pelatihan guna pengembangan pendidikan khususnya tentang pemahaman pengendalian internal. Jika karyawan yang diterima tidak melalui proses seleksi dan tidak diberi pendidikan khususnya pengembangan pengendalian internal, maka karyawan yang menduduki jabatan tidak akan sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan hasil pekerjaannya tidak akan baik untuk hotel. Setelah melihat gambaran beberapa indikator dalam unsur-unsur pengendalian internal yang dipaparkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa keseluruhan indikator menggambarkan keadaan yang memuaskan dalam kaitannya dengan pengendalian internal.

Dari ke empat indikator tersebut dapat di deskripsikan bahwa responden memberikan persepsi secara baik dalam menjawab pertanyaan pada masing-masing indikator untuk melihat pengendalian internal pada Hotel Calista Beach Baubau yang menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap pengendalian internal.

5. Proses Siklus Pendapatan

a. Kamar

Hasil penelitian menunjukan bahwa kesimpulan dari prosedur pendapatan jasa sewa kamar dinilai cukup baik. Dikarenakan bagian penerima tamu atau yang disebut *Front office* sudah melaksanakan tugas yang sesuai prosedur yang telah diberikan oleh pihak hotel.

b. Restaurant

Hasil penelitian menunjukan bahwa kesimpulan dari prosedur pendapatan jasa restaurant dinilai cukup baik. Dikarenakan karyawan di bagian ini sudah melaksanakan tugasnya sesuai prosedur namun masih ada

kekurangan yaitu dalam pembuatan laporan karena masih di alihkan ke bagian *front office*.

Saran

Adapun saran yang dapat peneliti rekomendasikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Diharapkan agar penerapan pengendalian internal atas pendapatan jasa pada Hotel Calista Beach Baubau dilaksanakan dengan lebih baik lagi, sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan jasa terhadap tamu.
- 2) Diharapkan agar dapat memisahkan tugas antara pembuatan laporan pendapatan sewa kamar dan pembuatan laporan pendapatan restaurant agar masing-masing bagian yang terkait dapat melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur kerjanya dan tidak diambil alih oleh satu bagian kerja.
- 3) Diharapkan agar lebih sering melakukan pemeriksaan mendadak terhadap aktivitas karyawan bagian perhotelan dan seluruh karyawan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfan Ikhsan, Ida Bagus Teddy Prianthara. 2008. *Sistem Akuntansi Perhotelan*. Graha Ilmu. Jakarta.
- Arens, Alvin A., James Loebbecke. 2001. *Auditing Pendekatan Terpadu*. Salemba Empat. Jakarta.
- Ayu Dwi Yulianthi. 2011. *Analisis Pengendalian Internal atas Siklus Pendapatan Jasa (Studi Kasus Pada The Wing Ed-Hotel)*. Skripsi. Politeknik Negeri Bali
- Azhar Susanto. 2008. *Sistem Informasi Akuntansi*. Lingga Jaya. Bandung.
- Bambang Sutopo. 2009. *Manajemen Laba dan Manfaat Kualitas Laba dalam*

- Keputusan Investasi.** UPT Perpustakaan UNS. Maret.
- Eka Permana Dewi. 2015. *Pengendalian Internal Atas Siklus Pendapatan Di Nusa Dua Beach Hotel & Spa (Studi Pada Departemen Food & Beverage)*. Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja:Indonesia.
- Hery. 2013. *Akuntansi Dasar 1 dan 2*. Grasindo. Jakarta.
- Iman Santoso. 2006. *Akutansi Keuangan Menengah*. Refika Aditama. Bandung.
- Jamaludin. 2011. *Sistem Manajemen Perhotelan*. www.djamalstiki.wordpress.com/articles. Diakses pada 29 September 2016.
- Krismiaji. 2010. *Sistem Informasi Akuntansi Edisi Ketiga*. UPP STIM YKPN.
- Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Nur Fakhrrur Razy. 2012. *Analisis Pengendalian Internal Atas Siklus Pendapatan Jasa (Studi Kasus Pada Hotel Griyadi Montana Malang)*. Skripsi. Universitas Brawijaya: Malang.
- Romney, Marshall B., and Paul John Steinbart. *Accounting Information Systems 11th Edition*. New Jersey: Pearson Education, 2009.
- Sanyoto Gondodiyoto. 2007. *Audit Sistem Informasi*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Sudjana. 2001. *Metode Statistika*. Edisi Revisi. Tarsito. Bandung
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- William C. Boyton/Walter G.Kell 6ed "Modern Auditing" John Wiley & Sons, Inc. 1995.
- Wilkinson, Joseph W. *Accounting and Information System*. Inc: John Wiley & Sons. (Terjemahan oleh Sinaga, Mariamus. 2012. *Sistem Akuntansi dan Informasi*. Erlangga:Jakarta.
- Wing Wahyu Winarno. 2006. *Sistem Informasi Akuntansi Edisi Kedua*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Wyner, Gordon A. "Customer Selection". *ProQuest Information and Learning Company*. 2000.

PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS, RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KOTA BAUBAU

Litha Nurmitha

(Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unidayan Baubau)

R. Supalal Estihadi

(Dosen Fakultas Ekonomi Unidayan Baubau)

A B S T R A C K

The study aims to determine the Application of Accounting Information Systems Receipts and Expenditures for Inpatient and Outpatient Cash at the Regional Public Service Board (BLUD) of Baubau City Hospital. This study included a qualitative descriptive study with data collection methods, interview guidelines, informants in the study as many as 5 people consisting of Assistant Treasurer of Cash Receipts and Expenditures, Assistant Treasurer for Cash Receipts, Treasurer of Cash Receipts, and Treasurer of Cash Expenditures.

The results of this study indicate that the inpatient and outpatient cash receipts and disbursements system in the BLUD Hospital of Baubau City has been running effectively and efficiently. There is already a clear separation of functions between operational functions, revenue, expenditure and storage functions as well as recording and reporting functions.. Accounting records have guaranteed that all transactions that occur are recorded properly and are supported by supporting documents that have been authorized by the competent authorities. But it proves that from each of the sections in this Financial Section Internal Control has not been effectively carried out, there are still no errors such as Cash Misappropriation or Cash Embezzlement at the BLUD Hospital of Baubau City.. The BLUD Outpatient Service of Baubau City Hospital has been running well by having a pediatric, surgical, physiotherapy, dental, uterine, eye, internal medicine, neurological, ENT, ER, and public services unit. To achieve this, support a good and quality outpatient care system at the BLUD Hospital of Baubau City.

Kata Kunci : *cash receipts and disbursement systems, inpatient services, and outpatient services*

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas, Rawat Inap Dan Rawat Jalan Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Baubau

PENDAHULUAN

Kondisi ekonomi global tetap akan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perekonomian Indonesia dalam lima tahun ke depan. Teknologi komputerisasi yang berkembang dengan pesat memberikan

pengaruh yang sangat besar terhadap sistem informasi dalam suatu organisasi. Sistem akuntansi berbasis komputer serta pemrosesan data telah merupakan bagian yang

tidak dapat dipisahkan, sehingga meningkatkan perhatian terhadap area khusus akuntansi yang dikenal dengan nama sistem informasi akuntansi. Sistem akuntansi berbasis komputer serta pemrosesan data telah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan, sehingga meningkatkan perhatian terhadap area khusus akuntansi yang dikenal dengan nama sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi melakukan hal tersebut entah dengan sistem manual atau melalui sistem terkomputerisasi. Saat ini digital dan informasi online semakin digunakan dalam sistem informasi akuntansi. Organisasi perlu menempatkan sistem di depan, dan mempertimbangkan baik segi sistem ataupun manusia sebagai faktor yang terkait ketika mengatur sistem informasi akuntansi. Sistem pengendalian intern yang diterapkan pada sistem informasi akuntansi sangat berguna untuk mencegah atau menjaga terjadinya hal-hal berupa kesalahan dan kecurangan yang tidak diinginkan.

Menjalankan kegiatan dengan efektif dan efisien, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah sakit umum daerah (RSUD) memerlukan suatu sistem pengolahan data informasi yang mendukungnya. Dengan sistem informasi akuntansi yang memadai diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pengendalian intern pada penerimaan dan pengeluaran kas BLUD RSUD Kota Baubau. Sistem informasi akuntansi melakukan hal tersebut entah dengan sistem manual atau melalui sistem terkomputerisasi. Sistem Informasi Akuntansi juga merupakan sistem yang paling penting di organisasi dan merubah cara menangkap, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi.

Sistem penerimaan dan pengeluaran kas, rawat inap dan rawat jalan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diikuti oleh BLUD RSUD Kota Baubau menggunakan sistem klaim dengan sistem *Casemix*, yaitu dengan tarif *Indonesian-Case*

Based Groups (INA-CBG) (sistem paket). BLUD RSUD Kota Baubau akan mendapatkan pembayaran berdasarkan rata-rata biaya yang dihabiskan oleh untuk suatu kelompok diagnosis. Hal ini berpengaruh pada siklus akuntansi rumah sakit sehari-hari, terutama pada siklus pendapatan.

Melalui pendekatan INA-CBG, BLUD RSUD Kota Baubau berupaya secara konsisten meningkatkan *clinical pathway* agar sesuai dengan INA-CBG. Menurut Tim *Casemix*, *clinical pathway* adalah dokumen perencanaan pelayanan kesehatan terpadu yang merangkum setiap langkah yang dilakukan pada pasien mulai masuk rumah sakit sampai dengan keluar rumah sakit, berdasarkan standar pelayanan medis, standar asuhan keperawatan, dan standar pelayanan kesehatan lainnya yang berbasis bukti yang dapat diukur. Dengan penerapan *clinical pathway* yang mengacu pada pembiayaan INA-CBG, maka dengan mudah dapat diketahui kualitas pelayanan kesehatan, apabila pelayanan kesehatan pada sebuah BLUD RSUD Kota Baubau berkualitas baik, maka dengan sendirinya BLUD RSUD Kota Baubau akan untung, dan begitu pula sebaliknya. Tetapi dalam pelayanan pasien rawat inap dan rawat jalan, terkadang para dokter tidak memberikan pelayanan sesuai dengan *clinical pathway*. Hal ini karena sistem tersebut tidak selalu bisa diterapkan untuk semua penyakit. INA-CBG dengan *clinical pathway* ini hanya bisa diterapkan pada penyakit tertentu. Sehingga para dokter tersebut memberikan pelayanan berupa tindakan aktual dengan *billing system*.

Dalam Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas Rawat inap dan rawat jalan diperlukan adanya prosedur yang baik yang nantinya akan sesuai dengan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang dilakukan di luar prosedur yang telah ditentukan, akan memungkinkan terjadinya penyelewengan,

pencurian dan penggelapan kas. Dapat disimpulkan bahwa semakin baik prosedur penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan pada BLUD RSUD Kota Baubau, maka akan semakin dapat dipercaya besarnya akun kas yang dilaporkan pada laporan keuangan perusahaan tersebut. disamping itu, dengan penerapan prosedur pengelolaan kas yang baik, maka kemungkinan tingkat penyelewengan dan penggelapan kas akan mudah ditelusuri. Begitupula pengeluaran kas, dimana telah diketahui kas adalah masalah yang paling rawan dan resiko hilangnya paling tinggi.

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas, Rawat Inap dan Rawat Jalan Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kota Baubau.

- 1) Bagi Penulis, untuk memperoleh pengetahuan mengenai Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas, Rawat Inap dan Rawat Jalan Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kota Baubau.
- 2) Bagi BLUD RSUD, Memberikan Masukan dan Saran untuk penyempurnaan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Penerimaan Dan Pengeluaran Kas, Rawat Inap dan Rawat Jalan Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kota Baubau.
- 3) Bagi Calon peneliti, dapat memperoleh informasi secara cepat, tepat, dan akurat untuk mengatasi penelitiannya, serta menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Penerimaan Dan Pengeluaran Kas, Rawat Inap dan Rawat Jalan Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kota Baubau.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah suatu fungsi yang melaksanakan tugas pengolahan data finansial menjadi informasi yang dibutuhkan bagi pemakai di dalam maupun di luar perusahaan. SIA bertanggung jawab menyediakan informasi keuangan bagi tiap elemen lingkungan kecuali pesaing. Sehubungan dengan kebutuhan informasi keuangan adalah kebutuhan manajemen level atas sehingga SIA hanya melayani informasi yang berorientasi kepada manajemen level atas tersebut.

Akuntansi adalah suatu sistem informasi, berdasarkan nama pihak-pihak yang berkepentingan dalam usaha mengambil keputusan. Informasi sebagai hasil dari akuntansi dibutuhkan oleh banyak pihak, baik *Intern* maupun *ekstren*. Golongan yang paling bantak tertarik untuk mengetahui informasi keuangan antara lain adalah manajemen, pemegang saham, pegawai, debitur dan kreditur, bank, pemerintah dan pihak lainnya (Lapoliwa, 2011:2).

Akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi adalah “bahasa bisnis” karena melalui akuntansi lah informasi bisnis dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan (Warren, 2014 :3).

1) Unsur-Unsur Sistem Informasi Akuntansi

Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu sistem akuntansi saling berkaitan satu sama lain, sehingga dapat dilakukan pengolahan data mulai dari awal transaksi sampai dengan pelaporan yang dapat dijadikan sebagai informasi akuntansi. Menurut Azhar Susanto (2008:12), terdapat beberapa unsur dalam sistem informasi akuntansi, yaitu : “ a) Sumber daya manusia dan alat ; b) Catatan; c) Informasi atau laporan-laporan.”

Mulyadi (2010:3-5) mengungkapkan bahwa unsur-unsur sistem akuntansi

terdiri atas formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu dan laporan.

- a) Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dokumen, karena dengan formulir ini peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam (didokumentasikan) di atas searik kertas.
- b) Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Dalam jurnal ini, data keuangan untuk pertama kalinya diklasifikasikan menurut penggolongan yang sesuai dengan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan.
- c) Buku besar (*general ledger*) terdiri dari rekening-rekening pembantu yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Rekening-rekening dalam buku besar ini disediakan sesuai dengan unsur-unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan.
- d) Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang terinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. Buku besar dan buku pembantu merupakan catatan akuntansi akhir (*book of final entry*), yang berarti tidak ada catatan akuntansi lain lagi sesudah data akuntansi diringkas dan digolongkan dalam rekening buku besar dan buku pembantu.
- e) Laporan berisi informasi yang merupakan keluaran sistem akuntansi. Laporan dapat berbentuk hasil cetak komputer dan tayangan pada layar monitor komputer. Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan laba yang ditahan, laporan harga pokok produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan, daftar umur piutang, daftar

utang yang akan dibayar, daftar saldo persediaan yang lambat penjualannya.

2) Struktur Sistem Informasi Akuntansi

Adapun struktur sistem informasi akuntansi sebagai sistem relatif tertutup yang terstruktur dalam melaksanakan fungsi pengendalian

2. Fungsi dan Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Dalam mewujudkan sistem akuntansi yang baik, pada dasarnya harus mengetahui pembangun sistem akuntansi itu sendiri, sistem akuntansi erat hubungannya dengan kerjasama manusia dengan sumber daya lainnya didalam suatu perusahaan untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Tujuan sistem akuntansi merupakan suatu tujuan yang berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Dari setiap sistem akuntansi yang terdiri dari berbagai sistem mempunyai tujuan yang sama, sistem akuntansi sendiri dibuat oleh [manajemen](#) dalam mengelola perusahaannya (Dewi Fitriarsari, 2007:12).

Menurut Hall A James yang dialih bahasakan oleh Dewi Fitriarsari (2007:12) fungsi sistem informasi akuntansi adalah :

1. “Pekerjaan yang sifatnya yang berulang dapat diminimalisir.
2. Sistem penyimpanan data menjadi lebih sistematis.
3. Mengurangi tingkat kesalahan.
4. Pekerjaan menjadi lebih mudah karena Sistem Informasi Akuntansi sudah berjalan. Dalam hal ini akuntan hanya melakukan secara *safing* untuk membuktikan bahwa Sistem Informasi Akuntansi sudah berjalan dengan benar.”

Azhar Susanto (2008:8-11), tujuan sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut :

- 1) “Mendukung aktivitas BLUD RSUD sehari-hari.
- 2) Mendukung proses pengambilan keputusan.

- 3) Membantu pengelolaan BLUD RSUD dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada pihak eksternal seperti daftar umur BPJS, anggaran, dan poyeksi arus kas.
- 4) Mengumpulkan dan memasukkan data transaksi ke dalam sistem informasi akuntansi.
 - 5) Mengolah data transaksi.
 - 6) Menyimpan data untuk tujuan di masa mendatang.
 - 7) Memberi pemakai atau pemberi keputusan (manajemen) informasi yang mereka perlukan.
 - 8) Mengontrol semua proses yang terjadi.”

3. Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas

Penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber utama yaitu penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari piutang (Mulyadi, 2001:455).

Penerimaan Kas perusahaan berasal dari dua sumber utama yaitu dari penjualan tunai dan dari piutang. Penerimaan Kas dari penjualan tunai dapat berupa uang tunai *credit card sale slip*, atau cek pribadi (*personal check*). Penerimaan Kas dari piutang dapat berupa cek atau giro.

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan Penerimaan Kas dari Piutang yaitu antara lain :

- (1) Bagian yang terkait Menurut Mulyadi (2001 : 500) bagian yang terkait dalam Penerimaan Kas yaitu :
 - (a) Bagian Sekretariat
Bagian Sekretariat bertanggung-jawab dalam penerimaan cek dan surat pemberitahuan melalui pos dari para debitur. Bagian Penagihan Bagian Penagihan bertanggung-jawab untuk melakukan penagihan kepada debitur berdasarkan daftar piutang yang tertagih yang dibuat oleh bagian Akuntansi.
 - (b) Bagian Kasir

Bagian Kasir bertanggung-jawab atas Penerimaan Cek dari bagian Sekretariat atau bagian Penagihan.

- (c) Bagian Akuntansi / Pembukuan
Bagian Akuntansi / Pembukuan bertanggung-jawab dalam pencatatan Penerimaan Kas dan berkurangnya piutang dalam kartu piutang.
- (d) Bagian Pemeriksa Intern
Bagian Pemeriksa Intern bertanggung jawab dalam pelaksanaan perhitungan kas yang ada di tangan bagian kasir secara periodik.
- (e) Dokumen yang digunakan dalam Penerimaan Kas dari piutang antara lain:
 - (1) Surat Pemberitahuan (Surat pengantar) Dokumen ini dibuat oleh debitur untuk memberitahukan maksud pembayaran yang dilakukan.
 - (2) Daftar Surat Pemberitahuan
Dokumen ini merupakan rekapitulasi penerimaan kas yang dibuat oleh bagian sekretariat atau bagian penagihan.
 - (3) Bukti Setor Bank
Dokumen ini merupakan bukti penerimaan kas yang dibuat oleh perusahaan (pihak Rumah Sakit) bagi para debitur yang telah melakukan pembayaran.
 - (4) Kwitansi
Dokumen ini merupakan penerimaan kas yang dibuat oleh perusahaan (pihak Rumah Sakit) bagi debitur yang telah melakukan pembayaran (Mulyadi, 2001: 489-492).
- d) Unsur Pengendalian Intern
 - (1) Bagian Akuntansi harus terpisah dari bagian Penagihan dan bagian Penerimaan Kas.
 - (2) Bagian Penerimaan Kas harus terpisah dari bagian Akuntansi.
 - (3) Debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas nama atau dengan cara pemindah-bukuan(*Giro Bilyet*).

- (4) Bagian penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar piutang yang harus ditagih yang dibuat oleh bagian Akuntansi.
- (5) Perkreditan rekening pembantu piutang oleh bagian Akuntansi (bagian piutang) harus didasarkan atas surat pemberitahuan yang berasal dari debitur.
- (6) Hasil perhitungan kas direkam dalam berita acara perhitungan kas dan disetor penuh ke bank segera.
- (7) Para penagih dan kasir harus diasuransikan (*Fidelity Bond Insurance*).
- (8) Kas dalam perjalanan (baik yang ada di tangan bagian kasir maupun di tangan penagih perusahaan (Rumah Sakit) harus diasuransikan.

4. Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas

Mulyadi (2008:543), mengungkapkan bahwa pengeluaran kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran baik dengan cek maupun dengan uang tunai yang digunakan untuk kegiatan umum perusahaan.

Pengeluaran kas adalah suatu transaksi yang menimbulkan berkurangnya saldo kas dan bank milik perusahaan yang diakibatkan adanya pembelian tunai, pembayaran utang maupun hasil transaksi yang menyebabkan berkurangnya kas (Soemarso S.R, 2009:297).

5. Rumah Sakit Umum Daerah

Departemen Kesehatan RI menyatakan bahwa rumah sakit merupakan pusat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan medik spesialis, pelayanan penunjang medis, pelayanan perawatan, baik rawat jalan, rawat inap maupun pelayanan instalasi. Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan dapat diselenggarakan oleh pemerintah, dan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Rumah sakit merupakan salah satu dari sarana kesehatan yang juga merupakan tempat menyelenggarakan upaya kesehatan yaitu setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Upaya kesehatan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu serta berkesinambungan.

6. Pelayanan Rawat Inap Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Rawat inap (*opname*) adalah istilah yang berarti proses perawatan pasien oleh tenaga kesehatan profesional akibat penyakit tertentu, di mana pasien diinapkan di suatu ruangan di rumah sakit. Ruang rawat inap adalah ruang tempat pasien dirawat. Ruangan ini dulunya sering hanya berupa bangsal yang dihuni oleh banyak orang sekaligus. Saat ini, ruang rawat inap di banyak rumah sakit sudah sangat mirip dengan kamar-kamar hotel. Pasien yang berobat jalan di Unit Rawat Jalan, akan mendapatkan surat rawat dari dokter yang merawatnya, bila pasien tersebut memerlukan perawatan di dalam rumah sakit, atau menginap di rumah sakit.

Rawat inap adalah pemeliharaan kesehatan rumah sakit dimana penderita tinggal mondok sedikitnya satu hari berdasarkan rujukan dari pelaksanaan pelayanan kesehatan atau rumah sakit pelaksanaan pelayanan kesehatan lain (Patria Jati, 2009). Rawat inap menurut Crosby dalam Nasution (2005) adalah kegiatan

penderita yang berkelanjutan ke rumah sakit untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berlangsung lebih dari 24 jam.

7. Pelayanan Rawat Jalan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Pelayanan rawat jalan merupakan kegiatan pelayanan medis yang berkaitan dengan kegiatan poliklinik (Cecep A, 2012:43). Karena bersifat rawat jalan maka pasien yang berobat hanya jam kerja saja, pasien tidak menginap dirumah sakit. Alur pelayanan pasien yang berkunjung ke poliklinik rawat jalan yaitu mulai dari pendaftaran, menunggu pemeriksaan di ruang tunggu dan mendapatkan pelayanan pemeriksaan/pengobatan di ruang periksa. Kemudian pelayanan pengambilan obat di apotik, pemeriksaan laboratorium ataupun pemeriksaan penunjang lainnya.

Menurut Sabarguna B (2012:96), mengungkapkan bahwa pelayanan rawat jalan fokus pada elemen penting dari segi: pasar; pelayanan; organisasi termasuk pula: sistem pembayaran; sistem pemberian pelayanan; batasan hukum; kepuasan pasien; hasil manajemen; dan status kesehatan masyarakat.

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada BLU RSUD Kota Baubau yang beralamat di jalan Drs. H. La ode Manarfa No.20.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1) Teknik Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung pada obyek yang diteliti sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang dihadapi, dalam hal ini adalah Penerapan Sistem Informasi

Akuntansi penerimaan dan Pengeluaran Kas, Rawat Inap dan Rawat Jalan BLUD RSUD Kota Baubau.

- 2) Teknik dokumentasi, yaitu meneliti dokumen organisasi yang berhubungan dengan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan pengeluaran Kas, Rawat Inap dan Rawat Jalan BLUD RSUD Kota Baubau.
- 3) Teknik Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada Bendahara Pembantu Penerimaan dan pengeluaran Kas, Bendahara Penerimaan Kas, dan Bendahara Pengeluaran Kas BLUD RSUD Kota Baubau.
- 4) Teknik perpustakaan, yaitu mengumpulkan informasi-informasi yang diperlukan melalui buku-buku, literatur-literatur, artikel-artikel. Dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

3. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif kualitatif, yaitu memberi memsistematisir dan bahkan memprediksi makna oleh peneliti atas apa yang menjadi pusat perhatiannya. Mike dan huberman dalam Syofian Siregar (2014) menyebutkan ada 4 langkah pengolahan data kualitatif yakni : reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan keabsahan data.

- 1) Reduksi data (data reduction) adalah proses peneliti melakukan penelitian dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan abstraksi dan transformasi dari data kasar yang diperoleh.
- 2) Penyajian data (Display Data) adalah setelah data direduksi, langkah selanjutnya melakukan penyajian data (data display), setelah direduksi data diarahkan agar terorganisasi tersusun

dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami.

- 3) Verifikasi data (conclusion) adalah langkah selanjutnya menarik kesimpulan berdasarkan teman, dan melakukan verifikasi data dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat keteraturan, konfigurasi yang mungkin ada, dan proporsi.

Keabsahan data pada penelitian kualitatif data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara apa yang dilaporkan oleh peneliti dengan apa sesungguhnya terjadi. Berdasarkan informasi data dari informan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Penerimaan dan Pengeluaran kas rawat inap dan rawat jalan pada BLUD RSUD Kota Baubau sudah benar dan akurat. Dapat dilihat dari 5 orang pegawai yang bekerja sesuai jabatan masing-masing pada BLUD RSUD Kota Baubau dan karakteristik Informan penelitian ini terdiri jenis kelamin ada pria 1 orang dan wanita 5 orang, usia pegawai 30-40 tahun dan <50 tahun, pendidikan SMA dan S1, serta lama bekerja pegawai 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, dan 27 tahun. Uji keabsahan dalam penelitian kualitatif meliputi :

- 1) Uji Kredibilitas / uji validitas internal
Menjelaskan uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan :
 - a) Perpanjangan pengamatan
Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan melakukan pengamatan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru tentang sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, rawat inap dan rawat jalan BLUD RSUD Kota Baubau. Dengan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan nara sumber akan semakin terbentuk rapport, semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak

ada informasi yang di sembunyikan. Bila telah terbentuk rapport, maka telah terjadi kewajiban dalam penelitian dimana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang dipelajari. Berapa lama perpanjangan pengamatan ini dilakukan, akan sangat tergantung pada kedalaman, keluasan, dan kepastian data. Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian tentang tentang sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, rawat inap dan rawat jalan BLUD RSUD Kota Baubau difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh setelah di cek kembali BLUD RSUD Kota Baubau data sudah benar berarti kredibel maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

b) Meningkatkan Ketekunan

Dengan meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan tentang sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, rawat inap dan rawat jalan BLUD RSUD Kota Baubau dengan cara kepastian data dan uraian peristiwa akan direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Dengan demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan diskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti.

c) Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Dan berbagai waktu dengan demikian terdapat triangulasi sumber,

triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

d) Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang daya kepemimpinan direktur BLUD RSUD Kota Baubau, maka pengumpulan data pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke bawahan yang dipimpin, ke atasan yang menugasi sub. Keuangan untuk memberikan data pada peneliti, dan keteman kerja yang merupakan kelompok kerjasama.

(1) Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.

(2) Triangulasi juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari saat nara sumber masih segar belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas, Rawat Inap dan Rawat Jalan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Baubau

Berdasarkan Hasil penelitian ini, Sistem Informasi Penerimaan Kas yang diterapkan BLUD RSUD Kota Baubau mencakup beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1) Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas dan Setara Kas dari Pasien Umum BLUD RSUD Kota Baubau yaitu dimana kasir menerima pembayaran dari pasien

serta menyerahkan hasil penerimaan kepada bendahara penerimaan langsung mencatat penerimaan tersebut di buku kas umum dan membuat laporan penerimaan kas.

2) Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas dan Setara Kas dari Piutang Jasa Layanan Kesehatan ada dua yaitu pasien umum dan pasien non umum yaitu sebagai berikut:

a) Piutang Pasien Umum yaitu timbul karena cut off laporan keuangan, dilakukan melalui kasir membuat kuitansi sebagai tanda bukti penerimaannya pada Bendahara Penerimaan dengan menggunakan Buku catatan Kasir.

b) Piutang Pasien Non Umum yaitu bendahara penerimaan menerima bukti transfer dari pihak penanggung pasien non-umum atau meminta Rekening Koran dari Bank yang menunjukkan adanya penerimaan dari tagihan piutang dan bukti tersebut dicatat oleh bendahara penerimaan ke dalam BKU serta membuat laporan harian penerimaan kas.

3) Penerimaan Kas dan setara kas dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain yaitu Bendahara penerimaan menerima pembayaran tunai transfer dari pihak ketiga dan membuat bukti penerimaan kas sebagai bukti penerimaan kas dari hasil kerja sama dengan pihak lain serta mencatat dalam BKU.

4) Penerimaan Kas dan Setara Kas dari Alokasi Dana APBN dan APBD yaitu Bendahara Pengeluaran mencairkan uang dari alokasi dana APBD/APBN berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mencatatnya dalam BKU setelah lolos verifikasi Kepala Bagian Administrasi, Umum dan Keuangan memberikan persetujuan atas penerimaan tersebut.

- 5) Penerimaan Kas dan Setara Kas dari Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah yaitu bendahara penerimaan menerima pembayaran tunai atau transfer dari Pihak Ketiga dan membuat Bukti penerimaan Kas dan Bank sebagai bukti penerimaan kas dai lain-lain pendapan BLUD dan mencatatnya dalam BKU.

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat dikatakan sistem informasi akuntansi penerimaan kas yang diterapkan pada BLUD RSUD Kota Baubau sudah efektif dan efisien karena telah menjalankan sistem penerimaan kas dan prosedur-prosedur yang ada serta tidak terjadi kesalahan pencatatan pada kasir dalam menyetorkan seluruh Pendapatan BLUD RSUD Kota Baubau secara harian ke bagian Keuangan. Bagian keuangan ini Pengendalian internal belum dijalankan secara efektif tetapi tidak terjadi kesalahan pencatatan seperti tidak terjadinya penyimpangan atau pengelapan kas pada BLUD RSUD Kota Baubau.

Berdasarkan Hasil penelitian ini, Sistem Informasi Pengeluaran Kas yang diterapkan BLUD RSUD Kota Baubau mencakup beberapa hal yaitu sebagai berikut :

- 1) Pengeluaran Kas Untuk Pemberian Uang Muka Kegiatan atau Pembelian Barang/Jasa yaitu Kepala Bagian Administrasi, Umum dan Keuangan menerima nota dinas dari Unit/Bagian/Bidang yang melaksanakan kegiatan untuk permintaan uang muka kegiatan atau pembelian barang dan jasa yang telah disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Unit Pengadaan Barang dan Jasa/ Pejabat Pengadaan.
- 2) Pengeluaran kas untuk membayar kepada pegawai atau pelaksana kegiatan yaitu Bendahara menerima pembayaran unit kerja lain di lingkungan BLUD RSUD Kota Baubau untuk pembayaran kepada pegawai.

- 3) Pengeluaran kas dan setara kas untuk pembayaran kepada Pihak ketiga yaitu Bendahara menerima permintaan pembayaran dari pihak ketiga yang di lampiri Kontrak/SPK, Faktur, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Pemeriksaan Barang/jasa, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Daftar utang jangka pendek/jangka panjang yang sudah jatuh tempo.

- 4) Pengeluaran kas dan setara kas untuk investasi yaitu Bendahra menerima permintaan pembayaran dari unit/Bagian terkait atas jumlah investasi yang akan dilakukan BLUD RSUD disertai Bukti transaksi Pembelian Deposito Bejangka/Saham/Obligasi dan/atau yang lainnya.

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat dikatakan sistem informasi akuntansi pengeluaran kas yang diterapkan BLUD RSUD Kota Baubau sudah efektif dan efisien karena dapat dilihat dari prosedur-prosedur dan sistem pengeluaran kas sudah dijalankan dengan baik yaitu Bagian Keuangan setiap harinya selalu ada pencocokan antara uang kas yang ada di Pembukuan dengan uang kas yang ada di tangan (bagian Keuangan). Apabila terjadi selisih ataupun kesalahan Pembukuan, akan membantu mempermudah pengecekan. Bagian keuangan ini Pengendalian internal belum dijalankan secara efektif tetapi tidak terjadi kesalahan pembukuan ssehingga tidak terjadinya kehilangan kas dan mempermudah pengecekan apabila terjadi salah pembukuan.

Berdasarkan Hasil Penelitian Pelayanan Rawat Inap Rawat inap RSUD Kota Baubau merupakan salah satu pelayanan kesehatan di rumah sakit yang mempunyai kontribusi cukup besar ditinjau dari berbagai aspek, antara lain aspek jenis pelayanan, aspek keuangan, pemasaran, etika dan hukum maupun administrasi dan BLUD RSUD Kota Baubau. Pelayanan rawat inap yang sudah efektif dan efisien terhadap pasien BLUD

RSUD Kota Baubau karena memiliki pelayanan yang baik, baik dari segi ruang dan bangunan, ketenagaan, penerimaan pasien, pelayanan medik, penunjang medik, pelayanan perawatan, pelayanan obat, pelayanan makanan serta administrasi agar pasien merasa puas dan nyaman serta melayani pasien 24 jam.

Berdasarkan Hasil Penelitian Pelayanan Rawat jalan BLUD RSUD Kota Baubau merupakan pelayanan medis kepada seorang pasien untuk tujuan pengamatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya, tanpa mengharuskan pasien tersebut dirawat inap. Keuntungannya, pasien tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menginap (opname). Pelayanan Rawat jalan BLUD RSUD Kota Baubau sudah berjalan dengan baik dengan memiliki unit pelayanan anak, bedah, fisioterapi, gigi, kandungan, mata, penyakit dalam, syaraf, THT, UGD, dan umum. Pelayanan rawat jalan yang sudah efektif dan efisien terhadap pasien BLUD RSUD Kota Baubau karena memiliki penerimaan pasien, pemeriksaan dokter, hak perawatan oleh dokter, serta pemberian informasi untuk mencapainya menunjang sistem pelayanan rawat jalan yang baik dan bermutu pada BLUD RSUD Kota Baubau.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Rawat Inap Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Baubau, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Sistem penerimaan dan pengeluaran kas rawat inap dan rawat jalan Di BLUD RSUD Kota Baubau sudah berjalan dengan efektif dan efisien. Sudah terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi operasional, fungsi

penerimaan, pengeluaran dan penyimpanan serta fungsi pencatatan dan pelaporan. Dokumen yang digunakan dibuat rangkap, bernomor urut tercetak serta terdapat otorisasi oleh pihak yang berwenang. Pencatatan akuntansi telah menjamin bahwa semua transaksi yang terjadi dicatat sebagaimana mestinya dan didukung oleh dokumen pendukung yang telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang.

- 2) Pada saat terjadi kesalahan Pencatatan oleh bagian Kasir, Bagian Keuangan dan bagian Pembukuan, masing-masing bagian ini saling berkoordinasi dan langsung mengadakan koreksi terhadap Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas. Tetapi membuktikan bahwa dari masing-masing bagian dalam Bagian Keuangan ini Pengendalian Intern belum efektif dijalankan, tetap tidak terjadinya kesalahan seperti Penyelewengan Kas atau Penggelapan Kas Pada BLUD RSUD Kota Baubau.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan segala keterbatasan serta kekurangan, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

- 1) Sistem pengendalian intern juga perlu diperhatikan sehingga kegiatan operasional BLUD RSUD Kota Baubau dapat berjalan dengan baik terutama Bagian Keuangan dan bagian Pembukuan, masing-masing bagian ini saling berkoordinasi dan langsung mengadakan koreksi terhadap Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas Rawat Inap dan Rawat Jalan serta tidak terjadi penyelewengan dan penggelapan kas pada BLUD RSUD Kota Baubau.
- 2) Diperlukan aplikasi keuangan Agar mempermudah mencatat transaksi keuangan BLUD RSUD Kota Baubau

seperti mencatat jurnal dan memposting ke buku besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Amida Rahama Pradiptasari. 2010. Skripsi : *Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Instalasi Rawat Inap* RSUD Kabupaten Sukoharjo.
- Anny Isfandyarie. 2006. *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*. Buku 1, Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Aritorang Lerbin R. 2005. *Kepuasan Pelanggan*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2005 : 3.
- Azhar Susanto. *Sistem Informasi Akuntansi Penjualan*, Bandung : Lingga Jaya, 2008 : 12.
- _____, *Sistem Informasi Akuntansi Penjualan*, Bandung : Lingga Jaya, 2008 : 8-11.
- _____, *Sistem Informasi Akuntansi Penjualan*, Bandung : Lingga Jaya, 2013 : 72.
- Dani, Cecep. 2012. *Teknologi Pengelolaan Daur Ulang Sampah*. Yogyakarta : Gosyen Publishing.
- Desi Pakadang. 2013. Skripsi : *Penerapan Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas* Pada Rumah Sakit Gunung Maria Kota Manado.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit*. Jakarta, 2009.
- Dewi Lestari. 2007. *Sistem Informasi Akuntansi*, Buku 2, Edisi ke- 1, , Salemba Empat, Jakarta, 2007 : 12.
- Departemen Kesehatan RI, *Peraturan Kesehatan RI 1997*, dikutip oleh suryanti, Jakarta, 2002.
- Erni Novianti. 2009. Skripsi : *Sistem Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Di Pd. Bkk Susukan Cabang Pabelan Kota Salatiga*.
- Hasbullah Traprany. 2001. *Asuransi Diindonesia*, Depok : Pusat Kajian Ekonomi FKMUI, 2001 : 64.
- Ida, Bagus. 2010. *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan, dan Keluarga Berencana untuk Pendidikan Bidan*, Jakarta : EGC.
- Krismiaji. 2010. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta : UPP.AMP YKPN.
- Lapoliwa. 2011. *Akuntansi Perbankan*. Jakarta : Institut Bankir Indonesia.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*, Edisi ke 3, Cetakan ke 3, Salemba Empat, Jakarta.
- _____. 2008. *Sistem Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat
- _____. 2010. *Sistem Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat
- Narko. 2007. *Sistem Akuntansi*, Edisi Kelima. Yogyakarta : Yayasan Pustaka Nusantara.
- Nugroho Widjajanto. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti : Erlangga.
- Sabarguna, B .S. 2012. *Manajemen Rumah Sakit*. Jilid 2. Jakarta : Universitas Indonesia.

- Sigit Haryanto. 2006. Skripsi : *Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Rumah Sakit Kristen Tayu Kota Semarang*.
- Pahlevi, Wildan. 2009. Skripsi : *Analisis Pelayanan Pasien Rawat Inap di Unit Admisi*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Patricia Mamahit. 2014. Skripsi : *Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas* Pada RSUP Prof. Dr. R. D. Kandau Kota Manado.
- Patricia Jati, Sutopo. 2009. *Beberapa Konsep Dasar Tentang Manajemen Rumah Sakit*. Jakarta.
- Syofian Siregar. 2014. *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kualitatif*. Bumi Aksara. Jakarta.
- S.R.Soemarso. 2009. *akuntansi suatu pengantar*. Edisi Kelima. Jakarta : Penerbit Selemba Empat.
- Tjiptono. 2005. *Prinsip-prinsip Total Quality Service*. Yogyakarta: Andy Offset.
- Warren. 2014. *Accounting Internasional Student Edition*. Thomson, South-Western, Singapore.
- Wijono Djoko. 2009. *Manajemen Program dan Kepemimpinan Kesehatan*. Duta Prima Air Langga.
- Zaki Baridwan. 2009. *Sistem Akuntansi : Penyusunan Prosedur Dan Metode*. Yogyakarta : BPPE.
- Peraturan perundang-undangan :
Undang – Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2008 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1981/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit.
- Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau

ANALISIS PROFITABILITAS PADA PT. RADAR BUTON BAUBAU

Anshar

(Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unidayan Baubau)

R. Supalal Estihadi

(Dosen Fakultas Ekonomi Unidayan Baubau)

A B S T R A C K

This study aims to determine the profitability of PT. Baubau Buton Radar for 2014-2016. The results of this study are expected to be used as input for PT. Baubau Buton Radar in decision making and can provide benefits to academics. This research was conducted at PT. Baubau Buton Radar. The type of data used is qualitative data and quantitative data, and data sources used are primary and secondary data. Data collection methods used were documentation, interviews and literature study. The population and sample of this study are financial reports, and expense reports for the years 2004-2016. The analytical method used is the approach analysis (profitability). Based on the results of the analysis using profitability analysis at PT. Baubau Buton Radar obtained from the Gross Profit Margin (GPM) ratio in 2014 amounted to 55.70% in 2015 amounted to 60.00% in 2016 decreased by 56.39%, Net Profit Margin (NPM) or net profit margin ratio in 2014 amounted to 21.57%, in 2015 amounted to 20.45%, in 2016 there was no increase that is fixed at 20.65%, Return On Equity (ROE) ratio analysis in 2014 amounted to 33.40%, in 2015 amounted to 18.80 %, in 2016 decreased by 18.57%, Return of Investments (ROI) in 2014 this ratio was 17.15%, in 2015 was 14.17%. 2016 did not experience an increase that is fixed at 14.58%, Return On Assets (ROA) in 2014 amounted to 21.91%, in 2015 amounted to 18.77%, in 2016 decreased by 18.44%. Thus PT. Radar Buton Baubau shows that in 2014-2016, in general, the company's financial performance based on profitability analysis was not efficient.

Keywords: *Profitability, Gross Profit Margin (GPM), Net Profit Margin (NPM), Return On Equity (ROE), Return On Investment (ROI), Return On Assets (ROA), expense reports, cash flow statements and financial statements in one period*

Analisis Profitabilitas Pada PT. Radar Buton Baubau

PENDAHULUAN

Media massa cukup memberikan pengaruh besar terhadap kebutuhan informasi, seperti salah satu media massa tradisional/cetak yang pertama muncul yaitu surat kabar atau dalam masyarakat lebih dikenal dengan koran. Surat kabar adalah

media komunikasi massa yang menjangkau khalayak regional, nasional, maupun lokal. Surat kabar nasional yang berhasil menempatkan dirinya di masyarakat, diantaranya Kompas, Media Indonesia dan Jawa Pos. Namun seiring dengan

perkembangan zaman dan kebutuhan informasi yang semakin besar, maka muncullah surat kabar lokal yaitu PT. Radar Buton yang mencakup di wilayah Baubau, Wakatobi, Buton, Bombana, Buton Utara, Buton Tengah, Buton Selatan, dan Kendari.

Kemampuan perusahaan untuk dapat bersaing sangat ditentukan pada kinerja perusahaan itu sendiri. Selanjutnya untuk mengetahui kinerja perusahaan dapat dilihat melalui laporan keuangan dimana laporan keuangan tersebut berisi informasi-informasi yang menyangkut posisi keuangan, hasil usaha dan perubahan posisi keuangan. Akan tetapi dengan melihat laporan keuangan saja belum cukup untuk mengevaluasi kinerja suatu perusahaan. Untuk itu perlu dilakukan analisis atas laporan keuangan sehingga dari hasil analisis tersebut dapat diperoleh gambaran mengenai hasil atau perkembangan usaha perusahaan yang bersangkutan. Disamping itu analisis laporan keuangan juga dapat digunakan untuk mengambil keputusan mengenai kondisi perusahaan secara keseluruhan. Analisis laporan keuangan perusahaan pada dasarnya merupakan perhitungan rasio-rasio untuk menilai keadaan keuangan dimasa lalu, saat ini dan kemungkinannya dimasa depan. Dalam rangka melakukan analisis untuk tujuan pengambilan keputusan, para analisis keuangan menggunakan informasi laporan keuangan.

Munawir (2007:64), mengadakan analisa hubungan dari pos dalam suatu laporan keuangan merupakan dasar untuk dapat mengintrepretasikan kondisi keuangan dan

1. hasil operasi suatu perusahaan. Dengan menggunakan laporan yang dibandingkan, termasuk data tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam jumlah rupiah, presentase serta trendnya, penganalisa menyadari bahwa rasio individu akan membantu dalam menganalisa dan mengintrepretasikan posisi keuangan suatu perusahaan. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan

(*mathematical relationship*) antara suatu tertentu dengan jumlah yang lain dan dengan menggunakan alat analisa berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio perbandingan yang digunakan sebagai standar.

Dengan berbagai persaingan yang ketat, perusahaan diharuskan untuk memajukan usahanya. Oleh karena itu PT. Radar Buton memerlukan analisis profitabilitas. Kondisi keuangan perusahaan dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan seperti neraca, laporan perhitungan rugi laba serta laporan keuangan lainnya. Dengan mengadakan analisis terhadap pos-pos neraca, maka akan dapat diketahui dan diperoleh gambaran tentang posisi keuangannya. Sedangkan analisis terhadap laporan rugi laba akan memberikan gambaran tentang hasil atau perkembangan usaha yang bersangkutan. Dari laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba-rugi dilakukan analisis. Analisis ini menggunakan analisis profitabilitas, dimana *Gross Profit Margin (GPM)* tahun 2014 sebesar 55,70% PT. Radar Buton Baubau.

Tujuan Penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu mengetahui dan menganalisis rasio profitabilitas untuk menilai kinerja keuangan pada PT. Radar Buton Baubau.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu. Pengertian yang sama disampaikan oleh Husnan (2001) bahwa Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profit) pada ting-

kat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Sedangkan menurut Michelle dan Megawati (2005) Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba (profit) yang akan menjadi dasar pembagian dividen perusahaan. Profitabilitas menggambarkan kemampuan badan usaha untuk menghasilkan laba dengan menggunakan seluruh modal yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan pernyataan Shapiro (1991:731). Profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para investor atas investasi yang dilakukan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan dapat menarik para investor untuk menanamkan dananya guna memperluas usahanya, sebaliknya tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para investor menarik dananya. Sedangkan bagi perusahaan itu sendiri profitabilitas dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan badan usaha tersebut. Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu dasar penilaian kondisi suatu perusahaan, untuk itu dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa menilainya. Alat analisis yang dimaksud adalah rasio-rasio keuangan. Rasio profitabilitas mengukur efektivitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang diperoleh dari penjualan dan investasi. Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah badan usaha tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Dengan demikian setiap badan usaha akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu badan usaha maka kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan lebih terjamin.

2. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan

dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (*General Accepted Accounting Principle*). (Fahmi,2012:2). Pemantauan dan evaluasi kinerja keuangan suatu hal penting yang perlu diperhatikan karena adanya jaminan bahwa rencana yang sedang diimplementasikan itu mampu mengantisipasi permasalahan yang timbul pada tahap awal sebelum permasalahan menjadi besar. Oleh karena itu manajer keuangan harus menentukan sarana untuk memantau dan mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. (Mamduh,2007:245). Kinerja secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai perusahaan dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia. (Jumingan,2005:239). Berdasarkan apa yang dinyatakan diatas, kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indicator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas perusahaan.

Penilaian aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana merupakan kinerja keuangan yang berkaitan dengan peran perusahaan sebagai lembaga intermediasi. Adapun penilaian kondisi likuiditas perusahaan guna mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada para deposan. Penilaian aspek profitabilitas guna mengetahui kemampuan menciptakan profit, yang sudah barang tentu penting bagi para pemilik. Dengan kinerja perusahaan yang baik pada akhirnya akan berdampak baik pada intern maupun bagi pihak eksternal perusahaan. Berkaitan dengan analisis kinerja keuangan mengandung beberapa tujuan:

- a) Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan terutama kondisi likuiditas, kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya.
- b) Untuk mengetahui kemampuan dalam mendayagunakan semua asset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien.

3. Laporan Keuangan

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil replikasi dari sekian banyak transaksi uang yang terjadi dalam suatu perusahaan. Transaksi-transaksi dan peristiwa yang bersifat *financial* dicatat, digolongkan dan diringkas dengan cara yang tepat dalam satuan uang dan kemudian diadakan penafsiran untuk berbagai tujuan.

Menurut Kasmir (2012:7) laporan keuangan adalah “laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”. Menurut Subramanyam (2012:79) laporan keuangan adalah “produk proses pelaporan keuangan yang diatur oleh standar dan aturan akuntansi, insentif manajer, serta mekanisme pelaksanaan dan pengawasan perusahaan”.

4. Analisis laporan Keuangan

Analisis keuangan menggunakan data dari laporan keuangan yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi. Akuntansi keuangan biasanya digunakan untuk melihat lebih jauh permasalahan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Analisis laporan keuangan meliputi penelaahan tentang hubungan dan kecenderungan atau trend untuk mengetahui apakah keadaan keuangan, hasil usaha dan kemajuan keuangan perusahaan memuaskan atau tidak memuaskan. Analisis dilakukan dengan mengukur hubungan antara unsur-unsur laporan keuangan dan bagaimana perubahan unsur-unsur laporan keuangan dan bagaimana perubahan unsur-unsur itu dari

tahun ke tahun untuk mengetahui arah perkembangannya.

Bactiar dan Nurwahyu (2008:3) analisis laporan keuangan adalah aplikasi dari alat dan teknik analitis untuk laporan keuangan bertujuan umum dan data data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis bisnis. Harahap (2008:190) analisis laporan keuangan berarti, mengurangi pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih dan melihat hubungan yang bersifat signifikan atau mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kualitatif maupun data non kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. Hanafi dan Halim (2007:71) Memberikan definisi terhadap analisis laporan keuangan adalah menguraikan adanya trend tertentu dalam laporan keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan adalah menelaah tentang hubungan dan kecenderungan atau tren-tren untuk mengetahui bagaimana keadaan keuangan, hasil usaha dan kemajuan perusahaan memuaskan sehingga dapat mengambil keputusan dengan tepat. Kasmir (2008:68) tujuan adanya analisis laporan keuangan secara umum adalah:

- a. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
- b. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
- c. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.
- d. Untuk mengetahui langkahlangkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.

- e. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.
- f. Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

5. Analisis Rasio Keuangan

Mengadakan analisis hubungan dari berbagai pos dalam suatu laporan keuangan adalah merupakan dasar untuk dapat menginterpretasikan kondisi keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan. Dengan menggunakan alat analisis berupa rasio akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran tentang baik atau buruknya posisi keuangan perusahaan. Untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi perusahaan analisis perusahaan memerlukan beberapa tolak ukur. Tolak ukur yang sering dipakai adalah rasio atau indeks yang menghubungkan dua data keuangan yang satu dengan yang lainnya. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan antara satu jumlah tertentu dengan jumlah yang lainnya, dan dengan menggunakan alat analisis berupa rasio ini akan dijelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisis tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan. Prastowo dan Julianty (2005:56) analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan utama untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa datang. Sedangkan menurut Hanafi dan Halim (2007:91) analisis rasio adalah analisis yang disusun dengan menggabungkan gabungan angka angka dalam dan antara neraca dan laporan laba rugi. Harahap (2008:218) mendefinisikan analisis rasio keuangan adalah perbandingan antara pos pos

tertentu dengan pos lain yang memiliki hubungan signifikan.

METODE PENELITIAN

1. Lokasi dan Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan PT. Radar Buton yang beralamat di Jl. Sipanjonga No.29, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum Kota Baubau.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan sebagai bahan untuk penulisan skripsi ini, penulis menggunakan cara sebagai berikut :

1) Pengamatan langsung (Observasi)

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung pada obyek yang diteliti sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang dihadapi dalam hal ini di kantor PT. Radar Buton.

2) Metode Wawancara

Teknik wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung mengenai bagaimana kinerja keuangan khususnya pada manager keuangan PT. Radar Buton.

3) Metode Dokumentasi

Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data laporan keuangan perusahaan PT. Radar Buton Baubau yang berhubungan dengan penelitian ini.

4) Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengumpulan data yang bersumber dari literatur, internet, atau hasil penelitian terdahulu yang diperoleh dari perpustakaan yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian terkait.

3. Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Analisis secara kuantitatif dilakukan dengan menggunakan rasio profitabilitas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan PT. Radar Buton berdasarkan analisis profitabilitasnya selama tiga tahun terakhir (2014-2016), maka berdasarkan analisis laporan keuangan perusahaan PT. Radar Buton dilakukan pembahasan sebagai berikut:

1. Gross Profit Margin

Gross Profit Margin merupakan persentase laba kotor dibandingkan dengan penjualan. Semakin besar Gross Profit Margin semakin baik keadaan perusahaan.

Rasio pada tahun 2014 sebesar 55,70% dan pada tahun 2015 sebesar 60,00% artinya mengalami peningkatan sebesar 4,30%. Dan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 3,61% yaitu dari 56,39%. Angka tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan biaya dalam memproduksi baik dari tahun ke tahun. Dengan kata lain, harga pokok produksi relatif semakin meningkat.

2. Net Profit Margin

Net profit margin atau margin laba bersih adalah merupakan keuntungan penjualan setelah menghitung biaya dan pajak penghasilan. Margin ini menunjukkan perbandingan laba bersih dengan penjualan. Semakin tinggi Net Profit Margin, semakin baik operasi suatu perusahaan.

Rasio pada tahun 2014 sebesar 21,51% kemudian pada tahun 2015 sebesar 20,45%, sehingga tidak mengalami peningkatan. Dan ini menunjukkan penurunan sebesar 1,12%. Kemudian pada tahun 2016 rasio sebesar 20,65% yang artinya

mengalami kenaikan sebesar 0,20%. Hal ini menunjukkan bahwa biaya-biaya mengalami penurunan dari tahun ke tahun yang menyebabkan tingginya margin laba.

3. Profit Margin Return On Equity

Return on equity merupakan suatu pengukuran dan penghasilan yang tersedia bagi para pemihak maupun perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan. Semakin tinggi return atau penghasilan yang diperoleh semakin baik keadaan perusahaan.

Pada tahun 2014 rasio mengalami penurunan sebesar 14,60% yang dapat dilihat dari 33,40% (2014) menjadi 18,80% (2015). Pada tahun 2016 rasio menjadi 18,57% yang artinya mengalami penurunan sebesar 0,23%.

Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2014-2016 perusahaan dalam mengelola modal kurang efektif. Dan usaha-usaha yang perlu dilakukan oleh perusahaan antara lain menurunkan beban dan biaya operasi. Oleh karena perlu dipertimbangkan untuk tetap konsisten dalam usaha-usaha pemasaran untuk meningkatkan volume penjualan dan memperluas pangsa pasar.

4. Return On Investment

Return On Investment merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Semakin tinggi rasio ini semakin baik keadaan perusahaan.

Pada tahun 2014 rasio ini sebesar 17,15% sedangkan pada tahun 2015 rasio ini mengalami penurunan menjadi 14,17%. Hal ini disebabkan karena laba bersih mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 rasio tidak mengalami peningkatan yaitu tetap 14,58%.

Angka rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dibandingkan total investasi tidak terlalu mengalami perubahan yang berarti. Namun Return Of Investment merupakan salah satu

rasio kunci yang biasa digunakan dalam bisnis.

5. Return On Asset

Return On Asset merupakan suatu pengukuran dan penghasilan yang tersedia bagi para pemihak maupun perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan. Semakin tinggi return atau penghasilan yang diperoleh semakin baik keadaan perusahaan.

Pada tahun 2014 rasio mengalami penurunan sebesar 3,14% yang dapat dilihat dari 21,91% (2014) menjadi 18,77% (2015). Pada tahun 2016 rasio ini tidak mengalami peningkatan yaitu tetap 18,44% . Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2014 - 2016 perusahaan dalam mengelola aktiva kurang efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dengan menggunakan rasio profitabilitas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara umum kinerja keuangan perusahaan berdasarkan analisis profitabilitasnya belum efisien.
2. Kinerja keuangan perusahaan belum efisien disebabkan terjadinya penurunan masing – masing dalam tiga tahun pada Return On Assets yaitu 3,14% dan 0,33%, Return On Equity yaitu 14,60% dan 0,23%, sedangkan Gross Profit Margin, Net Profit Margin dan Return On Investment artinya tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat mengemukakan sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, perusahaan harus berusaha meningkatkan tingkat profitabilitasnya

terutama pada Return On Assets dan Return On Equity yaitu dengan jalan menekan pengelolaan aktiva dan pengelolaan modal secara efisien.

2. Perusahaan sebaiknya mempertahankan pengelolaan biaya-biaya dan aktiva agar tetap cermat dan efisien, dengan demikian kemampuan perusahaan untuk meningkatkan profitabilitasnya pada masa akan datang akan lebih baik. Untuk mencapai sasaran dan tujuan, perusahaan harus didukung dengan sistem pencatatan akuntansi dan perencanaan - perencanaan yang baik, serta peningkatan strategi dalam memasarkan koran agar dapat meminimalkan pemakaian dalam biaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah,M.Faisal, 2005. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, edisi kedua, Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Alghiffari, Nasrudin. 2009. “*Analisis Pengaruh Profitabilitas Industri, Rasio Leverage Keuangan Tertimbang dan Pangsa Pasar terhadap ROA Perusahaan Yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index*”. Skripsi.
- Atmajaya, Lukas Setia. (2004), *Teori dan Praktik Manajemen Keuangan*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Bactiar, M. dan Nurwahyu. 2008. *Manajemen Keuangan (Finance Management)*. Cetakan Kedua. Galila Indonesia. Bogor.
- Brigham, E.F., Ehrhardt, M.C. (2005), *Financial Management Theory And Practice*, Eleventh Edition, South Western Cengage Learning, Ohio.
- Darsono, Azhari. 2005. *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan*. Andi. Yogyakarta.

- Eduardus Tandelilin. 2002. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio* : Edisi 3. Yogyakarta : BPFI.
- Eduardus Tandelilin. 2003. *Portofolio dan Investasi*. 1st. Yogyakarta: UGM.
- Fahmi, Irham. (2011). *Analisis Laporan Keuangan*. Lampulo: ALFABETA.
- Fahmi, Irham. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan Ke-2. Bandung: Alfabeta.
- Gibson, Charles H, 2001. *Financial Reporting And Analysis Using Financial Accounting Information*, Eight Edition, South Western College Publishing, Ohio.
- Hadi, Sutrisno. 2002. *Statistik* Jilid 2. Yogyakarta : ANDI.
- Mamduh Hanafi. 2007. *Manajemen Keuangan*. Cetakan Pertama. Penerbit BPFE: Yogyakarta.
- Mamduh Hanafi dan A. Halim. 2007. *Analisis Laporan Keuangan. Edisi Ketiga*. UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri, 2008, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Harahap, Sofyan Syafri. (2009). *Analisis Kritis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Jumingan. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Kasmir. 2008. *Analisis Laporan Keuangan*. Penerbit PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Kasmir. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Michelle dan Megawati. 2005. *Tingkat Pengembalian Investasi Dapat Diprediksi Melalui Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage*. Kumpulan Jurnal Ekonomi_com.
- Mulyadi, 2001, *Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat dan Rekayasa*, Edisi Ketiga. Salemba Empat. Jakarta.
- Munawir, S, 2000, *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta : Liberty
- Munawir, S. 2002. *Analisa Laporan Keuangan*. edisi keempat. Cetakan ketiga belas, Liberty, Yogyakarta.
- Munawir, S. 2004. *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Ke-4, Liberty, Yogyakarta. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2004. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Jakarta: Salemba Empat.
- Munawir, S. 2007. *Analisa Laporan Keuangan*. Edisi Ketujuh. Cetakan Ketiga Belas. Liberty. Yogyakarta.
- Agus Sartono. 2012. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Edisi Keempat. Cetakan keenam. Yogyakarta:BPFE.
- Munawir, S. (2010). *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Prastowo, D. dan R. Juliaty. 2005. *Analisis Laporan Keuangan (Konsep dan aplikasi)*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. UPP.AMP. YKPN. Yogyakarta.
- Putra, Canggih Dwi Reza. 2010. “*Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham di Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI)*”. Skripsi.
- Sangkala, H. Abd. Aziz. 2008.”*Analisis Kinerja Keuangan berdasarkan Rasio Profitabilitas pada Perusahaan*

- Pabrik Roti Tony Bakery Pare-Pare**". Skripsi.
- Savitri. 2012. "**Analisis Pengaruh ROA, NPM, EPS dan PER Terhadap Return Saham**". Skripsi.
- Shapiro, 1991. **Business Marketing Strategy** : Concepts and Application. Irwin, Chicago.
- Sodikin, Slamet Sugiri & Bogat Agus Riyono, 2014, **Akuntansi Pengantar 1**, edisi kesembilan, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Suad Husnan, 2001, **Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas**, Edisi Ketiga, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Subramanyam, John J.Wild. (2012). **Analisis Laporan Keuangan** Buku 2 (10th ed). Jakarta: Salemba Empat.
- Syahyunan, 2004. **Manajemen Keuangan I (Perencanaan, Analisis dan Pengendalian Keuangan)**, USU Press, Medan.
- Van Horne, James C. Dan M.Jhon Wachowicz, 2005. **Prinsip-Prinsip Manajemen keuangan**, Diterjemahkan oleh Aria Farahmita, Amanugrani, dan Taufik Hendrawan, edisi kedua belas, PT.Salemba Empat, Buku Satu, Jakarta.
- Warsosno, 2003, **Manajemen Keuangan Perusahaan**, Edisi Ketiga, Malang: Bayu Media Publishing.
- Wijaya. 2004. "**Pengaruh Net Profit Margin terhadap Return On Investment (ROI) Pada PT. Pupuk Kujang Cikampek Karawang**". Skripsi

PENGARUH FUNDAMENTAL MAKROEKONOMI DAN RISIKO SISTEMATIS TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA

Hardin

(Dosen Fakultas Ekonomi Unidayan Baubau)

A B S T R A C K

Macroeconomic factors that can directly effect the performance of the stock and the company's performance, are domestic interest rates, foreign exchange rates, international economic conditions, the country's economic cycle, inflation rates, tax regulations and the amount of money in circulation. The aims of the research were to analyze (1) the influence of macroeconomic factors (inflation, interest rates, exchange rates, economic growth) on systematic risk (beta stocks) and financial performance (ROA), and (2) the effect of systematic risk (beta stocks) on financial performance (ROA). The data used in this were obtained from Indonesia Stock Exchange, Statistics Central Bureau, and financial performance of Indonesia Bank during the observation period of 2010 to 2014. The samples consisted of 115 Manufacturing Company selected using purposive sampling method. The data were analyzed using path analysis with the help of SPSS program version 21. The results of the research indicate that inflation, interest rates, and exchange rates, economic growth variabel have a positive effect on systematic risk. Inflation, interest rates, exchange rates, have a negative effect on financial performance (ROA), while economic growth has a positive effect on financial performance. Systematic risk (beta stocks) has a negative affect on financial performance (ROA).

Keywords: *macroeconomic, systematic risk, financial performance.*

Pengaruh Fundamental Makroekonomi Dan Risiko Sistematis Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi dunia antar negara semakin terkait erat. Keterkaitan tersebut disebabkan oleh transaksi yang melibatkan pasar barang dan pasar uang sehingga menciptakan saling ketergantungan antar negara yang semakin besar. Siklus ekonomi suatu negara yang berpengaruh besar dalam perdagangan dunia akan menyebabkan pengaruh kepada negara lain, khususnya partner bisnis utama. Mekanisme transmisi siklus ekonomi suatu negara ke negara lain, dapat di

jelaskan melalui jalur perdagangan barang dan jalur keuangan.

Kondisi makro ekonomi suatu negara merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan yang ada di negara tersebut. Faktor makro ekonomi yang secara langsung dapat mempengaruhi kinerja saham maupun kinerja perusahaan antara lain tingkat suku bunga domestik, kurs valuta asing, kondisi perekonomian internasional, siklus ekonomi

suatu negara, tingkat inflasi, peraturan perpajakan dan jumlah uang beredar (Samsul, 2008).

Faktor fundamental makro dalam istilah analisis pasar modal disebut dengan faktor fundamental negara, faktor ini tidak dapat dikendalikan perusahaan. Faktor fundamental makro meliputi faktor-faktor: (1) ekonomi, (2) sosial, budaya, demografi dan lingkungan, (3) kekuasaan politik, pemerintahan, dan hukum, (4) teknologi, dan (5) persaingan (David, 2003). Meskipun demikian, penelitian ini hanya membatasi pada faktor fundamental

makro ekonomi dengan indikator inflasi, tingkat bunga, kurs dan pertumbuhan ekonomi, karena faktor ekonomi merupakan faktor yang paling banyak mendapatkan perhatian dari para pelaku pasar modal.

Faktor ekonomi, atau yang sering disebut sebagai faktor fundamental makroekonomi. Faktor-faktor tersebut meliputi inflasi, tingkat bunga, kurs dan pertumbuhan ekonomi, faktor ini bersifat *uncontrollable* sehingga tidak dapat dikendalikan perusahaan. Saat ini faktor ekonomi makro Indonesia selama lima tahun terakhir terjadi fluktuatif (tabel 1).

Di samping faktor-faktor tersebut, maka risiko sistematis juga merupakan faktor yang dimasukkan dalam model yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Risiko sistematis merupakan risiko yang ditimbulkan sebagai dampak dari perubahan-perubahan faktor eksternal, seperti perubahan inflasi, tingkat bunga, kurs dan pertumbuhan ekonomi (Brigham & Houston, 2006).

Inflasi merupakan proses dari kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus (Nopirin, 2000). Laju inflasi yang tinggi akan mendorong kenaikan harga bahan baku dan meningkatkan berbagai biaya

operasi perusahaan, menyebabkan harga jual barang meningkat dan menurunkan daya beli masyarakat. Hal ini berdampak pada turunnya penjualan perusahaan, sehingga keuntungan dan kinerja keuangan perusahaan mengalami penurunan.

Suku bunga merupakan harga dari pinjaman (Sunariyah, 2006). Tingkat suku bunga yang tinggi tentu sangat memberatkan operasi perusahaan yang ingin melakukan investasi baru, terutama bagi perusahaan yang memiliki rasio pinjaman yang tinggi, karena terancam tidak mampu melunasi hutang-hutangnya, sehingga berdampak pada jatuhnya kinerja keuangan perusahaan.

Inflasi, tingkat bunga, dan kurs yang tinggi akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun, dan sebaliknya inflasi, tingkat bunga, dan kurs yang rendah akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat (Mankiw, 2010). Kemampuan sesuatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya (Sadono, 2008).

Pengamatan awal terhadap 20 saham unggulan perusahaan manufaktur yang *listed* di BEI menunjukkan fenomena yang menarik, karena sebagian besar hubungan antara variabel makro ekonomi dan resiko sistematis, terhadap kinerja keuangan (ROA) perusahaan adalah berfluktuasi (tabel 2). Selanjutnya, ada perbedaan hasil penelitian antara Dwipartha (2012), menemukan bahwa faktor ekonomi makro berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan sektor manufaktur sedangkan Sudyatno (2010), menemukan variabel-variabel makro ekonomi (inflasi, kurs, tingkat bunga, dan pertumbuhan ekonomi) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Jalil (2008), menyatakan bahwa indikator makro ekonomi (GDP, nilai tukar rupiah dan suku bunga riil) secara bersama-sama mempengaruhi kinerja keuangan, akan tetapi hanya GDP yang menjelaskan pengaruh tersebut secara signifikan.

Purnama dkk (2013), menemukan bahwa makroekonomi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap harga saham, sedangkan Halim (2013), menemukan bahwa makroekonomi (inflasi, SBI rate dan GDP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROE dan ROA).

Berdasarkan uraian dan hasil empiris di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan-perusahaan *go public* di

Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor makroekonomi (inflasi, suku bunga, nilai tukar, pertumbuhan ekonomi) terhadap risiko sistematis (*beta saham*) dan kinerja keuangan (ROA).

BAHAN DAN METODE

Lokasi dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Manufaktur yang *listed* di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan tahun 2010 sampai dengan 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kausalitas yaitu menganalisis hubungan antara variabel independen yaitu fundamental makro ekonomi (inflasi, suku bunga, kurs dan pertumbuhan ekonomi) dengan variabel intervening yaitu risiko sistematis (Beta Saham) dan variabel dependen yaitu kinerja keuangan yang di-proksikan dengan *Return On Asset* (ROA).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2014 sebanyak 141 perusahaan. Sedangkan untuk data penelitian merupakan *pooling data* yaitu gabungan antara deret waktu (*time series*) dan *cross section* selama kurun waktu 2010 sampai dengan tahun 2014. Sampel pada penelitian ini diambil dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* dengan kriteria tertentu yaitu: Perusahaan yang selalu *listed* dan menyajikan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia dan secara konsisten tidak pernah masuk *black list* Bursa Efek Indonesia serta sahamnya aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian.

Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu metode yang dilakukan dengan melakukan klarifikasi dan

kategorisasi bahan-bahan tertulis berhubungan dengan masalah penelitian yang mempelajari dokumen-dokumen/data yang diperlukan, dilanjutkan dengan pencatatan dan perhitungan. Data deokumentasi tersebut berupa laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdiri atas neraca, laporan laba rugi dan laporan perhitungan rasio keuangan serta data inflasi, suku bunga, kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika, pertumbuhan ekonomi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia.

Motode Analisis Data

Metode analisis data adalah Analisis Jalur dengan bantuan SPSS 21. Analisis jalur merupakan teknik statistik untuk menguji hubungan kausal antara dua atau lebih variabel berdasarkan persamaan linear. Langkah pertama dalam analisis jalur adalah pengembangan model berbasis teori yang dibuat dalam bentuk diagram. Setelah dituangkan dalam model kerangka teoritis (Gambar 1), maka model dapat mulai dikonversikan ke dalam persamaan struktural. Adapun persamaan struktural yang dapat dibangun adalah sebagai berikut:

$$Y_1 = \beta_{11}X_1 + \beta_{12}X_2 + \beta_{13}X_3 + \beta_{14}X_4 + \zeta_1 \dots\dots\dots(1.1)$$

$$Y_2 = \beta_{21}X_1 + \beta_{22}X_2 + \beta_{23}X_3 + \beta_{24}X_4 + \beta_{25}Y_1 + \zeta_2 \dots\dots\dots(1.2)$$

Dimana :

β_{11} = Koefisien jalur Inflasi terhadap Risiko Sistematis

β_{12} = Koefisien jalur Suku Bunga terhadap Risiko Sistematis

β_{13} = Koefisien jalur Kurs terhadap Risiko Sistematis

β_{14} = Koefisien jalur Pertumbuhan Ekonomi terhadap Risiko Sistematis

β_{21} = Koefisien jalur Inflasi terhadap Kinerja Keuangan

β_{22} = Koefisien jalur Suku Bunga terhadap Kinerja Keuangan

β_{23} = Koefisien jalur Kurs terhadap Kinerja Keuangan

β_{24} = Koefisien jalur Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan

β_{25} = Koefisien jalur Risiko Sistematis terhadap Kinerja Keuangan

$\zeta_{1,2}$ = error term pada persamaan 1,2

HASIL PENELITIAN

Hipotesis 1: Hasil Uji hipotesis pada tabel 3 menunjukkan bahwa koefisien jalur makroekonomi yaitu inflasi terhadap risiko sistematis sebesar 0,031 dengan nilai signifikansi $0,011 < 0,05$, suku bunga terhadap risiko sistematis sebesar 0,226 dengan nilai signifikansi $0,031 < 0,05$, kurs terhadap risiko sistematis sebesar 8,763 dengan nilai signifikansi $0,004 < 0,05$ dan pertumbuhan ekonomi terhadap risiko sistematis sebesar 0,756 dengan nilai signifikansi $0,304 > 0,05$. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa inflasi, suku bunga, kurs dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap risiko sistematis (*beta saham*) dapat diterima.

Hipotesis 2: Hasil Uji hipotesis pada tabel 3 menunjukkan bahwa koefisien jalur inflasi terhadap kinerja keuangan sebesar -0,006 dengan nilai signifikansi $0,597 > 0,05$, suku bunga terhadap kinerja keuangan sebesar -0,044 dengan nilai signifikansi $0,040 < 0,05$, kurs terhadap kinerja keuangan sebesar -1,553 dengan nilai signifikansi $0,038 < 0,05$, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan sebesar 0,022 dengan nilai signifikansi $0,532 > 0,05$. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan (*ROA*) diterima.

Hipotesis 3: Hasil Uji hipotesis pada tabel 3 menunjukkan bahwa koefisien jalur risiko sistematis (*beta saham*) terhadap

kinerja keuangan sebesar -0,034 dengan nilai signifikansi $0,044 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis kesembilan yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan (*ROA*) dapat diterima.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis, inflasi berpengaruh positif terhadap risiko sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa jika inflasi naik, maka risiko sistematis meningkat dan hasil ini juga memberikan variasi bahwa kenaikan inflasi akan meningkatkan risiko sistematis, sehingga inflasi dapat digunakan untuk memprediksi maupun menjelaskan risiko sistematis. Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus (Nopirin, 2000). Inflasi merepresentasikan sektor moneter, karena berkaitan dengan jumlah uang beredar di masyarakat.

Hasil temuan ini konsisten dengan penelitian Wibowo (2012), yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap risiko sistematis. Namun hasil penelitian ini kontradiksi dengan temuan penelitian Sudiyatno (2010), yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap risiko sistematis.

Suku bunga berpengaruh positif signifikan terhadap risiko sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa, jika suku bunga naik, maka risiko sistematis juga meningkat serta penelitian ini memberikan variasi bahwa tingkat bunga dapat digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan risiko sistematis. Manajemen sebaiknya lebih memperhatikan pergerakan tingkat bunga pada periode mendatang, karena tingkat bunga adalah yang paling penting di antara variabel-variabel makroekonomi. Hal ini disebabkan karena tingkat bunga adalah harga yang menghubungkan masa kini dan masa mendatang.

Hasil temuan ini tidak konsisten dengan penelitian Eduardus (1997), menemukan bahwa *interest rate* berpengaruh

positif tetapi tidak signifikan terhadap *systematic risk*. Namun mendukung penelitian Sudiyatno (2010), yang menyatakan bahwa tingkat bunga berpengaruh signifikan terhadap risiko sistematis.

Kurs berpengaruh positif terhadap risiko sistematis. Hal ini berarti, bahwa jika kurs naik, maka risiko sistematis meningkat dan hasil penelitian ini memberikan variasi bahwa kurs dapat digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan risiko sistematis. Kurs dalam penelitian merepresentasikan sektor luar negeri, karena kurs terjadi akibat dari perbedaan inflasi di luar negeri dan di dalam negeri. Jika inflasi di luar negeri lebih tinggi dari inflasi di dalam negeri, maka kurs turun atau nilai rupiah naik terhadap dolar, dan sebaliknya kurs naik jika inflasi di luar negeri lebih rendah dari inflasi di dalam negeri.

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap risiko sistematis. Hal ini berarti bahwa, jika pertumbuhan ekonomi naik, maka risiko sistematis menurun. Suatu negara dengan GDP per orang yang tinggi memiliki tingkat kemakmuran yang tinggi dibandingkan dengan negara yang GDP per orangnya rendah. Namun demikian, GDP yang tinggi tidak menjamin kebahagiaan seluruh penduduk suatu negara, tetapi mungkin, merupakan resep kebahagiaan terbaik yang ditawarkan oleh para ahli makroekonomi (Mankiw, 2010).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Robiatul & Hamzah (2006), menyatakan bahwa kurs berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *beta* saham. Namun kontradiksi dengan hasil penelitian Sudiyatno (2010), yang menyatakan bahwa kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap risiko sistematis.

Berdasarkan hasil analisis inflasi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar inflasi, maka kinerja keuangan menurun dan hasil penelitian ini juga memberikan pemahaman empirik bagi manajemen bahwa

menurunnya inflasi menyebabkan peningkatan kinerja perusahaan. Artinya jika terjadi kenaikan inflasi, maka kinerja perusahaan (ROA) akan menurun. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Wibowo (2012), menyatakan bahwa inflasi memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan dan nilai perusahaan.

Suku bunga berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Hal ini memberikan variasi bahwa suku bunga dapat digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan kinerja keuangan dan hasil penelitian ini juga memberikan pemahaman empirik bagi manajemen bahwa jika tingkat suku bunga naik, maka kinerja perusahaan menurun. Kondisi ini terjadi karena laba perusahaan terlihat tidak stabil dengan nilai mean yang positif, akibatnya jika tingkat bunga naik, kinerja perusahaan akan menurun. Hal ini berarti bahwa sebagian besar perusahaan-perusahaan yang diobservasi menghasilkan kinerja perusahaan yang menurun.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Suryanto (1998), dalam penelitiannya menemukan bahwa tingkat bunga deposito dollar US, Singapura dan Yen Jepang berpengaruh signifikan terhadap harga saham (IHSG). Tetapi kontradiksi dengan hasil penelitian Eduardus (1997), menemukan bahwa *interest rate* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap *systematic risk*.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kurs berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, hasil penelitian ini memberikan variasi bahwa suku bunga dapat digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan kinerja keuangan, dan hasil pengujian ini tidak mendukung argumentasi teori investasi, bahwa jika kurs turun, maka kinerja keuangan meningkat.

Hasil penelitian ini memberikan pemahaman empirik bagi manajemen bahwa jika kurs turun, maka kinerja perusahaan

menurun. Kondisi ini terjadi karena laba perusahaan terlihat stabil dengan nilai koefisiennya positif, akibatnya meskipun tingkat bunga naik, kinerja perusahaan juga naik.

Kebijakan manajerial dalam konteks ini lebih diarahkan pada pengendalian transaksi impor dan menggali potensi pasar domestik untuk mengurangi ketergantungan dari luar negeri. Namun demikian menjaga stabilitas laba yang berkelanjutan melalui kebijakan *earning management* juga dapat dilakukan untuk menambah kepercayaan para pelaku bursa. Agar jika terjadi perubahan kurs tidak akan menimbulkan keresahan pada para pelaku bursa, karena stabilitas laba yang berkelanjutan memberikan ekspekasi laba di masa depan

Hasil penelitian ini kontradiksi dengan penelitian Sudjono (2002), menemukan bahwa nilai tukar (kurs) berpengaruh negatif terhadap harga saham. Tetapi hasil ini mendukung hasil penelitian Suryanto (1998), menemukan bahwa kurs \$ US dan Yen Jepang berpengaruh signifikan terhadap harga saham (IHSG). Sedangkan Robiatul & Hamzah (2006), menemukan bahwa kurs dan GDP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *beta* saham.

Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, hal ini bahwa jika pertumbuhan ekonomi naik, maka kinerja keuangan juga meningkat dan hasil penelitian ini juga memberikan pemahaman empirik bagi manajemen bahwa jika terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi, maka kinerja perusahaan cenderung meningkatkan. Kondisi ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Manajemen pada umumnya melihat pertumbuhan ekonomi sebagai prospek jangka pendek dan panjang. Sehingga dampak yang ditimbulkan dari pertumbuhan ekonomi adalah dapat dirasakan pada masa depan.

Hasil penelitian ini mendukung temuan yang diungkapkan oleh Sudiyatno (2010), yaitu pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan penelitian Halim (2013), juga menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi (GDP) tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Risiko sistematis berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan (ROA). Hal ini memberikan pemahaman empirik bagi manajemen bahwa jika risiko sistematis naik, maka kinerja perusahaan menurun. Kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja perusahaan (ROA) sebagai hasil implementasi dari kebijakan perusahaan besar kecilnya dipengaruhi oleh volatilitas kondisi pasar. Kondisi pasar yang relatif stabil akan membuat kinerja perusahaan meningkat, karena manajemen dapat menjalankan kebijakan yang telah ditetapkannya dengan baik.

Hasil temuan ini kontradiksi dengan yang dikemukakan oleh Sudiyatno (2010), yang menemukan hubungan positif dan tidak signifikan antara risiko sistematis dan kinerja keuangan yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA) dan temuan ini juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2013), yang menyatakan bahwa risiko sistematis berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: inflasi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan (*Return On Asset*). Suku bunga berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, kurs berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan selanjutnya pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan risiko sistematis berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Dari hasil penelitian ini investor hendaknya memperhatikan informasi terhadap perubahan yang terjadi pada faktor-faktor

ekonomi makro seperti nilai tukar Rupiah/US Dollar karena sesuai dengan hasil penelitian ini memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan sehingga melemahnya nilai tukar Rupiah/US Dollar akan memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan (ROA) perusahaan terutama pada perusahaan yang masih mengimpor bahan baku dan memiliki pinjaman luar negeri dalam bentuk dollar.

DAFTAR PUSTAKA

- Brigham E.F. & Houston, J.F. (2006). *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- David F.R. (2003). *Strategic Management: Concepts*, Ninth Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 07458.
- Dwipartha N.M. (2012). *Pengaruh Faktor Ekonomi Makro Dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia*, Internet. e-mail: withadwipartha@yahoo.com.
- [Eduardus T. \(1997\).](#) *Determinants of Systematic Risk: The Experience of Some Indonesian Common Stock*, Kelola, Gadjah Mada University Business Review, No. 16/VI/1997
- Gudono. (1999). *Penilaian Pasar Modal Terhadap Fluktuasi Bisnis Real-Estate*. Kelola, No. 20/VIII/1999.
- Halim C. (2013). *Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Kinerja Perusahaan di Indonesia Pasca Merger dan Akuisisi*, Jurnal Finesta Vol. 1 No. 2 pp 24-29.
- Jalil A. (2008) *Pengaruh Makro Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk*, Universi-

- tas Indonesia, <http://lon-tar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=120065&lokasi=lokal>
- Mankiw N.G. (2010). *Macroeconomics* 7th Edition. First Published in the US by Worth Publishers, New York and Basingstone. Jakarta: Edisi Indonesia, Penerbit Erlangga.
- Mudrajad K. (1996). *Manajemen Keuangan Internasional: Pengantar Ekonomi dan Bisnis Global*. Yogyakarta: PBF UGM.
- Nopirin. (2000). *Ekonomi Moneter*, Buku Dua, BPFE, Yogyakarta.
- Purnama S., Wiksuana B., & Mustanda K. (2013). *Pengaruh Kinerja Makro Ekonomi terhadap Kinerja Industri dan Kinerja Keuangan Perusahaan serta Return Saham perusahaan Perbankan*. Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis dan Kewirausahaan Vol. 7 No. 1
- Robiatul A. & Hamzah A. (2006). *Analisa Karakteristik Perusahaan, Industri dan Ekonomi Makro Terhadap Return dan Beta Saham Syariah di Bursa Efek Jakarta*. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.
- Sadono S. (2008). *Pengantar Teori Makroekonomi*. Edisi ketiga Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Samsul M. (2008). *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, Erlangga, Jakarta.
- Sudiyatno B. (2010). *Peran Kinerja Perusahaan dalam Menentukan Pengaruh Faktor Fundamental Makroekonomi, Risiko Sistematis dan Kebijakan Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan* (Disertasi). Semarang : Universitas Diponegoro.
- Sudjono. (2002). *Analisis Keseimbangan dan Hubungan Simultan Antara Variabel Ekonomi Makro Terhadap Indeks Harga Saham di Bursa Efek Jakarta dengan Metode VAR (Vector Autoregression) dan ECM (Error Correction Model)*, Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen, Vol. 2. No. 3, pg. 81-97.
- Sunariyah. (2006). *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Edisi Kelima UPP STIM
- Suryanto. (1998). *Pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito dan Kurs Mata Uang Asing Terhadap IHSG di Bursa Efek Jakarta*, Duta Kompas No. 19.
- Wibowo A. (2012). *Peran Kinerja Perusahaan dan Risiko Sistematis dalam Menentukan Pengaruh Inflasi terhadap Nilai Perusahaan*, Jurnal Media Ekonomi dan Manajemen, Vol. 26 No. 2.

PENGARUH RISIKO KREDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA

Rasit

(Dosen Fakultas Ekonomi Unoidayan Baubau)

ABSTRACT

Business competition is very tight demands of regional development banks to constantly improve its performance in order to gain the trust of the public and the banking system as a whole. This research aimed to analyze: (1) The effect of the Non-Performing Loans on the financial performance (Return On Assets). The data used in the research were obtained from the financial reports published by Bank Indonesia and the Annual Report of each Regional Development Bank in Indonesia during the observation period from 2009 through 2014. The total samples compared 26 Regional Development Banks which were chosen using the census (saturated samples) method. The analysis technique used was the path analysis aided by SPSS version 21 program. The research results revealed that the variable of the Non-Performing Loan had a negative effect on the financial performance (ROA).

Keywords : Credit risk, financial performance

Pengaruh Risiko Kredit Terhadap Kinerja Keuangan Bank Pembangunan Daerah di Indonesia

PENDAHULUAN

Dunia perbankan adalah salah satu jenis usaha yang syarat akan risiko. Salah satu risiko terbesar yang dihadapi oleh perbankan adalah risiko kredit. Hal ini mengingat bahwa resiko ini dapat menimbulkan gejala meluasnya pengaruh berantai yang memicu terjadinya *liquidity risk* yang merupakan *systemic credit risk* pada seluruh jajaran perbankan (Ali, 2006; Fahmi, 2011). Bank dengan risiko kredit yang tinggi harus membuat penyisihan penghapusan aset, dimana hal ini akan menyebabkan inefisiensi biaya, kualitas aset yang lebih rendah dan pertumbuhan bank yang lebih rendah (Rumelt, 1992). Lebih lanjut Peningkatan *Non Performing Loan* akan menyebabkan pendapatan dan laba menurun sehingga kinerja bank juga

mengalami penurunan (Purwanto dalam Attar *et al.*, 2014).

Salah satu kelompok bank yang turut berperan dalam menggerakkan perekonomian nasional terutama perekonomian daerah adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD). Dikatakan demikian karena BPD sebagai pemegang kas daerah dalam kegiatannya berfungsi melakukan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha kecil dan kredit mikro. Saat ini, kegiatan pengembangan bisnis Bank Pembangunan Daerah khususnya selama enam tahun terakhir menunjukkan tren positif (tabel 1).

Pada tahun 2010 dan 2013, peningkatan jumlah kredit yang diberikan dari tahun sebelumnya memicu meningkatnya NPL, namun peningkatan NPL tersebut tidak diikuti dengan penurunan ROA. Bahkan ROA tahun

2010 dan 2013 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sebaliknya ditahun 2011 peningkatan jumlah kredit yang diberikan tidak memicu kenaikan NPL, NPL justru mengalami penurunan yang diikuti dengan adanya penurunan ROA.

Sejumlah penelitian tentang pengaruh risiko kredit terhadap kinerja keuangan di sektor perbankan menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Attar *et al* (2014), menemukan hubungan negatif dan signifikan antara risiko kredit dan kinerja keuangan yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA). Sedangkan Dewanti (2009), menemukan risiko kredit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank.

Berdasarkan uraian di atas dan beberapa hasil temuan yang kontradiktif (*gap* penelitian) berkenaan dengan konteks pengaruh risiko kredit terhadap kinerja keuangan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis: Pengaruh risiko kredit (*Non Performing Loan*) terhadap kinerja keuangan (*Return on Asset*) Bank Pembangunan Daerah di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Risiko Kredit

Secara umum risiko keuangan perbankan yang digunakan terdiri dari *liquidity risk*, *credit risk*, *solvency risk*, dan *interest rate risk* (*word bank*). Dalam penelitian ini risiko kredit digunakan sebagai indikator risiko karena dari beberapa risiko keuangan tersebut hasil riset menyebutkan bahwa risiko yang terbesar yang dialami perbankan adalah risiko kredit (Fahmi, 2011). *Basel Committee on Banking Supervision* (1999), mendefinisikan risiko kredit sebagai potensi peminjam bank atau *counterparty* akan gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Risiko kredit ditunjukkan dengan besaran *Non Performing Loan* (NPL) yaitu jumlah aktiva non produktif dibagi dengan total kredit yang diberikan bank. Semakin

tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar yaitu kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet (Siamat, 2004).

Bank Indonesia memberikan pedoman perhitungan *Non Performing Loan* (NPL) melalui Surat Edaran BI No. 3/30DPNP tanggal 14 Desember 2001, sebagai berikut:

$$\text{Non Performing Loan (NPL)} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}}$$

Kinerja Keuangan

Memon *et al.* (2012), menyatakan kinerja adalah kualitas dari setiap perusahaan yang dapat dicapai dengan hasil yang membanggakan. Sedangkan Fahmi (2011), menyatakan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Dalam penelitian ini kinerja keuangan diukur dengan menggunakan *Return on Assets* (ROA) hal ini mengacu pada Bank Indonesia yang menyatakan bahwa dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya ROA karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat (Dendawijaya, 2009). Lebih khusus menurut Gilbert (Syofyan, 2003) ukuran profitabilitas yang tepat dalam menilai kinerja industri perbankan adalah *Return on Assets* (ROA).

Menurut Surat Edaran BI No. 3/30DPNP tanggal 14 Desember 2001, ROA diukur dari perbandingan antara laba sebelum pajak terhadap rata-rata total

aset (total aktiva). Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - Rata Total Aset}}$$

Risiko kredit terhadap Kinerja Keuangan

Siamat (2005) menyatakan bahwa risiko kredit didefinisikan sebagai risiko yang dikaitkan dengan kemungkinan kegagalan klien membayar kewajibannya atau risiko dimana debitur tidak dapat melunasi hutangnya. Selanjutnya Ali (2006), mendefinisikan Risiko kredit sebagai kemungkinan terjadinya kerugian bank sebagai akibat dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan bank kepada debitur maupun *counter-party* lainnya. Peningkatan kredit bermasalah tersebut menyebabkan pendapatan dan laba menurun, sehingga *Return On Asset* (ROA) juga mengalami penurunan (Purwanto dalam Attar *et al.*, 2014).

Puspitasari (2009), Attar *et al.* (2014) menemukan risiko kredit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewanti (2009), Ponco (2008), Mas'ud *et al.* (2013), mereka menemukan bahwa risiko kredit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank. Menurut mereka, risiko kredit yang diukur dengan NPL tidak dapat menjelaskan perbedaan dalam perubahan kinerja keuangan yang ditunjukkan oleh *Return On Asset*. Hal ini menunjukkan bahwa risiko kredit yang lebih rendah (NPL) tidak mampu secara konsisten meningkatkan *Return on Assets*. Lebih lanjut peningkatan *Return on Asset* tidak ditentukan oleh risiko kredit yang lebih rendah, melainkan ditentukan oleh efektivitas yang tinggi dari pemanfaatan aset dan keuntungan efisiensi.

Gambar 1.
Model Kerangka Teoritis Penelitian

BAHAN DAN METODE

Lokasi dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia dengan periode pengamatan tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kausalitas yaitu menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini akan menganalisis hubungan antara variabel independen yaitu risiko kredit (*Non Performing Loan*) dengan variabel dependen yaitu kinerja keuangan (*Return On Asset*).

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Pembangunan Daerah yang ada di Indonesia yang berjumlah 26 bank. Sampel pada penelitian ini diambil dengan menggunakan metode *sensus* (sampling jenuh), dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu metode yang dilakukan dengan melakukan klarifikasi dan kategorisasi bahan-bahan tertulis berhubungan dengan masalah penelitian yang mempelajari dokumen-dokumen/ data yang diperlukan, dilanjutkan dengan pencatatan dan perhitungan. Data dokumentasi tersebut berupa laporan keuangan tahunan Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia yang terdiri atas neraca, laporan laba rugi dan laporan perhitungan rasio keuangan.

Motode Analisis Data

Metode analisis data adalah Analisis Regresi Linear Sederhana dengan bantuan SPSS 21. Adapun persamaan regresi linear sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Dimana :

Y = Kinerja Keuangan

a = Konstanta (Nilai Y apabila X = 0)

b = Koefisien regresi risiko Kredit

X = Risiko Kredit

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh risiko kredit terhadap kinerja keuangan. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi linear sederhana. Adapun hasil analisis antar variabel penelitian (tabel 2) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hasil Uji hipotesis pada Tabel 2 menunjukkan bahwa koefisien regresi risiko kredit terhadap kinerja keuangan sebesar - 0,111 dengan nilai signifikansi $0,004 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa risiko kedit (*NPL*) berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan (*ROA*) dapat diterima.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis, Risiko Kredit (*NPL*) berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan (*ROA*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar *Non Performing Loan* (*NPL*) maka *Return On Asset* (*ROA*) yang diperoleh akan semakin kecil. Peningkatan *Non Performing Loan* (*NPL*) akan mempengaruhi profitabilitas bank, karena semakin tinggi *Non Performing Loan* (*NPL*) maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, dan oleh karena itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan

operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap penurunan laba (*ROA*) yang diperoleh bank.

Hasil temuan ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Siamat (2004), yang menyatakan bahwa semakin tinggi rasio *Non-performing loan* (*NPL*) maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar yaitu kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet. Lebih lanjut Purwanto dalam Attar *et al* (2014), menyatakan bahwa peningkatan kredit bermasalah tersebut menyebabkan pendapatan dan laba menurun, sehingga *Return On Asset* (*ROA*) juga mengalami penurunan. Temuan ini juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Attar *et al* (2014), yang menemukan hubungan negatif dan signifikan antara risiko kredit dan kinerja keuangan yang diukur dengan *Return On Asset* (*ROA*).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa risiko kredit (*Non Performing Loan*) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan (*Return On Asset*) Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Dari hasil penelitian ini manajemen Bank Pembangunan Daerah di Indonesia diharapkan untuk lebih meningkatkan kemampuan manajemen risiko, terutama risiko kredit dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian guna mencapai kinerja keuangan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Masyhud. (2006). Manajemen Risiko: Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Attar Dini, Islahuddin, & Shabri M. (2014). *Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 3, No. 1pp. 10- 20
- Dendawijaya, Lukman. 2009. *Manajemen Perbankan*. Edisi Kedua. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Dewanti W. H. (2009). *Analisis Pengaruh Perubahan NPM, LDR, NPL Dan BOPO terhadap Perubahan Laba (Studi pada Bank Devisa dan Bank Non Devisa Periode Juni 2004 – Juni 2007)*. Tesis, Program Pascasarjana Diponegoro
- Fahmi Irham. (2011). *Manajemen Risiko. Teori, Kasus dan Solusi*. Bandung: Alfabeta
- Mas'ud, Muchlis Subroto, Bambang, Salim Ubud, & Sutrisno. (2013). *Risk, Corporate Strategy, Capital Structure and Financial Performance: Empirical Evidence of Bank Listed inIndonesia Stock Exchange*. International Journal of Business and Management Invention, Volume 2 Issue 5. PP.27-39
- Memon, F., Bhutto,A., & Abbas, G. 2010. *Capital Structure and firm's performance: A case of Textile sector Pakistan*. Asian Journal of Business and Management Science, 9(1), 9-15.
- Puruwita Dita, Murdayanti Yunika, & Indriani Susi. (2013). *The Determination Of Probability : The Effect Of Capital Structure, Asset Growt, And Price Earning On Market Value*. International Conference on Business and Mangement. Chiang Mai, Bangkok
- Puspitasari, Diana. (2009). *Analisis Pengaruh CAR, NPL, PDN, NIM, BOPO, LDR, DAN Suku Bunga SBI terhadap ROA (Studi Pada Bank Devisa di Indonesia Periode 2003-2007)*. Tesis, Fakultas Ekonomi Diponegoro
- Rumelt R.P. (1992). *Diversification Strategy and Profitability, Strategic Management Journal*, Vol 3, 350-369.
- Siamat Dahlan. (2004). *Manajemen Lembaga Keuangan*. FE Universitas Indonesia, Jakarta.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 3 tahun 2001 tentang pedoman perhitungan Rasio keuangan perbankan*. 2001. Bank Indonesia
- Syofyan, Sofriza. 2003. "Keputusan "Go Public"dan Hubungannya dengan Kinerja Bank-Bank Swasta di Indonesia", Jurnal Media Riset Bisnis & Manajemen. Vol. 3, No. 1

PENGARUH PENERAPAN *E-FILLING* DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIBPAJAK PADA KPP PRATAMA BAUBAU

Jumnal Yatowanto

(Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unidayan Baubau)

Sulhan Manaf

Dosen Fakakultas Ekonomi

A B S T R A C K

This study aims to analyze the effect of the application of e-filing and taxpayer awareness on taxpayer compliance at the Pratama Baubau Tax Service Office (KPP). The results of this study partially show that the application of the e-filing system has a positive and significant effect on taxpayer compliance. This is evidenced by the value of the regression coefficient of 0.175 which has a positive direction and a significance value of $0.011 < 0.05$. Partially, taxpayer awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance. This is evidenced by the value of the correlation coefficient of 0.701 which has a positive direction and a significance value of $0.000 < 0.05$. The results of this study simultaneously show that the application of e-filing and taxpayer awareness has a significant effect on taxpayer compliance. This is evidenced by the significance value of $0.000 < 0.05$. The coefficient of determination R^2 is 0.408 or 40.8%, which means that the effect of e-filing and taxpayer awareness on taxpayer compliance is 40.8%

Keywords : *Application of the E-filing System, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance.*

Pengaruh Penerapan E-Filling Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Baubau

PENDAHULUAN

Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak berasal dari kontribusi Wajib masyarakat kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang harus dibayar. Saat ini pemerintah masih mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Pada tahun 2017 pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.498,9 triliun dari total target penerimaan negara sebesar 1.750 atau ekitar 85% dari total penerimaan negara (www.kemenkeu.go.id). Sejak tahun 1983, pemerintah Indonesia telah menerapkan reformasi dibidang perpajakan

secara menyeluruh, salah satu yang merupakan bagian dari reformasi administrasi di bidang perpajakan adalah pendirian kantor-kantor pelayanan pajak pratama dimana dalam salah satu fungsinya memberikan pelayanan dan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan untuk memaksimalkan penerimaan perpajakan. Kemudian sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan Negara Indonesia telah menganut *self assessment system* dimana para wajib pajak berhak untuk menghitung sendiri berapa jumlah iuran pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Sistem ini aktif diterapkan dalam suatu negara apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*)

yang ada pada diri masyarakat telah terbentuk (Darmayanti, dalam mutikasari, 2007). Supaya system tersebut dapat berhasil dibutuhkan kesadaran, kejujuran, dan keinginan Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan *database* Kantor Pajak Pratama Baubau sampai dengan september 2017 jumlah Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Baubau adalah

71.137 Wajib Pajak, dari jumlah tersebut sampai dengan September 2017 wajib pajak bayar hanya mencapai 7.537 Wajib Pajak, jumlah ini hanya 9,44% dari jumlah wajib pajak terdaftar. Pada tahun 2015 Badan Pusat Statistik Kota Baubau merilis hasil survei mengenai jumlah penduduk Kota Baubau yang bekerja dan menerima penghasilan sebanyak 65.292 orang dan jika dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak Bayar yaitu sebanyak 7.537 maka angka tersebut masih memprihatinkan. Berdasarkan data tersebut maka pemerintah harus lebih gencar melakukan sosialisasi mengenai manfaat pajak sebagai pondasi negara dan berusaha menyediakan kemudahan-kemudahan dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak salah satunya dengan memanfaatkan media elektronik. Telah menjadi fakta yang diketahui umum, bahwa sektor swasta saat ini umunya selangkah lebih maju dalam pemanfaatan jaringan media elektronik bila dibandingkan dengan pemerintah sendiri. Hal ini menjadi tantangan bagi Direktorat Jendral Pajak, bagaimana mengimbangi sektor swasta dalam hal kecepatan dan efisiensi pemanfaatan jaringan media elektronik.

Oleh karena itu untuk menjawab tantangan di atas dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jendral pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan. Gunadi dalam Abdul Rahman (2010:210) menyatakan bahwa reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu reformasi

kebijakan pajak berupa regulasi atau peraturan perpajakan seperti undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi yang dirancang berdasarkan fungsi, tidak lagi menurut seksi-seksi berdasarkan jenis pajak, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative* dan *compliant center* untuk menampung keberatan Wajib Pajak. Sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis *e-system* seperti *e-SPT*, *e- Filing*, *e-Payment*, dan *e-Registration* yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif yang ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan

tugas dan pelaksanaan *good governance*. Kemudian untuk menerapkan perubahan administrasi perpajakan maka pemerintah melalui keputusan Direktur jendral Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk pelaporan pajak yaitu *e-filing* (Ketentuan pajak.go.id).

E-filing merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui system *online* yang *real time* kepada Direktorat Jendral Pajak melalui Penyedia Jasa Aplikasi dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT. *E-filing* dapat meminimalkan biaya dan waktu karena hanya dengan menggunakan komputer yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari

dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya kepada Petugas Pajak (www.pajak.go.id).

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan

TINJAUAN PUSTAKA

1. Perpajakan

Terdapat bermacam macam pengertian dan definisi pajak, namun pada hakekatnya maksud dan tujuan dari pajak itu seragam. Menurut pasal 1 Undang Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian menurut Soepono Soemahamidjaja dalam Erly Suandy (2005) pajak merupakan iuran yang bersifat Wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan norma norma hukum, yang digunakan untuk menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Andriani dalam Abdul Rahman (2010) pajak adalah iuran dari masyarakat kepada negara yang dapat di paksakan dan terutang oleh pihak yang wajib membayarnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

2. Akuntansi Pajak

Menurut Agoes dan Trisnawati (2009 :7) akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Akuntansi pajak tidak memiliki Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak

kepatuhan wajib pajak (Agus Nugroho, 2006). Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang- Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara.

hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak, wajib pajak dapat dengan lebih mudah menyusun Surat Pemberitahuan (SPT).

Menurut Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 29 dan Pasal 4 Ayat 4, Pembukuan adalah suatu proses pencatatan dilakuka secara teratur utnuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolahan dan penyerahan barang/jasa yang diakhiri dengan menyusun laporan keuangan berupa Neraca dan Laba Rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Laporan Neraca dan Laporan Laba Rugi tersebut wajib dilampirkan dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan akhir tahun. Sementara itu, pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan yang dikenakan pajak yang bersifat final.

3. E-filing

Menurut peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-01/PJ/2014, e-filing adalah suatu cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian menurut Sugiarto dan Wahyono (2005: 2) mengatakan bahwa e-filing adalah Kearsipan atau filing adalah suatu bentuk pekerjaan tata usaha yang berupa penyusunan dokumen-dokumen secara sistematis sehingga bilamana diperlukan lagi, dokumen-dokumen itu dapat ditemukan kembali secara cepat.

E-filing dijelaskan oleh Gita (2010) sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun Badan melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga Wajib Pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual.

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA, Jln. Be-teombari No. 33-35, Baubau. Adapun objek penelitian ini adalah Penerapan E-filling, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan sebagai berikut :

- 1) Studi Lapangan, yaitu dilakukan dengan cara membagikan kuesioner.
- 2) Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku dan literatur, Peraturan perundang undangan, hasil penelitian terdahulu dan bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data digunakan untuk menentukan hasil penelitian. Sebelum menentukan hasil penelitian maka setiap variabel diberi skor dengan menggunakan *skala likert*, yaitu untuk mengukur Kepatuhan Wajib Pajak, Penerapan *E-filing* dan

Kesadaran Wajib Pajak dimana setiap variabel memiliki indikator-indikator yang nantinya akan di tanyakan kepada responden.

Teknik analisis data dalam penelitian ini juga menggunakan analisis data kualitatif yaitu dengan menganalisis secara deskriptif data atau tanggapan responden berdasarkan kuesioner yang diajukan berdasarkan tabel 4.2, sehingga dibuat pengklasifikasian mengacu pada ketentuan yang dikemukakan oleh husein umar (2013:48) dimana rentang skor diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rentang skor} = \frac{\text{Skor tertinggi} - \text{Skor terendah}}{\text{Jumlah klsifikasi}}$$

Keterangan:

Skor tertinggi = Jumlah responden x Bobot tertinggi
Skor terendah = Jumlah responden x Bobot terendah

Dalam penelitian ini jumlah responden yang diteliti adalah sebanyak 98 Wajib Pajak, sehingga diperoleh rentang skor sebagai berikut:

$$\text{Skor tertinggi} = 98 \times 4 = 392$$

$$\text{Skor tertinggi} = 98 \times 1 = 98$$

$$RS = \frac{392-98}{4} = 73,5$$

Rentang pengklasifikasian sebagai berikut:

- a) Sangat tidak baik = $98 + 73,5 = 171,5$ maka rentang klasifikasi sangat tidak baik adalah 98 s/d 171,5.
- b) Tidak baik = $171,6 + 73,5 = 245,1$ maka rentang klasifikasi tidak baik adalah 171,6 s/d 245,1.
- c) Baik = $245,2 + 73,5 = 318,7$ maka rentang klasifikasi baik adalah 245,2 s/d 318,7.
- d) Sangat baik = $318,8 + 73,5 = 392,3$ maka rentang klasifikasi adalah 318,8 s/d 392,

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil analisis korelasi Berganda

Berdasarkan uji korelasi berganda menunjukkan bahwa Terdapat hubungan yang kuat antara penerapan *e-filing* dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai korelasi sebesar 0,639 berada diantara 0,60-0,799 yang berarti bahwa jika penerapan *e-filing* dan kesadaran Wajib Pajak meningkat maka kepatuhan Wajib Pajak juga meningkat. Pembinaan dalam penerapan *e-filing* agar semakin baik sehingga dapat muaskan Wajib Pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. Hasil analisis determinasi

Berdasarkan uji korelasi diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,408 atau 40,8% artinya penerapan *e-filing* dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh atau berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sebesar 40,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor faktor lain sebesar 59,2% yang tidak dimasukan dalam penelitian ini. Penerapan *e-filing* dan kesadaran Wajib Pajak hanya merupakan dua dari beberapa hal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak seperti yang dikemukakan dalam situs www.pajak.go.id adalah besarnya penghasilan, sanksi perpajakan, persepsi penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas, perlakuan perpajakan yang adil, penegakan hukum dan database.

1. Penerapan *E-filing* (X_1) Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan uji secara parsial bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan hal

ini di buktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,011 < 0,05$ dan H_a diterima. Nilai koefisien regresi sebesar 0,175 yang memiliki arah yang positif menunjukkan bahwa semakin baik penerapan *e-filing* maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang memiliki arti bahwa semakin baik penerapan *e-filing* maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak masyarakat dan dampaknya signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sari Nurhidayah (2015) mengenai pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan internet sebagai variabel pemoderasi pada KPP Pratama Klaten. Dalam penelitian Sari Nurhidayah terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hadi Purnomo dalam Marcus Taufan Sofyan (2005) mengenai strategi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak pada poin ke dua yang mengatakan bahwa meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang sudah patuh supaya dapat mempertahankan atau meningkatkan kepatuhannya. *E-filing* merupakan bentuk pelayanan pajak yang modern dengan kecepatan dan kemudahan dalam menyampaikan SPT.

Hasil penelitian ini juga mendukung teori yang di kemukakan oleh Agus Nugroho Jatmiko (2006) mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat kebenaran menghitung dan memperhitungkan, ketepatan menyeter, serta mengisi dan memasukan surat pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak, maka diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Jadi dengan penerapan *e-filing* maka SPT bisa dilaporkan dengan mudah dan

cepat sehingga kepatuhan Wajib Pajak diharapkan dapat meningkat.

Penerapan *e-filing* adalah salah satu upaya pemerintah untuk menyediakan sarana bagi masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakan kapan saja dan dimana saja dengan cepat dan mudah, dengan kemudahan dan manfaat yang dirasakan masyarakat akan menumbuhkan rasa puas dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Jadi dengan penerapan *e-filing* yang semakin baik yang dilakukan oleh pemerintah maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

2. Kesadaran Wajib Pajak (X_2) Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan uji secara parsial bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan hal ini di buktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan H_a diterima. Nilai koefisien regresi sebesar 0,701 yang memiliki arah yang positif menunjukan bahwa semakin baik kesadaran Wajib Pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang memiliki arti bahwa semakin baik kesadaran Wajib Pajak maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak masyarakat, dan pengaruhnya berdampak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Lian Ade Saputra, Rika Karlina Ekawati dan Icha Fajriana (2013) mengenai pengaruh kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Hasil penelitian ini secara parsial menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh hadi purnomo dalam Marcus taufan sofyan (2005) mengenai strategi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam poin pertama yang mengatakan bahwa perlunya membuat program dan kegiatan yang dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Jadi dengan menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran Wajib Pajak dilihat dari kedisiplinan dan kemauan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kesadaran Wajib Pajak merupakan indikator utama bagi Wajib Pajak agar melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah tidak akan maksimal jika kesadaran Wajib Pajak tidak ada. Jadi semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

3. Penerapan *E-filing* (X_1) dan Kesadaran (X_2) Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan uji secara simultan atau bersama-sama maka penerapan *e-filing* dan kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, hal ini dibuktikan dengan nilai sinifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-filing* dan kesadran Wajib Pajak secara bersama-sama meningkat maka kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat. Akan tetapi kedua variabel tersebut tidak mendominasi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Penerapan *e-filing* dilihat dari seberapa baik sistem *e-filing* dimengerti dan dimanfaatkan oleh Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak dilihat dari kedisiplinan dan kemauan masyarakat dalam membayar pajak. Pemanfaatan *e-filing* dan kemauan masyarakat yang tinggi dalam melaksanakan

kewajiban perpajakan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Jadi penerapan *e-filing* yang baik dan kesadaran Wajib Pajak yang meningkat akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

PENPENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data peneliti, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Terdapat hubungan yang positif dan kuat antara penerapan *e-filing* dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
- 2) Penerapan *e-filing* dan kesadaran Wajib Pajak berkontribusi sebesar 40,8% terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.
- 3) Penerapan *e-filing* dan kesadaran Wajib Pajak, masing masing berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

Penelitian ini menunjukkan penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak hendaknya lebih gencar mensosialisasikan *e-filing* dari segi manfaat yang diharapkan bisa semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena jika penerapan *e-filing* meningkat

1. Penyuluhan mengenai kesadaran Wajib Pajak harus lebih ditingkatkan lagi terutama mengenai pembayaran pajak dilakukan bukan karena semata mata paksaan tetapi merupakan keinginan dari masyarakat karena pajak merupakan sumber pendanaan negara yang utama sehingga penerimaan pajak didapat secara maksimal.
2. Penelitian ini dapat dijadikan referensi

bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti dengan judul yang sama dengan menggunakan sampel yang lebih banyak dan indikator indikator yang berbeda dari peneliti sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung : Nuansa.
- Agus Nugroho Jatmiko. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Tesis. Pasca Sarjan. Universitas Diponegoro.
- Agoes, Sukrisno dan Estralita Triswati .2009. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Badan Pusat Statistik Kota Baubau. 2015. *Survei Angkatan Kerja Nasional*. Di ambil dari <http://baubaukota.bps.go.id> pada tanggal 5 september 2017 pada pukul 14:39 WITA.
- DJP. 2012. *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. Di ambil dari <http://www.pajak.go.id/content/strategi-meningkatkan-kepatuhan-wajib> -pajak pada tanggal 19 April 2017 pada pukul 15:00 WITA.
- _____. 2015. *Sambut baik e-filling kepatuhan penyampaian spt tahunan orang pribadi meningkat*. Di ambil dari <http://www.pajak.go.id/content/arti-cle/pajak> /sambut-baik-e-filing-kepatuhan-penyimpanan-spt-tahunan-orang-pribadi- meningkat pada tanggal 19 April 2017 Pada pukul 15:00 WITA.

- _____. 2016. *Penerimaan Pajak 2016*. Di ambil dari <http://www.pajak.go.id/content/article/outlook-penerimaan-pajak-tahun-2016> pada tanggal 19 April 2017 Pada pukul 15:00 WITA.
- _____. 2016. *Refleksi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. Di ambil dari <http://www.pajak.go.id/content/article/Refleksi-Tingkat-Kepatuhan-Wajib-Pajak> pada tanggal 19 April 2017 Pada pukul 15:00 WITA.
- Duwi priyatno. 2010. *Paham Analisa Data Dengan SPSS Versi 17*. Jakarta: Mediakom.
- Erly Suandy. 2002. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- _____. 2005. *Hukum Pajak* Jakarta : Salemba Empat.
- _____. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gita Gowinda Kirana. 2010. *Analisis Perilaku Penerimaan Wajib Pajak terhadap Penggunaan E-Filling*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Hidayat, Syarifudin. 2002. *Metode Penelitian. Bandung* : Mandar maju
- Husein umar. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta:Rajawali
- Imam Ghazali. 2009. *Ekonometrika: Teori Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Lian Ade Saputra, Rika Karlina Ekawati dan Icha Fajriana. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang*. Skripsi. Jurusan Akuntansi STIE MDP Palembang.
- Manik Asri, Wuri. 2009. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar*. Skripsi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Maman Suherman dan Medina Almunawwaroh. (2015). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya*. Media riset Akuntansi, Auditing & Informasi, Vol. 15 No.1 April 2015. Fakultas Ekonomi. Universitas Siliwangi Tasikmalaya.
- Marcus Taufan Sofyan. 2005. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar*. Skripsi Sarjana Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI.
- Muhammad Zain. 2004. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

- Mutikasari, Elia . 2007. *Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya*. Makalah disajikan dalam Simposium Nasional Akuntansi X. Simposium Nasional Akuntansi. Universitas Hasanuddin. Makassar. 26-28 juli 2007.
- Nasution. (2006). *Perpajakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ony Widilestariningtyas dan Gartina Wulan Utami. 2016. *Penerapan E-Filing Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Formal (Survey Pada Wp Op Pekerjaan Bebas Di Kpp Pratama Bandung Karees)*. Skripsi. Universitas Komputer Indonesia
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770S atau 1770SS secara e-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Safrin Nurmantu. 2005. *Pengantar perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Sari Nurhidayah. 2015. *Pengaruh Penerapan Sistem E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Siti kurnia Rahayu.2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Sri Rahayu & Ita Salsalina Lingga. 2009. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi. Vol.1, No:119-138.
- Sugiarto dan Wahyono .2005. *Manajemen Kearsipan Modern, Dari Konvensional Ke Basis Komputer*. Yogyakarta : Gava Media
- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke-17 Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V Wiratnam dan Poly Endrayanto. 2012. *Statistika untuk Penelitian*. Yogyakarta:Graha Ilmu
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan
- Wulandari Agustiniingsih. 2016. *Pengaruh Penerapan E-filling,Tingkat pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Yogyakarta*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta.

**PENGARUH PERSEPSI KEADILAN PAJAK
TERHADAP PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BAUBAU**

Wa Ode Suwarni
(Dosen Fakultas Ekonomi)

A B S T R A C K

This study aims to analyze the effect of the perception of tax fairness on corporate tax payer compliance behavior on the KPP Pratama Baubau. This study uses simple regression analysis technique by analyzing descriptive data or responses of respondents based on a questionnaire that has been submitted, then the data in the form of numbers (scores) of respondents responses from the measurement results through questionnaires. The measurement scale used is a likert scale with five components, the data obtained is then processed a computer using a program Software Microsoft Office Excel and Statistical Product and Service Solution (SPSS). The result of this study indicate that the perception of tax fairness has a positive and significant effect on corporate tax payer compliance behavior on the KPP Pratama Baubau.

Keywords: Perception of tax fairness, corporate tax Payer compliance be

**Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Baubau**

PENDAHULUAN

Berdasarkan aturan dalam Undang-Undang No 28 tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dikutip dari www.pajak.go.id tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara.

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerapan pajak adalah adanya keadilan dalam perpajakan. Secara psikologis masyarakat atau Wajib Pajak menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban dan masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara. Pemerintah berusaha untuk melakukan pengawasan, menganalisis, mengkaji, dan menyempurnakan administrasi perpajakan sehingga dapat menuju kearah pelayanan pajak yang lebih baik. Adanya suatu sistem keadilan perpajakan dalam pemungutan pajak yang sederhana terkait perhitungan, penyetoran dan

pelaporannya diharapkan kemauan membayar oleh Wajib Pajak menjadi lebih meningkat. Namun, permasalahan seringkali timbul dalam pemungutan pajak. Sebagian Wajib Pajak Orang Pribadi maupun badan usaha cenderung tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Baubau secara keseluruhan sebanyak 11.985 badan usaha dan jumlah Wajib Pajak Badan yang berada khusus di Kota Baubau sebanyak 3.935 badan usaha. Namun pada kenyataannya saat ini penerimaan pajak pada KPP Pratama Kota Baubau masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan

kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan usaha masih kurang. Hal ini dituangkan langsung oleh Kepala Seksi Eksentifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Baubau saat menggelar sosialisasi penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) melalui *e-filing*. Dengan demikian, beliau mengharapkan adanya kerjasama dari seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan usaha di Wilayah kerjanya demi meningkatnya pendapatan yang berdampak pada pesatnya pembangunan di Daerah itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Baubau jalan Betoambari No 35 kota Baubau, 93725

Tahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode Survei dengan cara mengumpulkan data melalui instrumen penelitian (Kuesioner). Survei dilakukan dengan cara langsung mengunjungi kantor KPP Pratama baubau untuk menggali informasi terkait dengan daftar Wajib pajak Badan, kemudian peneliti mendatangi Wajib pajak badan untuk memberikan kuesioner penelitian. Peneliti memberikan batas waktu pengembalian kuesioner. Penentuan skor yang

METODE PENELITIAN

digunakan atas jumlah pertanyaan yang diajukan pada responden adalah menggunakan *skala likert* dengan kriteria sebagai berikut : SS (Sangat Setuju), S (Setuju), KS (Kurang Setuju), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju).

Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang berada Di Kota Baubau sebanyak 3.935 Badan Usaha.

Responden yang akan digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang berada Di Kota Baubau, yaitu sebanyak 98 responden.

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Responden

Responden dalam penelitian ini adalah 98 Badan Usaha yang berada di Kota Baubau. Berikut daftar responden : Toko Bandung (jl. Kartini No 19 wale), Toko Sentosa (jl. Yos sudarso wale), Toko Matahari (jl. Yos sudarso, wale), Toko Kalimantan (jl. Yos sudarso No 78 wale), Toko sinar kabaena

(wale, wolio), Toko Fafa Molagina (jl. Erangga), Toko Fuji (Wameo, Batupoaro), Toko Bahagia (jl. Yos sudarso. Wale), Toko Mega Tani (jl. Yos sudarso. Wale), UD Bumi Tani (jl. Yos sudarso. Wale), Toko Sinar Jaya (jl. Wolter monginsidi, Tomba), Toko Nur Atifa (jl. Wolter monginsidi No 14), Toko Si-

nar Bangunan (jl. Ra Kartini, Wale), Toko Sinar Surya (jl. Ra kartini, wale), Toko Sinar Motor (jl. Yos sudarso, wale), Toko Harapan Jaya (jl. Ra kartini, wale), Toko Jatim Teknik (jl. Katamso, Tomba), Toko Intan (jl. Brigjen katamso, wale), Toko Sulawesi (jl. Yos sudarso, wale), Toko Setia (wale, wolio), Toko Mega Utama (wale, wolio), Toko Logam (jl. Yos sudarso, wale), Toko Sumber Mas (jl. Bataraguru, Wajo), Toko Sukses (jl. Yos sudarso, Wale), Toko Semesta (Lipu, Betoambari), Toko Restu Bumi (jl. Yos sudarso, Wale), Toko Yuliana (jl. Moh, Husni Tamrin, Bataraguru), Toko Ririn (Bone-bone, Murhum), Toko Non Blok (Wameo, Batupoaro), Toko Rahma Jaya (jl. Wolter monginsidi, Wale), Toko Buku Gramedia (Batulo, Wolio), Toko Alam Raya (jl. Yos sudarso, Wale), Toko Aneka Jaya (jl. Ra kartini, wale), Toko Anugrah (jl. Yos sudarso, wale), Toko Matahari Sport (jl. Wolter monginsidi, tomba), Toko Mutiara (jl. Yos sudarso, wale), Toko Rezky (jl. Erlangga,), Toko Ardi Jaya (Tanganapada, Murhum), Toko 99 Jaya (wale, murhum), Toko Sumber Niaga (jl. Ra Kartini, wale), Toko Cahaya (jl. Ra kartini, wale), Toko Cendrawasih (jl. Jend Ahmad yani, tomba), Toko Cahaya Lestari (jl. Wolter monginsidi), Toko Diana (wameo, Batupoaro), Toko Galaxy (jl. Yos sudarso, wale), Toko Garuda Mas (jl. Betoambari), Toko Hidayat (jl. Ahmad yani, Tomba), Toko Idaman (jl. Betoambari bone-bone), Toko Mekar Indah (jl. Jend sudirman, wale), Toko Yani (jl. Wolter monginsidi, Tomba), Toko Sejahtera Abadi (jl. Jend sudirman, Tomba), Toko Buku Baubau (jl. Wakaaka No 61), Toko Esa (jl. Wolter monginsidi, Tomba), Toko Lamedadi (wale, wolio), Toko Pasifik (jl. Yos sudarso, wale), Toko Madi (Wale, wolio), Cv Sumber Harapan (jl. Betoambari, Lanto), Cv Arhamta (jl. Sultan Hasanudin No 29), Cv Rama Jaya Sakti (jl. Pahlawan Kuda Putih), Cv Aryo (jl. Pahlawan No 40 Kadolomoko), Cv Buton Raya Abadi (jl. Wakaaka

No 57 kel, Lanto), Cv Ananda Elektrik (jl. Anoa No 5 kel, kadolomoko), Cv Abdi Guna (jl. Pahlawan komplek Kuda Putih kel, kadolokatapi), Bengawan Furniture (jl. Murhum No 99, Nganganaumala, Batupoaro), Cv Anugrah Jaya Tunggal (jl. Wolter Monginsidi No 37), Pt. Buton Artha Bahari (jl. Betoambari No 32), Pt Sinar Mitra Bangunan (jl. Sultan Hasanudin), Cv Anugrah Motor Indo, Cv Anugrah Jaya Tunggal (jl. Wolter monginsidi), Cv Kaimudin Bersaudara, Cv Pelita Indah, Cv Rabana Jaya Utama, Cv Amanah Sejahter, Pt Moko Kasita Jaya (jl. Wakaaka, Batupoaro), Pt Putri Rosalia (jl. Ra Kartini, wale), UD Buton Abadi (jl. Yos sudarso, wale), Cv Ayuba Tekhnik Bau-Bau (jl. Jendral sudirman No70 Baubau), Cv Azzabuur (jl. Betoambari), Cv Bayu Elektrik Pusat (jl. Pahlawan kel, kadolomoko), Cv Dwi Teknik (jl. Hayam Wuruk N0 16), Cv Intan Berlian Sejati (jl. Sapati manjawari No 04), Cv Jaya Abadi 9jl. Dr.Wahidin No 82 kel, lamangga), Cv Jaya Makmur (jl. Hayam Wuruk No 16), Cv Jaya Sarana (jl. Erlangga No 193), Cv Karya Alif Bersaudara (jl. Erlangga No 52 kel, Lanto), Cv Kokendra Perkasa (jl. Jend.Sudirman No 70 Wangkanapi), Cv Mega Cipta Mandiri (jl. Pahlawan. Kel, kadolo), Cv Merpati Putih (jl. Merpati No 12 kel, kato-bengke), Cv Melai Fresh (kel, Wajo kec, Betoambari), Cv Melai Molagina (jl. Bula-wambona, Wajo), Cv Meteor (jl. Hayam Wuruk No 177), Cv Molagina Elektrik (jl. Murhum No 19), Cv Najwa Pertiwi (kel, Kaobula), Cv Pilar Utama (jl. Jend.Sudirman no 70), Cv Prima Jasa Teknik (jl. R.A. Kartini No 12 kel, Wale), Cv Roda Mas (jl. Wolter monginsidi No 148), Cv Rama Teknik (jl. Jend, sudirman. Wangkanapi), Cv Resta Jaya (kel. Wangkanapi, wolio)

Uji Validitas Dan Reliabilitas

Dari hasil uji validitas dapat dinyatakan bahwa seluruh butir pernyataan pada kuisioner valid dikarenakan hasil perhitungan menunjukkan bahwa tingkat signifikansi $< 0,05$.

Hasil uji reliabilitas terhadap kuisioner persepsi keadilan pajak diperoleh nilai *Crombach's Alpha* sebesar $0,761 > 0,60$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang dikumpulkan melalui kuisioner dinyatakan reliabel dan dapat dipercaya.

Uji Regresi Linear Sederhana

Dari hasil regresi ditemukan nilai r^2 sebesar 0,885 atau 88,5%. Yang berarti bahwa kontribusi atau sumbangan persepsi keadilan pajak terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Baubau adalah sebesar 88,5%. Sedangkan sisanya 11,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Hasil uji F menunjukkan bahwa, dari hasil perhitungan di dapat nilai F_{hitung} Sebesar 27,205 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ atau 5% maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Yang berarti bahwa variabel persepsi keadilan pajak (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan

terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Baubau. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji F menunjukkan bahwa, nilai F_{hitung} Sebesar 27,205 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ atau 5% maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dian Anggraeni Berutu dan Puji Harto (2012); Lady Wahyuningratri (2018). bahwa secara umum tingkat kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh persepsi keadilan pajak. Persepsi keadilan pajak berasal dari penilaian atau pendapat Wajib Pajak yang timbul dari kepentingan yang ada dalam dirinya sendiri dan penilaian terhadap pemerintah terkait pengelolaan pajak. Jika persepsi masyarakat (Wajib Pajak) mengenai keadilan itu tinggi, maka Wajib Pajak akan memiliki kesadaran untuk berperilaku patuh dalam perpajakan. Tetapi jika sebaliknya, maka Wajib Pajak akan mulai menurunkan tingkat kepatuhan perpajakannya.

KESIMPULAN

Penelitian ini masih jauh dari sempurna dikarenakan memiliki beberapa keterbatasan yang dapat dilengkapi pada penelitian berikutnya seperti pada pemilihan variabel selain dari persepsi keadilan tetapi juga menggunakan variabel. Selain itu pada objek penelitian tidak hanya mengambil wajib pajak badan tetapi juga pada pajak orang pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghoni. 2012. *Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah*. Jurnal Akuntansi: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. Vol.1 No.1, 28
- Ade Mentari. 2017. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengk

- Albari. 2013. *Pengaruh Keadilan Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Unisia, Vol. XXXI No 69, 1-3
- Arum Sekar Sari. 2018. *Pemahaman Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Christine Yezzie. 2017. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Pemahaman Prpajakan, Dan sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bandar Lampung
- Fauzi Ahmad Mustofa. 2016. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Mahasiswa Perpajakan, Vol.8 No.1, 1-7
- Ferdiyanto Dharmawan. 2012. *Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Vol.1 No.1
- Devi Marta Ardi. Trimurti dan Suhendro. 2016. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak Di Kota Surakarta*. Jurnal Akuntansi: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Batik Surakarta, Vol.4 No.2
- Dian Anggraeni Berutu dan Puji Harto. 2012. *Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)*. Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro: Semarang
- Dini Suhartini. 2015. *Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Motivasi Sebagai Variabel Intervening*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Vol.2 No.1, 1-16
- Inne Nidya Astuti. 2015. *Analisis Penerapan E-filing Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara*. Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Surabaya.
- Lady Wahyunigratri. 2018. *Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pajak Pratama Sleman*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Lulu Fatmawati. 2018. *Pengaruh Keadilan, Ketetapan pengalokasian, Moral Pajak Dan Money Ethics Terhadap Penggelapan Pajak*. Jurnal Akuntansi Syariah: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Vol.18
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2016. *Pengantar Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Nuuridha Matiin. 2019. *Persepsi wajib Pajak Pada Keadilan Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Keberhasilan Tax Amnesty Pada*

- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda.** Jurnal Akuntansi: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sangatta.
- Peraturan Menteri Keuangan No 74/PMK.03/2012. **Tentang Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak.**
- Rizky Hamdani Pulungan. 2015. **Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion).** Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Vol.2 No.2
- Safri Nurmantu. 2003. **Pengantar Perpajakan.** Jakarta: Granit
- Siahaan Marihot Pahala. 2010. **Hukum Pajak Elementer: Konsep dasar Perpajakan Indonesia.** Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sitti Kurnia Rahayu. 2010. **Perpajakan Indonesia "Konsep dan aspek formal".** Yogyakarta: Graha Ilmu
- Solihah Wulandari. 2017. **Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan.** Jurnal Ekonomi Islam Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Vol.8 No.2
- Sugiyono. 2015. **Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D).** Bandung: Alfabeta
- Sulistiyono. 2012. **Pengaruh Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan.**
- Syahirman Yusi dan Ummyati Idris. 2009. **Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kuantitatif.** Penerbit Citra Books. Indonesia
- Undang-Undang Dasar 1945 No 28 Tahun 2007. Pasal 1, 2, dan 3. **Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.**
- Undang-Undang Dasar 1945 No 28 Tahun 2007. Pasal 2 ayat 1 **Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.**
- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2. **Tentang Penyelenggaraan Perpajakan Indonesia.**
- Yani Praja Astuti. (2012). **Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan**

ISSN : 2527 - 3019

Jurnal Ilmiah Ekonomika dan Bisnis

Volume 3, Nomor 1, Mey 2018

ISSN : 2527 - 3019

KETENTUAN PENULISAN JURNAL

1. **Substansi Artikel.** Artikel yang diserahkan merupakan tulisan ilmiah dengan kuantitatif maupun kualitatif berupa : studi pustaka, studi empiris, ataupun studi kasus, sebagai hasil pengembangan Ilmu Ekonomika dan Bisnis. Artikel yang disumbangkan adalah artikel orisinal yang belum pernah dipublikasikan di media lain dan menggunakan pustaka acuan matakahir, porposisi terbitan.
2. **Teknis Penulisan.** Artikel ditulis dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baku. Artikel memuat judul, nama penulis beserta keterangan dan alamat kerja yang jelas. Penulis abstrak dibatasi maksimum sampai 300 kata, untuk artikel Indonesia, abstrak ditulis bahasa Inggris dan sebaliknya, disertai kata kunci (*keyword*). Bagian utama artikel ditulis dengan sistematika : Pendahuluan, Tujuan Penelitian, Tinjauan Teori, Metodologi, Analisis dan Pembahasan, Kesimpulan, Saran, Daftar Pustaka. Setiap judul baik sub judul tulisan perlu diberikan **HURUF TEBAL SEMUA**, penyajian gambar, table, bagan, dan pendukung lain harus disertai dengan nomor urut, dan sumber yang konsisten.
3. **Seleksi Artikel.** Artikel yang masuk keredaksi akan diseleksi dan direview oleh anggota dewan redaksi dan ada kemungkinan untuk di edit dan /atau dikembalikan untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi. Artikel yang tidak dimuat tidak dikembalikan. Artikel yang dimuat merupakan hak redaksi dan dapat ditampilkan dalam media lain untuk akademik. Isi artikel di luar tanggung jawab redaksi.
4. **Penyerahan Artikel.** Artikel yang akan dimuat dapat dikirim/diserahkan berupa print-out ketikan dan dalam bentuk file Microsoft word yang bias dibuka dengan baik. Artikel divetak pada kertas A4 atau folio, spasi 1.5, huruf dengan Times New Roman 12, dimana Jumlah halaman 12 -15 Halaman.